

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA
PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik dalam Bidang Hubungan Internasional**

Oleh

Meutia Balgis

145120401111099



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN 2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

Meutia Balgis

NIM. 145120401111099

Telah disetujui oleh dosen pembimbing,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Aswin Ariyanto Azis, S.IP. M.DevSt
NIP. 19780220201121001

Primadiana Yunita, S.IP., MA
NIK. 2016079006202001

Malang, 05 November 2018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP. M.DevSt
NIP. 19780220201121001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM
MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Meutia Balgis

NIM. 145120401111099

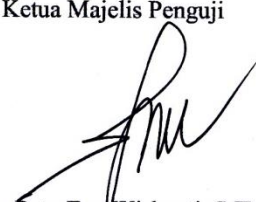
Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana


Pada tanggal 17 Oktober 2018

Tim Penguji,

Ketua Majelis Penguji

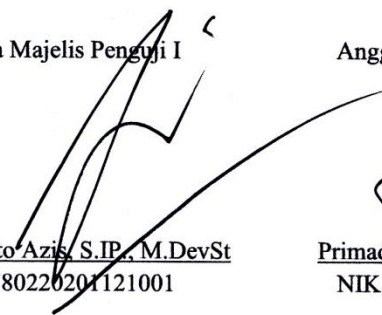
Sekretaris Penguji


Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si
NIK. 2013098708022001


Arief Setiawan, S.IP., M.Ps
NIK. 198403182009011000

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II


Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt
NIK. 19780220201121001


Primadiana Yunita, S.IP., MA
NIK. 2016079006202001

Mengetahui,

Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Idris Ludigdo, Ak.
NIK. 196903141994021001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama: Meutia Balgis

NIM: 145120401111099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN 2017” adalah benar-benar karya sendiri. hal-hal yang bukan merupakan karya saya di dalam skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, November 2018

Yang membuat pernyataan,

Meutia Balgis

NIM. 145120401111099

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjan ilmu politik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung penulis dalam masa perkuliahan dan penyusunan skripsi sebagai berikut :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua yaitu Alm. Bapak Asrin dan Alm. Ibu Dwi Yantiningsih yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Keluarga penulis yaitu Mbak Dian, Mas Ipul, Mbak Tantri, dan Mas Nanda selaku kakak dari penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan bagi penulis.
4. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt dan Ibu Primadiana Yunita, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan selama proses penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak Yustika Citra Mahendra, S.sos., MA selaku Dosen pembimbing akademik penulis.
6. Elfa Aulia Rahmah, Septia Eka, dan Sri Shofia yang telah menemani penulis selama masa kuliah.
7. Choirun Nisa, saudara sekaligus teman sekosan penulis.
8. Deby Farhadiba, *my sister and partner in crime*.
9. Seluruh mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya angkatan 2014. Serta semua pihak yang

tidak dapat disebutkan satu persatu dan terus memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak serta penulis sangat berharap agar penelitian ini, dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan informasi bagi penstudi hubungan internasional.

Malang, 03 November 2018

Penulis



ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN 2017

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Sanksi yang diberikan kepada Venezuela di tahun 2017 berupa penutupan akses terhadap sistem keuangan Amerika Serikat. Sanksi ini diberikan karena kondisi politik dan demokrasi di Venezuela yang mengalami pergolakan. Pemberian sanksi ini menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela di tahun 2017 menggunakan konsep Model Adaptif milik James N. Rosenau.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Venezuela, Sanksi, Model Adaptif.

***ANALYSIS OF UNITED STATES OF AMERICA FOREIGN POLICY TO
ENFORCE SANCTIONS TOWARD VENEZUELA IN 2017***

ABSTRACT

This research examines the United States foreign policy in giving sanctions toward Venezuela in 2017. The sanctions in 2017 is closing Venezuela access to the United States financial system. This sanction was given because of the political turmoil and democratic conditions in Venezuela. This policy indicated that there are some changes in United States's external and internal environment. This study aims to explain what factors influence the United States in giving sanctions to Venezuela in 2017 using the concept of the Adaptive Model by James N. Rosenau.

Keywords: Foreign Policy, United States of America, Venezuela, Sanction, Adaptive Model.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II	14
KERANGKA KONSEPTUAL.....	14
2.1. Studi Terdahulu	14
2.2. Kerangka Konseptual	18
2.3. Definisi Konseptual.....	20

2.3.1 Model Adaptif Politik Luar Negeri.....	20
2.4. Definisi Operasional.....	25
2.5. Alur Pemikiran	31
2.6. Argumen Utama	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Teknik Analisa Data.....	34
3.5 Sistematika Penulisan.....	34
BAB IV.....	37
GAMBARAN UMUM	37
4.1 Kondisi Ekonomi dan Politik Amerika Serikat.....	37
4.1.1 Kondisi Ekonomi Amerika Serikat.....	37
4.1.2 Kondisi Politik Amerika Serikat.....	40
4.2 Kondisi Politik dan Ekonomi Venezuela	42

4.2.1 Gejolak Politik Venezuela	42
4.2.2 Krisis Ekonomi Venezuela	43
4.3 Dinamika Hubungan AS dan Venezuela	49
4.4 Sanksi AS kepada Venezuela Tahun 2015	76
4.5 Sanksi AS kepada Venezuela Tahun 2017	78
BAB V.....	84
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AMERIKA SERIKAT	
DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN	
2017	84
5.1 <i>External Change</i>	84
5.1.1 <i>Great Power Structure</i>	84
5.1.2 Aliansi	88
5.1.3 <i>Situational Factor</i>	90
5.2 <i>Structural Change</i>	97
5.2.1 Geografis	97
5.2.2 <i>Size</i>	100
5.2.3 Budaya dan Sejarah	102
5.2.4 Pembangunan Ekonomi	103

5.2.5 Teknologi	105
5.2.6 Struktur Sosial	107
5.2.7 Opini Publik.....	109
5.2.8 Akuntabilitas Politik	110
5.2.9 Struktur Pemerintah	112
5.3 <i>Leadership</i>	121
BAB VI	127
PENUTUP	127
6.1 Kesimpulan.....	127
6.2 Rekomendasi Penelitian	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	145

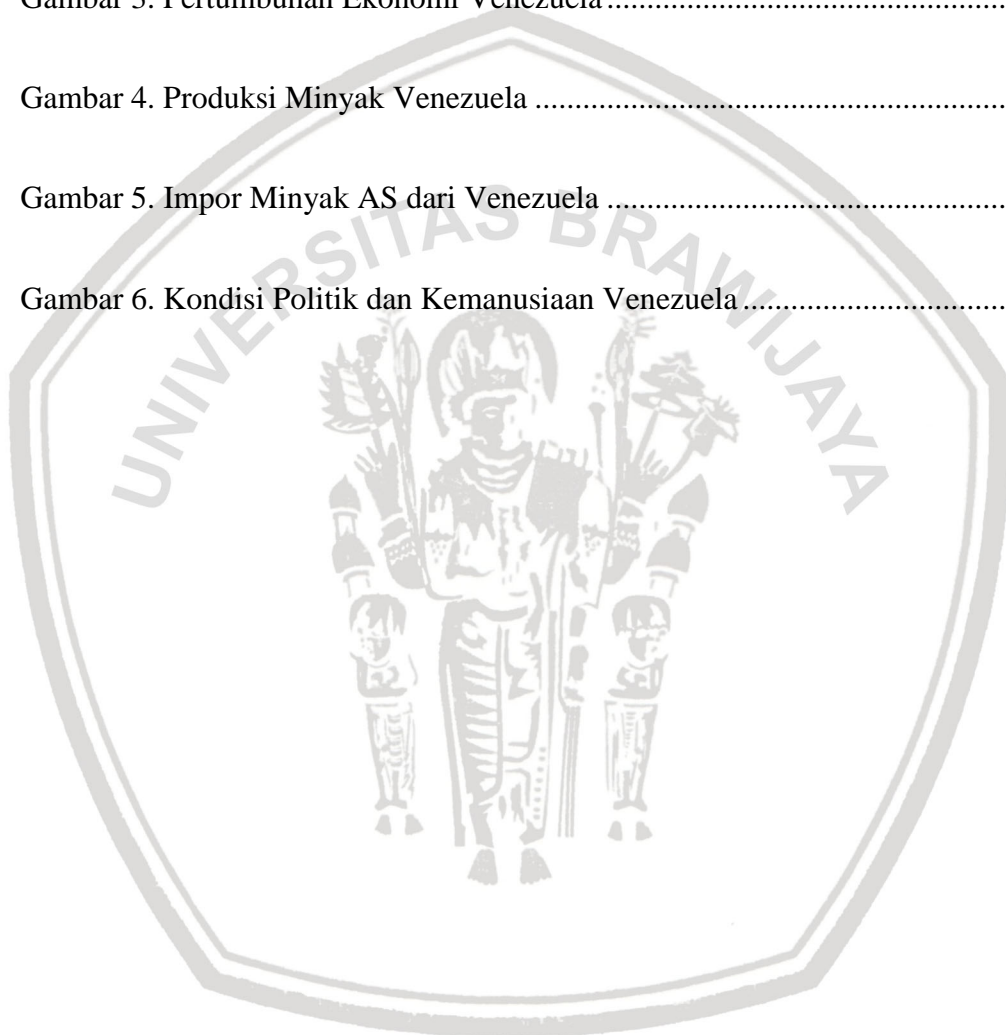
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasionalisasi Model Adaptif	28
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Perkonomian AS	37
Gambar 2. GDP Per Kapita Venezuela	46
Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Venezuela	47
Gambar 4. Produksi Minyak Venezuela	48
Gambar 5. Impor Minyak AS dari Venezuela	51
Gambar 6. Kondisi Politik dan Kemanusiaan Venezuela	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik luar negeri termasuk kedalam bidang kajian studi hubungan internasional. Pada dasarnya politik luar negeri merupakan pedoman bagi suatu negara untuk memilih tindakan atau kebijakan terhadap negara lain.¹ Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara dalam menghadapi suatu isu dapat berupa diplomasi, *political coercion*, *economic coercion*, tindakan tersembunyi, maupun intervensi militer. *Economic coercion* atau sanksi ekonomi biasanya dipilih karena negara menginginkan tindakan yang tidak terlalu *soft* dan tindakan yang terlalu *hard*.²

Sanksi ekonomi merupakan salah satu instrumen yang penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Sanksi ekonomi bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan negara lain dengan cara menimbulkan kerusakan ekonomi di negara tersebut. Cara ini dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dalam mengintervensi kebijakan negara dibandingkan dengan intervensi militer karena tidak menggunakan kekerasan. Meskipun cara yang digunakan lebih lunak namun sanksi ekonomi juga dapat menimbulkan dampak yang besar bagi negara yang dikenakan sanksi. Sanksi ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan makanan

¹ DR. Anak Agung Perwira dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 48.

² Gary Clyde Hufbauer dan Jeffrey J. Schott, "Economic Sanctions and US Foreign Policy", *PS Volume 18 No. 4* (2013): 727.

dan air bersih, ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan serta dapat juga berdampak pada harapan hidup dan kematian bayi.³

Sanksi ekonomi terdiri dari tiga bentuk yaitu dengan membatasi ekspor, menerapkan restriksi impor, dan menghambat arus keuangan dari negara yang menjadi target sanksi. Sanksi perdagangan berupa pembatasan ekspor dan penerapan restriksi impor dapat menciptakan biaya yang lebih besar bagi negara target sanksi karena negara tersebut kehilangan pasar untuk ekspornya dan komoditas ekspor yang terkena sanksi akan dijual dengan harga lebih murah. Selain itu, akses negara yang menjadi target sanksi terhadap komoditas impor yang penting menjadi terhambat serta negara tersebut harus membayar lebih mahal untuk barang substitusi impor.⁴ Sedangkan sanksi finansial berupa pembekuan aset atau penyitaan aset milik pemerintah negara target. Sanksi perdagangan dan finansial seringkali digunakan bersamaan. Bentuk dari penggunaan kedua sanksi tersebut adalah pembekuan aset luar negeri yang akan menghambat arus keuangan dan perdagangan.⁵

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang cukup sering memberikan sanksi ekonomi sebagai kebijakan luar negerinya. AS termasuk negara yang sudah sejak lama mempraktekan sanksi ekonomi. Meskipun popularitas sanksi ekonomi bisa dikatakan pudar namun hal tersebut masih tetap

³ Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier, "The Impact of US and UN Economic Sanctions On GDP Growth", *European Journal of Political Economy* 40 (2015): 110.

⁴ Gary Clyde Hufbauer et.al., *Economic Sanctions Reconsidered* (Washington, DC: United Book Press Inc., 2007), 36.

⁵ Ibid., 37 – 38.

diterapkan.⁶ AS hingga saat ini masih tetap mempraktekan sanksi ekonomi dalam kebijakan luar negerinya. Pada tahun 2018 terdapat 20 negara yang dikenakan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, kedua puluh negara tersebut adalah negara Balkan, Belarusia, Burundi, Republik Afrika Tengah, Kuba, DR Congo, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Rusia, Ukraina, Venezuela, Yaman, dan Zimbabwe. Selain sanksi ekonomi yang masih berlangsung di dua puluh negara tersebut, AS juga telah menghentikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dan Ivory Coast pada tahun 2016.⁷ Pada Oktober 2017 Amerika Serikat juga memutuskan untuk menghentikan sebagian besar sanksi ekonominya terhadap Sudan.⁸

Sanksi ekonomi diberikan dengan berbagai tujuan yang dicapai oleh negara pengirim sanksi. Salah satu tujuan pemberian sanksi adalah untuk menggulingkan rezim pemerintah di negara target, sanksi ini disebut dengan destabilisasi. AS pernah memberlakukan sanksi destabilisasi yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Goulart di Brazil pada tahun 1960-an. Selain itu AS juga pernah memberikan sanksi dengan tujuan serupa kepada Nikaragua untuk menggulingkan rezim Sandinista pada tahun 1980-an.⁹ Hingga saat ini AS masih menggunakan sanksi sebagai instrumen kebijakan luar negerinya untuk mengubah

⁶ Hufbauer dan Schott, "Economic Sanctions and US Foreign Policy", 728.

⁷ U.S. Department of The Treasury, *Sanctions Program and Country Information*, <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx> (diakses pada 19 April 2018).

⁸ Anonim, "Sudan Sanctions: US Lifts Most Economic Restrictions After Two Decades", *BBC*, 6 Oktober 2017, <http://www.bbc.com/news/world-africa-41531855> (diakses pada 19 April 2018).

⁹ Hufbauer dan Schott, "Economic Sanctions and US Foreign Policy", 732.

kebijakan negara targetnya, salah satunya adalah pemberian sanksi oleh AS kepada Venezuela yang mengalami krisis ekonomi dan kerusuhan politik.

AS dibawah pemerintahan Presiden Donald J. Trump pada 24 Agustus 2017 memberikan sanksi penutupan akses Venezuela terhadap sistem keuangan AS. Sanksi tersebut diberikan melalui *Executive Order* (EO) 13808 yang berjudul “*Imposing Additional Sanctions With Respect to the Situation in Venezuela*”. Berdasarkan EO 13808, pemerintah AS menutup akses Venezuela terhadap sistem keuangan AS. Sanksi ini diberikan kepada Venezuela sebagai respon AS atas kebijakan pemerintah Venezuela yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hak kebebasan serta memperparah krisis kemanusiaan di Venezuela. Selain itu, sanksi ini diberikan oleh AS dalam menanggapi pembentukan Majelis Konstitusi Nasional Venezuela yang merampas wewenang Majelis Nasional Venezuela dan lembaga pemerintah Venezuela lainnya. Sanksi ini juga diberikan karena korupsi merajalela yang terjadi di pemerintahan Venezuela serta kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela terhadap kelompok oposisi.¹⁰

Sanksi melalui EO 13808 tersebut merupakan tambahan terhadap sanksi yang diberikan oleh Presiden Barack Obama pada 8 Maret 2015. Sanksi tersebut diberikan melalui EO 13692 yang berjudul “*Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela*”. Obama menyebut bahwa situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela

¹⁰ The White House, *Executive Order 13808, Imposing Additional Sanctions With Respect to the Situation in Venezuela*, 2017, Washington, DC: Federal Register.

merupakan ancaman nasional bagi AS. EO 13692 memberlakukan sanksi pemblokiran aset dan pembatasan visa yang ditargetkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan atau tindakan yang merusak demokrasi di Venezuela, pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, pihak-pihak yang terlibat dalam pembatasan kebebasan berekspresi, dan pemerintah Venezuela yang terlibat masalah korupsi. Sanksi tersebut diberlakukan kepada pejabat pemerintah serta entitas manapun yang saat ini terlibat maupun pernah terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Sanksi tersebut diberikan karena gejala politik yang terjadi Venezuela dimana terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela, penganiayaan terhadap pihak oposisi, pembatasan kebebasan pers, penggunaan kekerasan dalam menghadapi protes anti pemerintah, penangkapan dan penahanan terhadap pemrotes anti pemerintahan, dan adanya korupsi yang parah di pemerintahan.¹¹

Sanksi penutupan akses Venezuela terhadap sistem keuangan AS pada tahun 2017 melarang transaksi oleh orang AS atau transaksi yang berlangsung di AS terkait dengan peminjaman utang baru kepada pemerintah Venezuela khususnya kepada perusahaan minyak milik negara Venezuela yaitu *Petroleos de Venezuela, SA* (PdVSA). Sanksi tersebut juga melarang transaksi yang berkaitan dengan ekuitas baru dan pembelian obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Venezuela, dan pembayaran dividen atau distribusi keuntungan lainnya kepada pemerintah Venezuela dari entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Venezuela. Selain itu, EO 13808 juga melarang orang AS untuk

¹¹ The White House, *Executive Order 13692, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela*, 2015, Washington, DC: Federal Register.

membeli sekuritas dari pemerintah Venezuela serta melarang transaksi pembelian sekuritas pemerintah Venezuela yang berlangsung di AS. Sanksi baru tersebut bertujuan untuk membatasi akses pemerintah Venezuela ke pasar keuangan AS yang telah menjadi sumber modal penting bagi pemerintah Venezuela dan PdVSA.¹²

Bentuk sanksi yang menutup akses pemerintah Venezuela terhadap sistem keuangan AS dipilih dengan melihat kondisi keuangan Venezuela. Dengan adanya sanksi tersebut, AS bertujuan untuk menekan serta menghambat keberlangsungan pemerintahan Maduro. Venezuela telah mengalami krisis ekonomi sejak tahun 2014, akibat ketergantungan negara tersebut pada sektor minyak dan hyperinflasi yang tinggi. Venezuela mengalami kondisi keuangan yang sulit karena cadangan devisa yang semakin berkurang. Pemerintah Venezuela melakukan berbagai kebijakan untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan menghindari gagal bayar. Venezuela membutuhkan pinjaman dana untuk tetap dapat melangsungkan aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Venezuela memperoleh pinjaman dari investor luar negeri, China dan Rusia. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela untuk mendapatkan aliran dana adalah dengan menjual obligasi perusahaan minyak milik negara yaitu Petroleos de Venezuela, SA (PdVSA) dengan diskon yang besar.¹³

¹² U.S. Department of State, *Venezuela – Related Sanctions*, <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/> (diakses pada 20 April, 2018).

¹³ Rebecca M. Nelson, *Venezuela's Economic Crisis: Issues for Congress*, 2018, <https://fas.org/sgp/crs/row/R45072.pdf> (diakses pada 20 April 2018).

Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa sanksi tersebut telah diperhitungkan dengan hati-hati untuk menghambat sumber dana atas kediktatoran Maduro, melindungi sistem keuangan AS agar tidak terlibat dalam korupsi pemerintah Venezuela, serta menargetkan utang negara Venezuela. Lebih lanjut juru bicara Gedung Putih juga menyatakan akan terus bersama masyarakat Venezuela dalam menghadapi situasi sulit yang dihadapi saat ini.¹⁴ Sanksi tersebut bertujuan untuk memotong akses pemerintah Venezuela untuk mendapatkan pinjaman dari investor AS atau melalui sistem keuangan AS sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan Maduro. Selain itu, anak perusahaan PdVSA yaitu CITGO yang berada di AS dilarang mendistribusikan laba kepada pemerintah Venezuela meskipun tetap dapat melanjutkan operasinya di AS.¹⁵

Venezuela sejak tahun 2014 telah mengalami krisis ekonomi dan kerusuhan politik. Pemerintah Venezuela dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan terhadap pihak oposisi, pembatasan kebebasan pers, penggunaan kekerasan dalam menghadapi protes anti pemerintah, penangkapan dan penahanan terhadap pemrotes anti pemerintahan, dan adanya korupsi yang parah di pemerintahan.¹⁶ Atas kondisi politik yang terjadi, pihak oposisi secara berkelanjutan melakukan protes kepada pemerintah. Pihak oposisi menuntut pemerintah untuk membebaskan tahanan politik, menghargai kekuasaan lembaga

¹⁴ The White House, *Statement by the Press Secretary on New Financial Sanctions on Venezuela*, 25 Agustus 2017, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-new-financial-sanctions-venezuela/> (diakses pada 20 April 2018).

¹⁵ Clare Ribando Seelke dan Rebecca M. Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 2018, <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf> (diakses pada 20 April 2018).

¹⁶ The White House, *Executive Order 13692*.

legislatif, mempublikasikan kalender pemilu, dan menuntut diadakannya pemilu presiden lebih awal.¹⁷

Pada 1 Mei 2017 Presiden Maduro menyatakan rencananya untuk mengubah konstitusi Venezuela. Maduro juga akan membentuk sebuah badan bernama Majelis Konstitusi Nasional yang nantinya akan bertugas untuk mengubah konstitusi Venezuela. Rencana tersebut disambut dengan protes oleh kelompok oposisi. Ketua Majelis Nasional, Julio Borges, menyatakan bahwa rencana tersebut membunuh konstitusi dan demokrasi di Venezuela.¹⁸ Presiden Trump pada 17 Juli 2018 memberikan pernyataan terkait rencana tersebut yang berisi bahwa AS tidak akan hanya diam melihat Venezuela hancur, apabila Maduro tetap memaksakan dibentuknya Majelis Konstitusi Nasional pada 30 Juli 2017 maka AS akan mengambil tindakan ekonomi dalam menghadapinya. AS menyerukan agar pemilihan umum dilakukan dengan bebas dan adil. AS selalu mendukung masyarakat Venezuela dalam upaya mereka untuk memulihkan Venezuela menjadi negara yang penuh demokrasi dan sejahtera.¹⁹

Pada akhirnya tanggal 30 Juli 2017, pemerintah Venezuela tetap mengadakan pemilu untuk memilih anggota dan membentuk Majelis Konstitusi Nasional. Kondisi politik yang semakin keruh dan dibentuknya Majelis Konstitusi Nasional oleh pemerintah Venezuela, membuat AS kembali memberikan sanksi

¹⁷ Marilia Brocchetto dan Rafael Romo, "Venezuela's Maduro Calls for Constitutional Changes Amid Unrest," *CNN*, 1 Mei 2017, <https://edition.cnn.com/2017/05/01/americas/venezuela-maduro-new-constitution/index.html> (diakses pada 5 Agustus 2018).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ The White House, *Statement From President Donald J. Trump*, 2017, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-5/> (diakses pada 28 Mei 2018).

kepada Venezuela. Presiden Donald Trump melalui EO 13808 pada 24 Agustus 2017, menerapkan sanksi tambahan terkait situasi politik di Venezuela.²⁰

Kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela telah lama menarik perhatian AS. Selama lebih dari sepuluh dekade, AS memiliki campur tangan terhadap kedua hal tersebut di Venezuela. AS telah lama mengincar perubahan rezim di Venezuela dan adanya kerusuhan politik serta krisis ekonomi di Venezuela membuat AS merasa memiliki kesempatan yang semakin besar untuk mencapai perubahan rezim di Venezuela.²¹ Administrasi Obama menerapkan upaya-upaya diplomasi bilateral dan multilateral dalam menghadapi kondisi demokrasi dan kemanusiaan di Venezuela.

Upaya bilateral yang dilakukan oleh Obama adalah pada tahun 2009 berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Venezuela.²² Namun hubungan diplomatik kedua negara tersebut tidak berjalan dengan baik dan sering diiringi oleh pengusiran diplomat di kedua negara. Pada tahun 2014 Venezuela mengusir diplomat AS karena tuduhan terlibat dalam mendanai protes terhadap pemerintah Venezuela.²³ Sedangkan upaya multilateral dilakukan dengan mendesak negara-negara Amerika Latin untuk membantu menyelesaikan situasi di Venezuela

²⁰ U.S. Department of State, *Venezuela – Related Sanctions*.

²¹ Andrew Buncombe, "CIA chief hints agency is working to change Venezuelan government," *Independent*, 25 Juli 2017, <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/cia-venezuela-crisis-government-mike-pompeo-helping-install-new-remarks-a7859771.html> (diakses pada 15 September 2018).

²² Mark P. Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 2014, https://www.everycrsreport.com/files/20141002_R43239_2a74c9bcaaffea1a6b8f95973049deacd118fbc0.pdf (diakses pada 30 April 2018).

²³ *Ibid.*, 28.

dengan memfasilitasi dialog antara pemerintah Venezuela dan pihak oposisi.²⁴ Selain itu, Obama juga memberikan sanksi pada tahun 2015 namun hanya mentargetkan pejabat-pejabat Venezuela.

Kebijakan AS dalam merespon situasi di Venezuela mengalami perubahan pada masa Trump. Kebijakan terhadap Venezuela lebih mengarah pada opsi unilateral yaitu sanksi. Trump menambahkan nama-nama pejabat Venezuela ke dalam sanksi pembekuan aset dan pembatasan visa yang diberikan pada masa pemerintahan Obama di tahun 2015.²⁵ Trump juga memberlakukan sanksi tambahan pada tahun 2017 melalui EO 13808. Sanksi yang diberikan oleh Trump bersifat lebih keras. Berbeda dengan sanksi Obama yang hanya mentargetkan pejabat Venezuela, sanksi Trump langsung menyerang kondisi keuangan Venezuela yang membutuhkan pinjaman. Dampak sanksi yang diberikan pada masa Trump lebih besar yaitu dapat mempengaruhi perekonomian Venezuela.²⁶

AS dan Venezuela merupakan mitra dagang dalam sektor minyak. Venezuela masuk dalam tiga besar negara sumber *supply* minyak mentah bagi AS. Perusahaan minyak Venezuela PdVSA juga memiliki anak perusahaan di AS yaitu CITGO. CITGO berbasis di Texas dan memiliki 3 kilang minyak, 48 fasilitas terminal, dan beberapa jaringan pipa. Dengan krisis ekonomi Venezuela yang semakin memburuk dan PdVSA yang kesulitan membayar utangnya, AS

²⁴ Ibid., 29.

²⁵ Michael Camilleri, *Evolution or Revolution? U.S. Policy on Venezuela from Obama to Trump*, 21 September 2018, <https://www.thedialogue.org/analysis/evolution-or-revolution-u-s-policy-on-venezuela-from-obama-to-trump/> (diakses pada 23 Oktober 2018).

²⁶ Mark Weisbrot, *Trump's New Sanctions Will Harm The People of Venezuela*, 28 Agustus 2017, <https://thehill.com/blogs/pundits-blog/foreign-policy/348276-trumps-tough-venezuela-sanctions-do-more-harm-than-good> (diakses pada 1 Mei 2018).

mengkhawatirkan keterlibatan Rusia dalam industri minyak Venezuela. Pada tahun 2016, PdVSA menerima pinjaman sebesar 1,5 milyar USD dari perusahaan minyak Rusia, Rosneft. PdVSA menggunakan 49,9% sahamnya di CITGO sebagai jaminan utang kepada Rosneft sehingga apabila PdVSA tidak bisa membayar utangnya maka Rosneft akan memiliki saham di CITGO sebesar 49,9%.²⁷ Apabila Rosneft memiliki saham di CITGO maka hal ini akan melanggar sanksi AS kepada Rosneft yang melarang orang AS untuk bertransaksi dengan Rosneft.²⁸

Pejabat Kongres AS juga mengkhawatirkan keamanan energi AS apabila Rosneft memiliki saham di CITGO. Pada Mei 2017, Kongres AS mendesak CFIUS untuk melakukan *review* terhadap potensi kepemilikan Rosneft atas CITGO. CFIUS merupakan badan yang bertugas untuk melakukan *review* terhadap investasi asing di AS yang berpotensi mengancam keamanan nasional AS.²⁹ Selain itu pada 19 Juni 2017, Senator AS mengirim surat kepada Sekretaris Negara Rex Tillerson dan Sekretaris *Department of Treasury* Steven Mnuchin yang berisi mengenai permintaan agar CFIUS mereview potensi kepemilikan Rusia terhadap CITGO dan meminta agar pihak eksekutif segera merancang kebijakan untuk mencegah kontrol Rusia terhadap salah satu

²⁷ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 30-31.

²⁸ United States Senate, *Washington DC 20510*, 19 Juni 2017, <https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/061917%20Rosneft%20Citgo%20Letter1.pdf> (diakses pada 27 September 2018).

²⁹ Timothy Gardner, "U.S. senators seek review of potential Russian control of Citgo," *Reuters*, 20 September 2017, <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa-congress/u-s-senators-seek-review-of-potential-russian-control-of-citgo-idUSKCN1BU2O4> (diakses pada 27 September 2018).

infrastruktur energi AS.³⁰ Akhirnya Trump pada 24 Agustus memberikan sanksi berupa penutupan akses terhadap sistem keuangan AS kepada Venezuela sehingga Venezuela juga tidak dapat melakukan transaksi dengan CITGO dan AS dapat mencegah kemungkinan kepemilikan Rosneft atas CITGO.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk menjadikan kebijakan AS dalam memberikan sanksi kepada Venezuela sebagai masalah penelitian karena terdapat hal yang menarik dalam isu tersebut. Dalam sanksi yang diberikan, AS melarang adanya pemberian utang baru kepada pemerintah Venezuela dan PdVSA. Meskipun sanksi tersebut diklaim hanya menargetkan pemerintahan Maduro dan PdVSA namun pada kenyataannya sanksi tersebut juga berdampak pada masyarakat Venezuela. Dengan berkurangnya dana pinjaman pada pemerintah dan PdVSA maka akan berdampak pada penurunan produksi minyak Venezuela sehingga pendapatan negara menurun. Hal tersebut dapat mengakibatkan penderitaan kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan pokok lainnya yang dialami masyarakat Venezuela semakin parah. Selain itu Venezuela termasuk dalam lima besar negara pemasok minyak bagi AS. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Memberikan Sanksi kepada Venezuela Pada Tahun 2017”.

³⁰ United States Senate, *Washington DC 20510*.

³¹ The White House, *Executive Order 13808*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka bisa ditarik sebuah rumusan masalah yaitu “Apa faktor- faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017?”.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017.

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori hubungan internasional pada suatu studi kasus.

b. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi penulis yang tertarik mengenai isu kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang pertama adalah sebuah tesis yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 (2001-2008)” yang ditulis oleh Heggy Kearens tahun 2012. Penulis menggunakan tesis ini sebagai referensi penelitian karena adanya persamaan teori yang digunakan dalam mengkaji kebijakan luar negeri. Tesis ini menggunakan Model Adaptif milik Rosenau untuk mengkaji kebijakan luar negeri Australia. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada masalah atau studi kasus yang diteliti. Kearens meneliti mengenai kebijakan kontra terorisme Australia sedangkan penulis meneliti kebijakan Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela tahun 2017.

Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dalam isu kontra terorisme. Kebijakan luar negeri yang dilakukan Australia adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia terkait kontra terorisme. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam sebuah perjanjian yaitu *Lombok Treaty* yang diratifikasi oleh kedua negara pada tahun 2007. Serangan Bom Bali 1 menjadi latar belakang Australia untuk mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan Indonesia dalam isu terorisme karena stabilitas keamanan

Indonesia sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Australia sebagai negara tetangga.³²

Kearens memaparkan bahwa determinan internal dalam kebijakan kontra terorisme Australia terhadap Indonesia berupa pemerintah yang saat itu sedang berkuasa serta opini publik Australia. Sosok perdana menteri yang saat itu menjabat berpengaruh terhadap karakteristik kebijakan serta adanya perubahan partai pemenang pemilu yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Pada masa pemerintahan Howard, Australia cenderung lebih menyukai kerjasama bilateral dibandingkan kerjasama regional. Determinan eksternalnya adalah hubungan antara AS dan Australia yang mempengaruhi Australia untuk membuat kebijakan kontra terorisme yang bersifat *hard approach*. Determinan eksternal kedua adalah adanya Konvensi Anti-Terrorisme yang diratifikasi oleh Australia yang membuatnya mendesak wilayah-wilayah di negaranya untuk meratifikasi konvensi tersebut. Upaya yang dilakukan Australia dalam mendukung hal tersebut adalah dengan mengadakan kerjasama keamanan bilateral.³³

Tesis tersebut berkontribusi dalam memberikan pemahaman konsep bagi penulis. Tesis yang ditulis oleh Kearens tersebut memberikan gambaran bagi penulis terkait cara operasionalisasi kasus yang diteliti oleh penulis ke dalam Model Adaptif milik Rosenau. Dalam tesis tersebut variabel dependennya adalah kebijakan Australia terhadap penanganan terorisme di Indonesia sedangkan variabel independennya adalah *external change*, *internal (structural) change*, dan

³² Heggy Kearens, *Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 (2001-2008)*, (2012).

³³ Ibid.

leadership.³⁴ Dalam tulisannya Kearens tidak menjelaskan indikator dari masing-masing variabel sehingga dalam operasionalisasi konsepnya Kearens langsung mengacu pada variabel *external change*, *structural change*, dan *leadership*. Sedangkan penulis dalam penelitian akan memaparkan rincian indikator yang menjelaskan masing-masing variabel tersebut sehingga operasionalisasi yang dilakukan oleh penulis akan mengacu pada indikator dari masing-masing variabel dalam Model Adaptif milik Rosenau.

Studi terdahulu yang kedua adalah sebuah tulisan yang berjudul “Venezuela: Background and U.S. Relations” yang ditulis oleh Clare Ribando Seelke dan Rebecca M. Nelson tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan tentang hubungan Venezuela dan AS baik pada masa pemerintahan Hugo Chavez maupun Nicolas Maduro. Situasi politik Venezuela dijelaskan secara kronologis dalam tulisan tersebut, dimulai dari pemilihan presiden yang diduga terdapat kecurangan dan menimbulkan protes dari pihak oposisi dan masyarakat. Setelah itu adanya penangkapan terhadap pihak oposisi dan dibatasinya kebebasan masyarakat Venezuela untuk berpendapat dan berekspresi. Mahkamah Agung pada tahun 2017 juga sempat memindahkan kekuasaan legislatif dari parlemen menjadi milik Mahkamah Agung. Hal tersebut menimbulkan protes dari kelompok oposisi dan masyarakat yang anti pemerintah. Demonstrasi yang dilakukan terhadap pemerintahan Maduro mengakibatkan beberapa orang tewas dan luka-luka.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 6.

Selain gejolak politik, tulisan tersebut juga menjelaskan mengenai krisis ekonomi yang dialami oleh Venezuela. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan kurangnya bahan makanan dan obat-obatan di Venezuela. Terjadi hyperinflasi yang tingkatnya semakin tinggi serta adanya utang luar negeri yang cukup besar. Selanjutnya dalam tulisan tersebut dijelaskan juga mengenai kondisi sosial akibat adanya gejolak politik dan krisis ekonomi. Dengan adanya krisis, pemerintah Venezuela memangkas anggaran untuk kesehatan masyarakat sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Akibat terbatasnya akses pelayanan kesehatan dan langkanya pangan banyak masyarakat Venezuela yang bermigrasi ke negara tetangga seperti Brazil dan Kolombia.³⁶

Tulisan tersebut selanjutnya menjelaskan mengenai kebijakan AS terhadap Venezuela. Kebijakan yang diambil AS terkait kondisi politik Venezuela adalah dengan memberikan sanksi kepada Venezuela. Sanksi tersebut ditujukan kepada pemerintah Venezuela maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan politik, kasus kemanusiaan dan korupsi. Dalam tulisan tersebut Seelke dan Nelson menjelaskan secara komprehensif sanksi yang diberikan oleh AS kepada Venezuela pada tahun 2015 dan 2017.³⁷ Persamaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas kebijakan AS terhadap Venezuela. Hal yang menjadi perbedaan adalah tulisan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kondisi politik Venezuela hingga menyebabkan diberikannya sanksi AS sedangkan penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

yang melatarbelakangi AS mengambil kebijakan untuk memberikan sanksi kepada Venezuela melalui Model Adaptif milik James N. Rosenau.

Kontribusi tulisan tersebut dalam penelitian penulis adalah memberikan pemahaman mengenai kondisi politik yang menjadi penyebab diberikannya sanksi oleh AS kepada Venezuela, memahami krisis ekonomi sebelum dan sesudah adanya sanksi, dan memahami kondisi sosial Venezuela akibat adanya gejolak politik dan krisis ekonomi. Studi terdahulu ini, membantu penulis dalam penulisan latar belakang dan gambaran umum untuk menjelaskan kondisi politik Venezuela yang ricuh serta menjadi penyebab AS memberikan sanksi. Studi ini juga membantu penulis dalam menjelaskan kondisi krisis ekonomi Venezuela yang dimanfaatkan oleh AS untuk semakin menekan pemerintahan Maduro dengan memberikan sanksi.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Secara umum politik luar negeri merupakan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri adalah suatu komitmen atau strategi untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri dan merupakan

sebuah pedoman untuk menentukan keterlibatan suatu negara dalam isu internasional.³⁸

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dalam suatu negara dalam menghadapi negara maupun unit politik internasional. Kebijakan luar negeri juga digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.³⁹ Menurut Rosenau kebijakan luar negeri adalah upaya negara yang diwujudkan dalam sikap dan aktivitas untuk mengatasi serta mengambil keuntungan dari lingkungan internasional.⁴⁰ Analisis kebijakan luar negeri adalah studi yang mempelajari hubungan antar negara yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, dan kesepakatan dari pemerintahan suatu negara untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain, organisasi internasional, maupun dengan aktor-aktor non-pemerintah lainnya. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk mempengaruhi negara lain maupun aktor internasional.⁴¹

Rosenau menyatakan bahwa terdapat empat sumber yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri yaitu sumber sistemik, sumber masyarakat, sumber pemerintahan dan sumber idiosinkratik. Sumber sistemik berasal dari lingkungan eksternal yang menjelaskan mengenai pola hubungan antar negara-

³⁸ Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 47.

³⁹ Ibid., 49.

⁴⁰ James N. Rosenau, *The Study Of Political Adaptation* (New York: Nichols Publishing Company, 1981), 37.

⁴¹ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 439.

negara (*great power structure*), pola aliansi antar negara, dan *situational factor* seperti adanya suatu isu atau krisis. Sumber masyarakat berasal dari lingkungan internal yang mencakup kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik. Sumber pemerintahan juga berasal dari lingkungan internal yang mencakup akuntabilitas politik dan struktur pemerintah. Sumber idiosinkratik berupa nilai-nilai, pengalaman, bakat, latar belakang, dan kepribadian dari elit politik dalam lingkungan internal negara.⁴²

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Model Adaptif Politik Luar Negeri

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai sebuah perilaku yang adaptif. Rosenau mengumpamakan negara sebagai suatu organisme yang melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara dipahami sebagai perilaku adaptif ketika menghadapi atau memicu perubahan di lingkungan eksternal.⁴³ Perubahan merupakan hal yang ditekankan dan penting dalam kebijakan luar negeri yang adaptif karena apabila tidak terdapat perubahan maka tidak ada hal yang harus diadaptasi oleh negara. Perubahan internal dan perubahan eksternal merupakan aspek utama dalam perspektif kebijakan luar negeri sebagai perilaku adaptif.⁴⁴

⁴² James N. Rosenau et al., *World Politics: An Introduction*, (New York: The Free Press, 1976), 18.

⁴³ Rosenau, *The Study Of Political Adaptation*, 38.

⁴⁴ Rosenau, *The Study Of Political Adaptation*, 42.

Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah sikap adaptasi yang dilakukan negara terkait dengan perubahan kondisi lingkungan. Kebijakan luar negeri yang bersifat adaptif tidak hanya dipahami sebagai respon negara terhadap lingkungan eksternal tetapi juga melihat perubahan internal dalam suatu negara. Perubahan mempengaruhi kebijakan luar negeri dapat berupa tuntutan dari lingkup internal negara terkait kondisi eksternal serta perubahan kondisi eksternal yang dianggap sebagai ancaman bagi suatu negara. Perubahan eksternal dan internal tersebut menjadi dasar bagi pembuat keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan dengan meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang.⁴⁵ Berdasarkan Model Adaptif tersebut terdapat tiga variabel yaitu:

a. *External Change*

External change merujuk pada perubahan kondisi eksternal yang membuat negara melakukan tindakan adaptasi dengan mengeluarkan suatu kebijakan terkait perubahan tersebut. Sumber-sumber yang terdapat dalam *external change* berasal dari sumber sistemik yang terdiri dari *great power structure*, pola aliansi, dan *situational factor*.⁴⁶ *Great power structure* merupakan pola hubungan antara negara-negara besar (*great power*) dalam sistem internasional. Pola hubungan yang dimaksud adalah jumlah negara dengan *great power* yang memiliki peran dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas diantara mereka. Aliansi adalah komitmen sebuah negara dalam menghadapi berbagai fenomena untuk tujuan politik. Aliansi berfungsi sebagai sumber

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

kebijakan luar negeri bagi negara-negara yang tergabung dalam sebuah persekutuan karena biasanya dalam suatu aliansi dibutuhkan kepatuhan dari negara-negara yang bergabung. *Situational factor* merupakan keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan eksternal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada. *Situational factor* berupa isu yang tengah menjadi perbincangan atau krisis yang mengancam negara dalam sistem internasional.⁴⁷

b. Structural Change

Structural change adalah perubahan internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Perubahan dalam *structural change* mengacu pada dua sumber yaitu sumber masyarakat dan sumber pemerintahan. Sumber perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi, geografis, *size*, budaya dan sejarah, pembangunan ekonomi, teknologi, struktur sosial, dan opini publik. Sedangkan sumber perubahan yang terjadi di pemerintahan adalah akuntabilitas politik dan struktur pemerintahan.⁴⁸

Geografis meliputi konfigurasi tanah, kesuburan tanah, iklim, dan letak suatu negara. Keadaan geografis suatu negara menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan luar negeri. Keterbatasan negara akibat keadaan geografisnya mempengaruhi pola hubungan negara dan mempengaruhi cara negara beradaptasi. *Size* terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia dilihat dari jumlah populasi dan *skill* yang dimiliki oleh penduduk dalam

⁴⁷ Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.

⁴⁸ Ibid

suatu negara. Sumber daya alam dilihat dari luas wilayah dan kekayaan alam yang ada dalam suatu negara.⁴⁹

Budaya mencakup norma dan tradisi yang dianut masyarakat sedangkan sejarah mencakup nilai dan peristiwa masa lalu yang menjadi pemersatu masyarakat. Apabila banyak anggota masyarakat yang dipersatukan oleh budaya dan sejarah maka hal tersebut semakin mempermudah pemerintah dalam membuat kebijakan. Pembangunan mempengaruhi diambilnya kebijakan luar negeri suatu negara. Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi maka semakin besar pula GNP suatu negara yang ditujukan untuk urusan eksternal sehingga mempengaruhi kemudahan negara dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Dalam faktor teknologi, perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara. Kapabilitas negara karena teknologinya yang canggih dapat menentukan peran dan status negara serta mempermudah negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri.⁵⁰

Perubahan dalam struktur sosial berhubungan dengan adanya konflik internal dalam masyarakat. Salah satu konflik internal dalam masyarakat bisa disebabkan oleh adanya perbedaan status dan kelas sosial. Keberadaan konflik internal dalam masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Faktor opini publik dilihat dari respon masyarakat atas isu yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Dalam melihat faktor opini publik, penting untuk mengetahui sistem politik suatu negara

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

karena sistem politik yang dianut menentukan pengaruh opini publik terhadap pengambilan keputusan.⁵¹

Akuntabilitas politik menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakatnya. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah ditandai dengan adanya pemilihan umum, persaingan partai, pengawasan legislatif, dan kegiatan luar negeri. Akuntabilitas politik suatu negara juga dapat dilihat dari tingkat korupsi di negara tersebut. Akuntabilitas politik menentukan tindakan pemerintah dalam menghadapi tuntutan dari masyarakatnya. Struktur pemerintahan yang dianut oleh suatu negara berpengaruh dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri. Berbeda struktur pemerintahan antara otoriter dan demokratis maka akan berbeda pula besar kekuasaan pemimpin dalam pengambilan keputusan.⁵²

c. *Leadership*

Leadership melihat peran individu yaitu pemimpin negara dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini level analisis terletak pada individu. Dalam model adaptif, *leadership* dapat dikatakan sebagai sumber pembuatan kebijakan luar negeri apabila terjadi perubahan pemimpin negara. Perubahan pemimpin negara membuat adanya perbedaan sikap dan tindakan antara pemimpin sebelumnya dan pemimpin yang menggantikan. Dengan sikap

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

dan tindakan yang berbeda maka berbeda pula kebijakan luar negeri yang diambil.⁵³

Dalam menganalisis *leadership* terkait pengaruhnya dalam kebijakan luar negeri dapat dilihat dari faktor idiosinkratik. Faktor idiosinkratik merupakan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin, tujuan yang ingin dicapai oleh pemimpin, kelemahan dan kekuatan intelektual pemimpin dalam membuat keputusan, latar belakang pemimpin, dan kepribadian dari seorang pemimpin negara. Faktor *leadership* sangat penting bagi kebijakan luar negeri karena pemimpin suatu negara memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan keputusan. Tetapi, pemimpin tidak bisa mengambil keputusan sebebas-bebasnya hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri namun juga harus mempertimbangkan peran pemerintah, masyarakat, dan sistem yang ada di negaranya.⁵⁴

2.4 Definisi Operasional

Dengan menggunakan Model Adaptif menurut Rosenau, tindakan Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017 bertujuan untuk merespon perubahan yang terjadi di Venezuela. Pengoperasionalisasian konsep dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang ada dalam Model Adaptif. Variabel-variabel tersebut adalah perubahan eksternal, perubahan internal, dan *leadership* yang mempengaruhi motif

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

pengambilan keputusan AS untuk kembali memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017.

Pada variabel *external change* terdapat 3 indikator. Indikator pertama yaitu *great power structure*, menganalisis ada atau tidaknya perubahan dalam pola hubungan antar negara yang mempengaruhi AS untuk melakukan adaptasi dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sanksi kepada Venezuela. Indikator kedua adalah aliansi, menganalisis ada atau tidaknya perubahan aliansi dan perubahan kebijakan dalam aliansi yang diikuti AS yang mempengaruhi kebijakan AS. Ketiga yaitu *situational factor*, menganalisis adanya suatu isu atau krisis yang mempengaruhi AS untuk mengeluarkan kebijakan memberikan sanksi pada Venezuela.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, *external change* dapat dilihat dari perubahan pada indikator *situational factor*. Pada indikator *situational factor* terdapat isu pembentukan Majelis Konstitusi Nasional oleh rezim Maduro yang ditentang oleh kelompok oposisi dan masyarakat Venezuela. Trump menyatakan bahwa rakyat Venezuela telah menunjukkan tindakan yang mendukung demokrasi namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Maduro yang ingin menjadi diktator. AS akan selalu mendukung tindakan rakyat Venezuela yang memperjuangkan demokrasi dan tidak akan diam saja melihat rakyat Venezuela hancur. Trump mengancam akan memberikan sanksi yang lebih berat apabila Maduro tetap membentuk Majelis Konstitusi Nasional. Maduro tidak menghiraukan ancaman Trump dan tetap membentuk lembaga tersebut sehingga akhirnya Trump

memberikan sanksi berupa penutupan akses Venezuela terhadap sistem keuangan AS.⁵⁵

Variabel *structural change* mencakup 9 indikator yaitu geografis, *size*, budaya dan sejarah, pembangunan ekonomi, teknologi, struktur sosial, opini publik, akuntabilitas politik, dan struktur pemerintahan. Indikator geografis melihat ada atau tidaknya perubahan kondisi geografis AS yang berpengaruh pada pemberian sanksi pada Venezuela. *Size*, melihat ada atau tidaknya perubahan demografi dan perubahan yang ada pada kekayaan alam yang mempengaruhi AS dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Budaya dan sejarah melihat adanya perubahan atau tidak pada nilai dan tradisi yang dianut masyarakat AS sehingga mempengaruhi munculnya kebijakan tersebut. Perkembangan ekonomi melihat ada atau tidak perubahan GNP AS yang ditujukan untuk urusan eksternal sehingga mempengaruhi AS mengeluarkan kebijakan pemberian sanksi.

Indikator selanjutnya dalam *structural change* adalah teknologi. Indikator teknologi melihat ada atau tidaknya perubahan atau tidak dalam teknologi AS yang berpengaruh pada kebijakan. Struktur sosial, melihat ada atau tidaknya konflik yang terjadi dalam masyarakat AS yang mempengaruhi AS dalam mengambil kebijakan pemberian sanksi pada Venezuela. Opini publik, melihat ada atau tidaknya opini publik yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan pemberian sanksi tersebut. Akuntabilitas politik, melihat adanya perubahan atau tidak dalam pemilu dan kompetisi antar partai yang mempengaruhi AS mengeluarkan kebijakan pemberian sanksi kepada Venezuela. Struktur

⁵⁵ The White House, *Executive Order 13808*.

pemerintah melihat ada atau tidaknya perubahan stuktur pemerintah yang dianut oleh AS sehingga mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan pemberian sanksi kepada Venezuela. Dalam studi kasus ini *structural change* bukan merupakan variabel yang berpengaruh meskipun terdapat perubahan pada beberapa variabelnya seperti *size* dan pembangunan ekonomi.

Variabel *leadership* akan menganalisis ada atau tidaknya perubahan pemimpin sehingga terdapat perbedaan pada latar belakang presiden AS serta perubahan pada visi dan misi kebijakan luar negeri presiden AS. Pada studi kasus ini, terjadi pergantian pemimpin dari Presiden AS yaitu Presiden Trump sebagai presiden terpilih dan menggantikan Presiden Obama. Pengambilan keputusan terkait pemberian sanksi kepada Venezuela pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Obama di tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 Presiden Trump memutuskan untuk memberikan sanksi tambahan kepada pemerintah Venzeula.

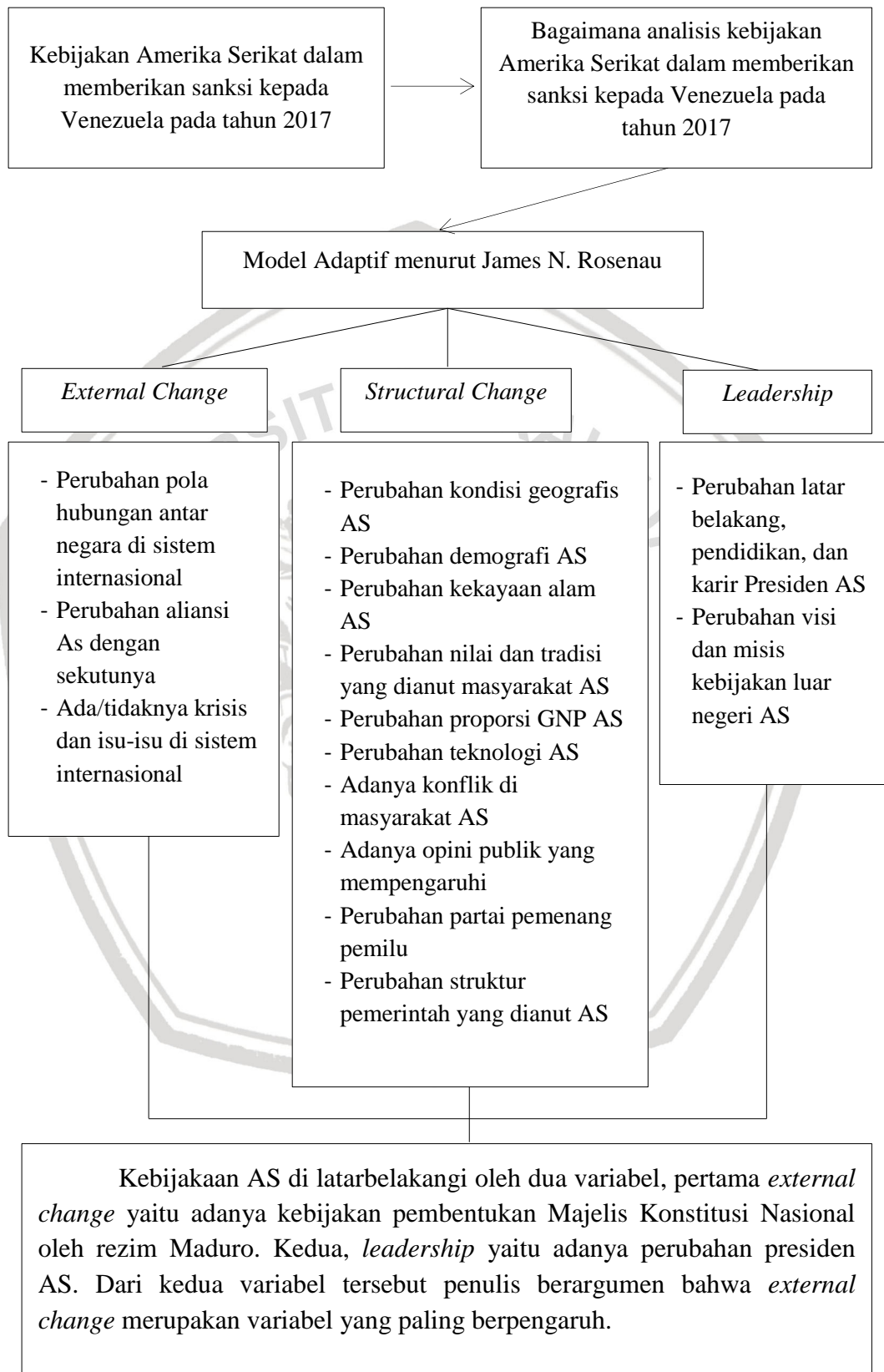
Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Model Adaptif

Variabel	Indikator		Operasionalisasi
<i>External Changes</i>	<i>Great Power Structure</i>	Perubahan dalam pola hubungan antar negara di dalam sistem internasional	Tidak ada perubahan dalam pola hubungan antar negara di dalam sistem internasional
	Aliansi	Perubahan hubungan antar negara dalam suatu aliansi	Tidak ada perubahan hubungan antar negara dalam suatu aliansi
	<i>Situational</i>	Perubahan isu atau	Adanya isu kebijakan

	<i>Factor</i>	krisis dalam sistem internasional	Maduro membentuk Majelis Konstitusi Nasional yang telah mendapatkan peringatan dari Trump bahwa AS akan memberikan sanksi apabila lembaga tersebut dibentuk
<i>Structural Changes</i>	Geografis	Perubahan kondisi geografis yang mempengaruhi suatu negara dalam mengeluarkan sebuah kebijakan	Tidak ada perubahan kondisi geografis AS yang mempengaruhi pembentukan kebijakan
	<i>Size</i>	Perubahan sumber daya yang dimiliki suatu negara	Tidak ada perubahan populasi dan sumber daya alam AS yang mempengaruhi munculnya kebijakan pemberian sanksi
	Budaya dan sejarah	Perubahan budaya dan sejarah yang ada di masyarakat suatu negara	Tidak perubahan nilai dan tradisi yang dianut oleh masyarakat AS
	Pembangunan ekonomi	Perubahan GNP yang mempengaruhi proporsi anggaran untuk urusan eksternal negara	Tidak ada perubahan GNP yang mempengaruhi AS untuk memberikan sanksi

	Teknologi	Perubahan teknologi yang mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan	Tidak ada perubahan dalam teknologi yang mempengaruhi AS dalam memberikan sanksi
	Struktur Sosial	Munculnya konflik internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan	Tidak ada konflik internal yang mempengaruhi kebijakan sanksi AS
	Opini Publik	Perubahan opini publik yang mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan	Tidak ada perubahan opini publik yang mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan AS
	Akuntabilitas Politik	Perubahan tanggungjawab pemerintah secara politik terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat	Tidak ada perubahan tanggungjawab pemerintah secara politik terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat
	Struktur Pemerintah	Perubahan struktur pemerintah yang dianut oleh suatu negara	Tidak ada perubahan struktur pemerintah yang dianut oleh AS
<i>Leadership</i>	Faktor Idiosinkratik	Perubahan pemimpin suatu negara yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri	Adanya pergantian presiden AS yaitu pergantian Presiden Obama menjadi Presiden Trump

2.5 Alur Pemikiran



2.6 Argumen Utama

Berdasarkan operasionalisasi konsep Model Adaptif tersebut kebijakan Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017 di latarbelakangi oleh dua variabel, pertama *external change* yaitu adanya kebijakan pembentukan Majelis Konstitusi Nasional oleh rezim Maduro yang sebelumnya telah dikecam oleh Trump. Kedua, *leadership* yaitu adanya perubahan presiden AS, dari Obama menjadi Trump. Dari kedua variabel tersebut penulis berargumen bahwa *external change* merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam munculnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada Venezuela tahun 2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan hubungan antara kedua negara dalam rumusan masalah melalui penggunaan konsep dalam menjelaskan suatu fenomena.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kajian kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dalam memberikan sanksi tambahan kepada Venezuela pada tahun 2017 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait pemberian sanksi tersebut. Cakupan waktu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tahun 2017 karena pada tahun tersebut penulis dapat melihat perkembangan kondisi politik dan ekonomi Venezuela serta pada tahun 2017 kebijakan pemberian sanksi kepada Venezuela kembali dilakukan. Namun untuk mengetahui latar belakang diambilnya kebijakan tersebut, penulis melakukan kajian historikal atas kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela untuk mendukung penelitian penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi literatur (studi pustaka). Data tersebut diambil dari sumber-sumber seperti buku, dokumen, jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait isu yang akan diteliti. Selanjutnya penulis akan melakukan penyeleksian dan pengelompokan data serta kemudian dianalisa.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui analisis non statistik. Data berbentuk tabel, angka maupun grafik akan dijabarkan ke dalam kalimat. Teknik analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu klasifikasi data, seleksi dan analisis atau intepretasi pada data tersebut dengan menggunakan teori atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya.

3.5 Sitematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, dan manfaat penelitian yang diberikan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Berisi landasan teoritis serta konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian guna mendapatkan pemecahan masalah yang diharapkan, yaitu terdiri dari: studi terdahulu, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, dan argumen utama.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terutama dibahas mengenai cara atau metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta batasan-batasan permasalahan yang ada sehingga peneliti akan berfokus dan tidak melenceng dari fokus yang ditentukan, yaitu terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

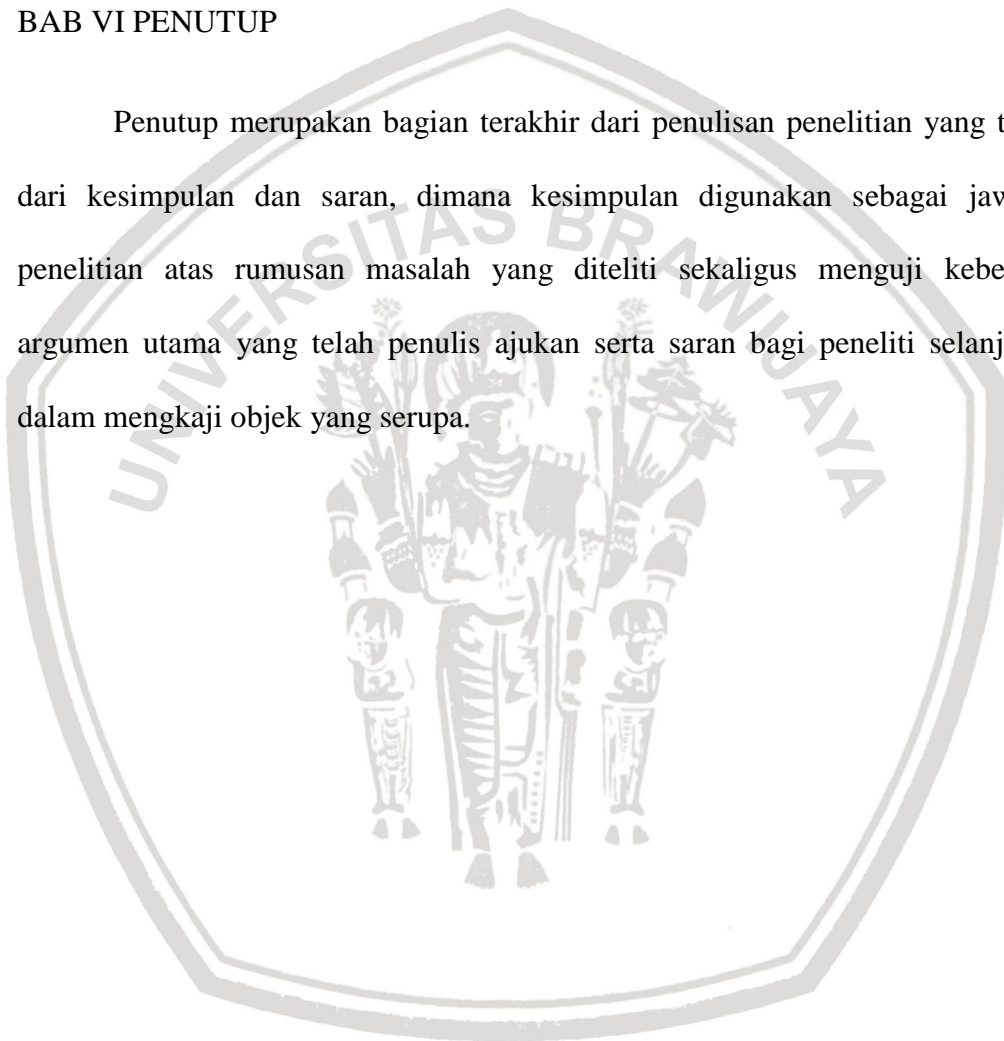
Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kondisi ekonomi dan politik AS dan Venezuela. Bab ini juga menjelaskan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela mulai tahun 2015 hingga 2017. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai hubungan AS dan Venezuela, kronologi pemberian sanksi, menjelaskan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada Venezuela, menjelaskan kondisi politik di Venezuela, dan menjelaskan mengenai krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela.

BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN 2017

Bab ini akan memuat analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memberikan sanksi kepada Venezuela, uraian dan jawaban dari identifikasi dan indikator-indikator penelitian, uraian mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan tersebut.

BAB VI PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan digunakan sebagai jawaban penelitian atas rumusan masalah yang diteliti sekaligus menguji kebenaran argumen utama yang telah penulis ajukan serta saran bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji objek yang serupa.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Ekonomi dan Politik Amerika Serikat

4.1.1 Kondisi Ekonomi Amerika Serikat

AS merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Ekonomi AS tumbuh 2,3% pada tahun 2017, angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yaitu 1,5%. Tingkat pengangguran AS pada tahun 2017 mencapai 4,4%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Namun tingkat inflasi naik 1,3% dari tahun 2016 yaitu mencapai 2,1% pada tahun 2017. Berikut ini merupakan data perekonomian AS.⁵⁶

Gambar 1. Data Perekonomian AS

Main Indicators	2015	2016	2017	2018 (e)	2019 (e)
GDP (billions USD)	18,120.70	18,624.45	19,362.13e	20,199.96	21,024.42
GDP (Constant Prices, Annual % Change)	2.9	1.5	2.2e	2.3	1.9
GDP per Capita (USD)	56,437	57,608	59,495e	61,687	63,810
General Government Balance (in % of GDP)	-3.6	-4.1	-4.4e	-4.0	-4.3
General Government Gross Debt (in % of GDP)	105.2	107.1	108.1e	107.8	107.9
Inflation Rate (%)	0.1	1.3	2.1e	2.1	2.6
Unemployment Rate (% of the Labour Force)	5.3	4.9	4.4	4.1	4.2
Current Account (billions USD)	-434.60	-451.69	-461.99e	-528.69	-573.51
Current Account (in % of GDP)	-2.4	-2.4	-2.4e	-2.6	-2.7

Source: IMF – World Economic Outlook Database, 2017

Note: (e) Estimated Data

AS adalah negara yang perekonomiannya tidak bergantung pada satu sektor. Sektor perekonomian AS terdiri dari pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian AS sangat maju dan terbesar di dunia, hal tersebut ditandai dengan

⁵⁶ Anonim, *United States: Economic And Political Outline*, <https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/united-states/economic-political-outline> (diakses pada 1 September 2018).

tingkat produktivitas yang tinggi dan penggunaan teknologi modern. AS adalah salah satu produsen utama jagung, kedelai, daging sapi, dan kapas di dunia. Meskipun begitu, sektor pertanian AS hanya menyumbang 1,3% dari PDB AS dan hanya dapat mempekerjakan 1,4% dari angkatan kerja. Selain sektor pertanian, sektor yang tak kalah penting adalah sektor industri.⁵⁷

Kegiatan sektor industri menyumbang lebih dari 20% PDB AS dan mempekerjakan 11,9% dari angkatan kerja. Sektor industri yang penting adalah pembuatan mesin listrik dan elektronik, produk kimia, mesin industri, serta industri makanan dan sektor mobil. AS juga merupakan negara yang sangat maju dalam industri kedirgantaraan dan farmasi. Negara ini adalah penghasil gas alam cair, aluminium, listrik, energi nuklir, serta bahan-bahan mineral. Selain kedua sektor tersebut, sektor jasa AS merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ini menyerap 81% tenaga kerja dan menyumbang tiga perempat PDB AS. Sektor jasa AS terdiri dari keuangan, asuransi, *real estate*, layanan pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan jasa sewa guna usaha (*leasing*).⁵⁸

AS memainkan peran penting dalam sistem perdagangan internasional dan pendukung pengurangan hambatan perdagangan dan perjanjian perdagangan bebas. AS merupakan pengekspor barang dan jasa terbesar kedua di dunia dan merupakan importir terbesar di dunia. AS mengalami defisit perdagangan karena aktivitas impornya yang sangat besar terutama karena impor minyak untuk

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

memenuhi kebutuhan energinya dan permintaan domestik yang tinggi untuk barang-barang konsumsi yang diproduksi di luar negeri. Mitra dagang utama AS adalah Kanada, China, Meksiko, dan Jepang. Kanada adalah tujuan utama ekspor AS sedangkan Cina adalah sumber utama impor AS. Komoditas ekspor utama AS adalah barang modal dan produk manufaktur bernilai tinggi, termasuk mesin industri, pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan bahan kimia. AS juga merupakan pengeksport jasa terkemuka di dunia. Jasa yang dieksport di antaranya adalah layanan bisnis keuangan, transportasi, pariwisata, dan lain-lain. Jasa mewakili sekitar sepertiga dari total ekspor.⁵⁹

Sedangkan dalam aktivitas impor, sebanyak 80% persen impor AS adalah barang. Sekitar 15% dari angka tersebut adalah impor minyak mentah, bahan bakar minyak, dan produk minyak bumi. Mesin industri, perlengkapan dan peralatan mencapai 15%. Hampir 25% barang impor adalah barang modal, seperti komputer, aksesoris komputer, elektronik, peralatan medis, dan peralatan telekomunikasi. Barang-barang konsumsi yang diimpor mencapai 25% seperti ponsel, peralatan rumah tangga, tekstil, pakaian jadi, televisi, dan alas kaki adalah jenis utama barang-barang konsumsi yang diimpor ke AS. Sedangkan 15% sisanya adalah impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif. Makanan dan minuman hanya mewakili sekitar 5% dan impor jasa mencapai 20% dari total impor.⁶⁰

⁵⁹ Focus Economics, *U.S. Economic Outlook*, <https://www.focus-economics.com/countries/united-states> (diakses pada 1 September 2018).

⁶⁰ Ibid.

Dalam mengatur perekonomiannya, pemerintah AS memiliki tugas penting untuk mengatasi dampak resesi dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Di sisi fiskal, belanja stimulus pemerintah dan pemotongan pajak mencegah memburuknya perekonomian lebih lanjut. Di sisi moneter, Bank sentral AS, *Federal Reserve*, telah mengatasi kelemahan ekonomi dengan kebijakan tradisional dan non-konvensional. AS biasanya dianggap sebagai rumah kebijakan ekonomi pasar bebas. Namun, pemerintah AS menjalankan sejumlah besar regulasi atas kegiatan ekonomi, komersial, dan keuangan. Setelah resesi, pemerintah meningkatkan pengawasannya di sektor keuangan.⁶¹

4.1.2 Kondisi Politik Amerika Serikat

AS adalah negara yang sering disangkut pautkan dengan julukan negara demokrasi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh beberapa akademisi ilmu politik menunjukkan bahwa demokrasi di AS cukup kuat namun terdapat beberapa kekurangan. Hasil survey tersebut mengatakan bahwa AS berkinerja baik pada beberapa ukuran yang penting dari demokrasi seperti pemilihan yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, dan batas-batas peradilan pada kekuasaan eksekutif. Namun dari survey tersebut, AS dinilai tidak memiliki kinerja baik dalam hak politik dan hukum yang setara dan hak suara yang setara. Selain itu

⁶¹ Ibid.

masyarakat skeptis bahwa Kongres dan Konstitusi dapat secara efektif membatasi kekuasaan eksekutif.⁶²

Mempromosikan demokrasi ke negara-negara lain adalah salah satu agenda dalam kebijakan luar negeri AS. Meskipun telah lama mempromosikan demokrasi, namun AS dinilai gagal dalam melakukannya. Hal ini disebabkan karena AS menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa negara lain untuk menjadi negara demokrasi. Cara-cara yang bersifat memaksa tersebut berupa intervensi militer maupun pemberian sanksi. Menurut Stephen M. Walt, cara-cara paksaan seperti intervensi militer yang dilakukan AS tidak berhasil dalam mempromosikan demokrasi. Walt menyatakan bahwa kekuatan militer tidak berhasil dalam mempromosikan demokrasi karena pemerintahan demokrasi tidak dapat berhasil hanya dengan konstitusi dan pemilu. Keberhasilan demokrasi membutuhkan sistem hukum yang efektif, komitmen luas untuk pluralisme, tingkat pendapatan dan pendidikan yang layak, dan kepercayaan bahwa kelompok-kelompok politik yang kalah memiliki peluang di masa depan sehingga masih tetap dapat bekerja dalam sistem. Bahkan negara-negara Barat saja membutuhkan waktu berabad-abad untuk dapat menciptakan demokrasi yang efektif sehingga intervensi militer yang bertujuan dapat mengekspor demokrasi dengan cepat dan murah tidak dapat berhasil.⁶³

⁶² Claire Cain Miller dan Kevin Quealy, "Democracy in America: How Is It Doing?," *New York Times*, 23 Februari 2017, <https://www.nytimes.com/2017/02/23/upshot/democracy-in-america-how-is-it-doing.html> (diakses pada 1 September 2018).

⁶³ Stephen M. Walt, "Why Is America So Bad At Promoting Democracy In Other Countries," *Foreign Policy*, 25 April 2016, <https://foreignpolicy.com/2016/04/25/why-is-america-so-bad-at-promoting-democracy-in-other-countries/> (diakses pada 1 September 2018).

Kedua, menggunakan paksaan untuk menyebarkan demokrasi hampir selalu memicu perlawanan kekerasan karena negara yang menjadi target transisi demokrasi memiliki nasionalisme. Selain itu, kelompok-kelompok yang kehilangan kekuasaan, kekayaan, atau statusnya selama transisi demokrasi juga akan melakukan perlawanan dan negara-negara tetangga yang kepentingannya dirugikan oleh transisi demokrasi dapat mencoba untuk menghentikannya. Walt menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang cepat, murah, atau dapat diandalkan bagi AS untuk merekayasa transisi demokrasi terutama ketika negara yang menjadi target tidak memiliki pengalaman tentang demokrasi dan mengalami perpecahan sosial.⁶⁴

4.2 Kondisi Politik dan Ekonomi Venezuela

4.2.1 Gejolak Politik Venezuela

Venezuela sejak tahun 2013 mengalami gejolak politik di bawah kekuasaan Presiden Nicolas Maduro dari *United Socialist Party of Venezuela* (PSUV). Setelah kematian Presiden populis Hugo Chavez, Maduro menggantikan Chavez dengan memenangkan pemilu presiden 2013 dan memiliki masa jabatan enam tahun pada tahun 2013. Presiden Maduro bukan merupakan presiden populis, berbeda dengan Chavez yang sangat populer dan dicintai oleh banyak masyarakat Venezuela. Selama masa pemerintahannya, Maduro telah membatasi kebebasan berekspresi, menggunakan kekerasan untuk mengatasi protes,

⁶⁴ Ibid.

memenjarakan banyak tokoh oposisi, membentuk lembaga konstitusi untuk mengubah konstitusi Venezuela, serta mengambil kekuasaan badan legislatif.

Selama masa pemerintahan Maduro terjadi protes yang berkelanjutan. Dari bulan Maret hingga Juli 2017, kelompok oposisi dan masyarakat anti pemerintah melakukan protes yang menyerukan agar Presiden Maduro membebaskan tahanan politik, menghormati Majelis Nasional, dan menjadwalkan pemilihan umum presiden. Maduro mengerahkan pasukan keamanan untuk menghadapi aksi-aksi protes tersebut. Lebih dari 130 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan terhadap pemrotes. Selain itu di masa pemerintahannya, Maduro mengatur pembentukan Majelis Konstitusi Nasional Venezuela untuk menulis ulang konstitusi yang sangat kontroversial.⁶⁵ Pembentukan Majelis Konstitusi Venezuela tersebut mendapatkan respon internasional yang negatif, salah satunya adalah AS yang memberikan sanksi kepada Venezuela.

4.2.2 Krisis Ekonomi Venezuela

Selama beberapa dekade, Venezuela adalah salah satu negara paling kaya di kawasan Amerika Selatan. Venezuela memiliki sumber daya minyak bumi yang melimpah dan ekonominya sangat bergantung terhadap minyak bumi. Minyak menyumbang lebih dari 90% ekspor Venezuela, dan hasil penjualan minyak digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah. Pada masa Presiden Chavez hasil penjualan minyak bumi digunakan untuk program sosial dan subsidi

⁶⁵ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 8.

untuk pangan dan energi. Selain itu, Chavez menggunakan minyak untuk memperluas pengaruh luar negeri melalui *Petrocaribe*, yang merupakan sebuah program yang memungkinkan negara-negara Karibia untuk membeli minyak dengan harga di bawah harga pasar.⁶⁶

Ketika Nicolas Maduro menjadi presiden, perekonomian Venezuela tidak berubah. Venezuela masih tetap bergantung pada pendapatan dari ekspor minyak. Pemerintah tidak berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi serta tidak melakukan diversifikasi ekonomi sehingga tetap bergantung pada minyak. Selain itu pemerintahan Chavez mewariskan utang yang cukup besar kepada pemerintahan Maduro. Ketergantungan Venezuela pada hasil minyak dan ketidaktepatan pemerintah dalam mengatur perekonomian pada akhirnya berdampak buruk bagi Venezuela. Perekonomian Venezuela tidak siap ketika menghadapi penurunan harga minyak yang tajam pada tahun 2014.⁶⁷

Penurunan harga minyak tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan dan menekan keuangan publik. Menghadapi hal tersebut pemerintah Venezuela justru mencoba mengatasi defisit anggaran dengan mencetak lebih banyak uang yang pada akhirnya menyebabkan hyperinflasi. Inflasi di Venezuela pada tahun 2012 adalah sekitar 20%, inflasi terus meningkat dan diproyeksikan melebihi 1.100% pada akhir tahun 2017. Tingkat pengangguran di Venezuela pada tahun

⁶⁶ Ibid., 15-16.

⁶⁷ Nelson, *Venezuela's Economic Crisis: Issues for Congress*, 3.

2017 sekitar 26%, angka tersebut lebih tinggi tiga kali lipat dari tingkat pengangguran di tahun 2012.⁶⁸

Hingga saat ini pemerintah Maduro telah berkomitmen untuk membayar utang warisan dari pemerintahan sebelumnya meskipun dengan kondisi keuangan yang sulit. Tindakan tersebut dilakukan karena pemerintah Venezuela khawatir akan resiko tuntutan hukum dari pihak kreditor. Konsekuensi dari tuntutan hukum dapat mengakibatkan penyitaan aset luar negeri Venezuela, seperti CITGO, anak perusahaan dari perusahaan minyak negara Venezuela, *Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA)*. Serta dapat mengganggu aktivitas pengiriman minyak dan pembayaran tunai untuk ekspor minyak. Agar dapat membayar utangnya yang besar, pemerintah memperketat pembatasan akses ke mata uang asing, memberlakukan kontrol harga, dan memotong impor. Impor barang-barang Venezuela turun dari \$ 62,9 milyar pada tahun 2013 menjadi \$ 21,4 milyar pada tahun 2016. Venezuela sangat bergantung pada impor untuk sebagian besar barang-barang konsumsi, dan pemotongan untuk impor menyebabkan kelangkaan bahan pangan dan obat-obatan yang parah sehingga menciptakan krisis kemanusiaan.⁶⁹

Kondisi keuangan Venezuela semakin ketat, berdasarkan data dari Bank Sentral Venezuela, pada tahun 2017 Venezuela hanya memiliki cadangan devisa sebesar 10,5 milyar US Dolar.⁷⁰ Dengan cadangan devisa yang semakin berkurang, Venezuela membutuhkan pinjaman dana untuk dapat melangsungkan aktivitas

⁶⁸ Ibid.

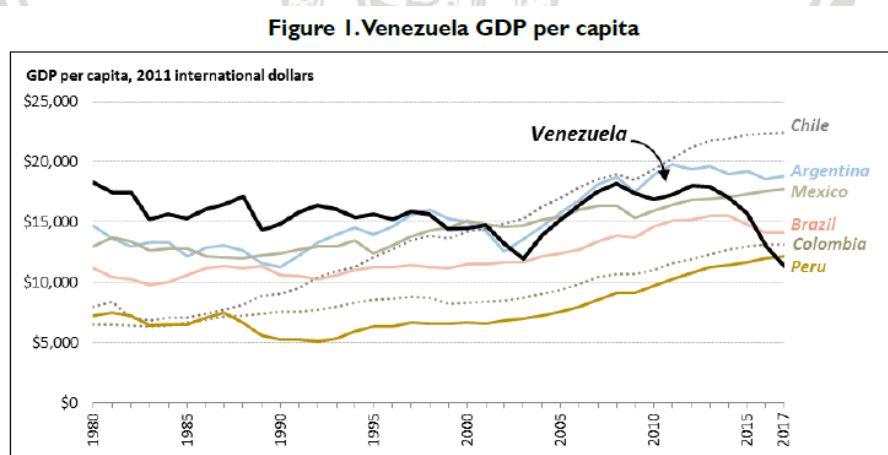
⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Romo dan Brocchetto, "Venezuela's Maduro Calls for Constitutional Changes Amid Unrest,".

ekonomi sekaligus membayar utangnya. Diperkirakan bahwa Venezuela berutang sekitar 64 miliar US Dollar kepada pemegang obligasi, 20 miliar US Dollar kepada China dan Rusia, 5 miliar US Dollar kepada pemberi pinjaman multilateral, dan puluhan miliar kepada importir dan perusahaan jasa di industri minyak.⁷¹ Selain itu untuk mengatasi kondisi keuangan tersebut, pada Mei 2017, Bank sentral Venezuela mengumpulkan dana melalui penjualan obligasi perusahaan minyak milik negara Venezuela yaitu Petroleos de Venezuela, SA (PdVSA) dengan diskon yang besar.⁷²

Dengan kondisi ekonomi yang telah dijelaskan tersebut, saat ini Venezuela tidak lagi menjadi negara kaya di kawasan Amerika Latin. Kondisi ekonomi memburuk dengan cepat di bawah Presiden Maduro, hal ini dapat dilihat dari GDP Venezuela yang terus menurun. Berikut ini merupakan grafik GDP per kapita Venezuela.⁷³

Gambar 2. GDP Per Kapita Venezuela



Source: IMF, *World Economic Outlook Database*, October 2017.

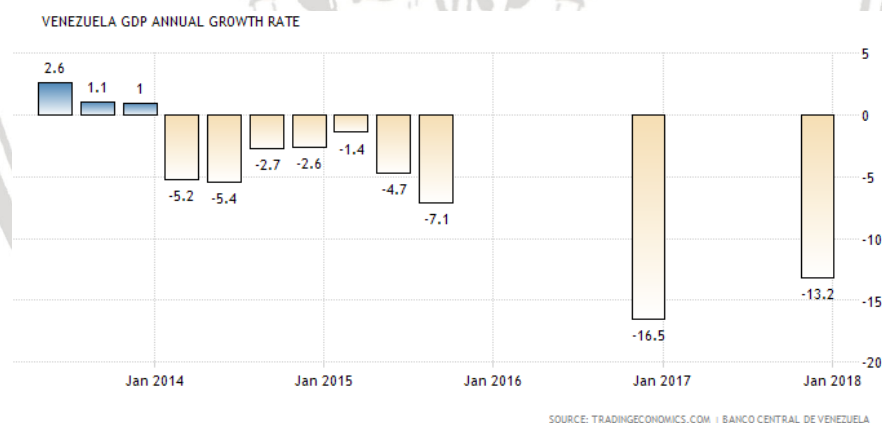
⁷¹ Nelson, *Venezuela's Economic Crisis: Issues for Congress*, 5.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., 2.

GDP Venezuela di tahun 2017, menurun 35% dari GDP pada tahun 2013 dan GDP perkapita Venezuela tahun 2017 menurun 40% dibandingkan tahun 2013. Pada akhir Juli 2017, 1 dolar AS setara dengan 10.389 Bolivar padahal sebelum terjadinya krisis, 1 dolar AS setara dengan 10 Bolivar. Tingkat inflasi di Venezuela pada akhir tahun 2017 mencapai 1600% sehingga harga barang berkali-kali lipat lebih mahal dan menyulitkan masyarakat Venezuela untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan pangan yang terjadi pun semakin parah. Tak jarang masyarakat Venezuela mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah karena pasokan bahan makanan yang langka dan apabila tersedia mereka pun tidak mampu membelinya.⁷⁴ Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Venezuela.

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Venezuela

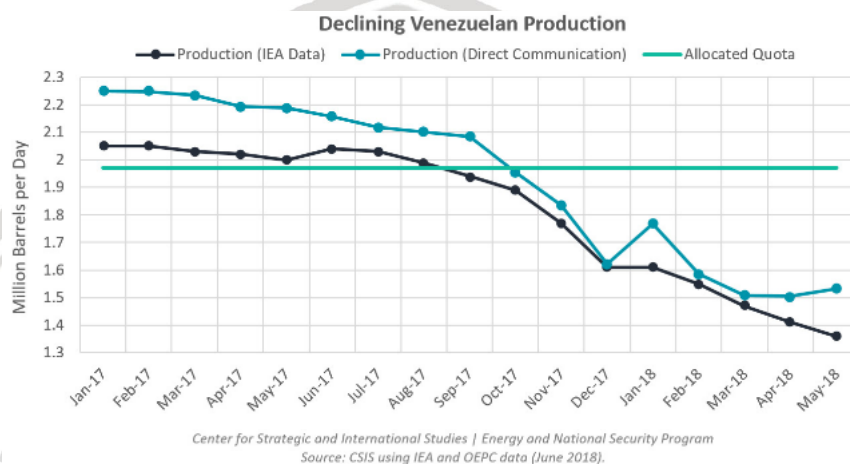


Produksi minyak Venezuela mengalami penurunan di sepanjang tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan data terakhir pada bulan Mei 2018, produksi minyak Venezuela berada pada titik yang rendah yaitu sebesar 1,36 juta barel per

⁷⁴ Will Martin, "35% GDP collapse: Venezuela's Unprecedented Economic Slide In Numbers," *Business Insider*, 3 Agustus 2017, <https://www.businessinsider.sg/statistics-about-venezuelas-economic-collapse-2017-8/?r=UK&IR=T> (diakses pada 5 September 2018).

hari. Sebagai negara yang bergantung pada minyak, penurunan produksi minyak tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan Venezuela. Berikut ini merupakan grafik produksi minyak Venezuela.⁷⁵

Gambar 4. Produksi Minyak Venezuela



Selain itu, tingkat pengangguran Venezuela terus meningkat sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran Venezuela berada pada 7,4%. Jumlah tersebut meningkat drastis di tahun 2016 menjadi 18,1% dan pada tahun 2017 mencapai 21,4%.⁷⁶ Rata-rata gaji yang diterima oleh tenaga kerja di Venezuela pada tahun 2018 adalah 248.510 Bolivar atau setara dengan 2.20 Dolar

⁷⁵ Andrew J. Stanley dan Frank A. Verrastro, "How Low Can Venezuelan Oil Production Go?," *CSIS*, 18 Juni 2018, <https://www.csis.org/analysis/how-low-can-venezuelan-oil-production-go> (diakses pada 5 September 2018).

⁷⁶ Anonim, "Venezuela GDP and Economic Data," *Global Finance*, 24 September 2018, <https://www.gfmag.com/global-data/country-data/venezuela-gdp-country-report> (diakses pada 5 September 2018).

AS. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup masyarakat Venezuela.⁷⁷

Meskipun sedang mengalami krisis ekonomi namun *human development index* Venezuela cukup baik. *Human development index* Venezuela lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Brazil, Peru, dan Kolombia. Venezuela berada pada angka 0,767 sedangkan Brazil berada pada angka 0,74, Peru 0,740, dan Kolombia 0,727. Berdasarkan data dari UNDP pada tahun 2016, Venezuela menempati urutan ke-71 dari 188 negara. Tetapi angka yang didapat Venezuela sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu ⁷⁸

4.3 Dinamika Hubungan AS dengan Venezuela

Secara historis AS dan Venezuela memiliki hubungan yang baik sebagai mitra dagang dalam komoditi minyak. Venezuela merupakan salah satu pemasok minyak utama bagi AS.⁷⁹ Selain itu, AS juga merupakan mitra dagang terbesar bagi Venezuela. Berdasarkan data terakhir, perdagangan bilateral barang antara kedua negara mencapai 16,1 miliar US Dollar pada tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 36% dibandingkan dengan nilai perdagangan pada tahun 2015. Ekspor barang-barang AS ke Venezuela mencapai 5,3 milyar US

⁷⁷ Sabrina Martin, "New Monthly Minimum Wage in Venezuela Barely Enough to Buy Daily Cup of Coffee," *Panama Post*, 4 Januari 2018, <https://panamapost.com/sabrina-martin/2018/01/04/new-monthly-minimum-wage-in-venezuela-barely-enough-to-buy-daily-cup-of-coffee/?cn-reloaded=1> (diakses pada 5 September 2018).

⁷⁸ Anonim, "Venezuela Maintains High Human Development: UN," *Telesur*, 25 Maret 2017, <https://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-Maintains-High-Human-Development-UN-20170325-0003.html> (diakses pada 5 September 2018).

⁷⁹ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 22.

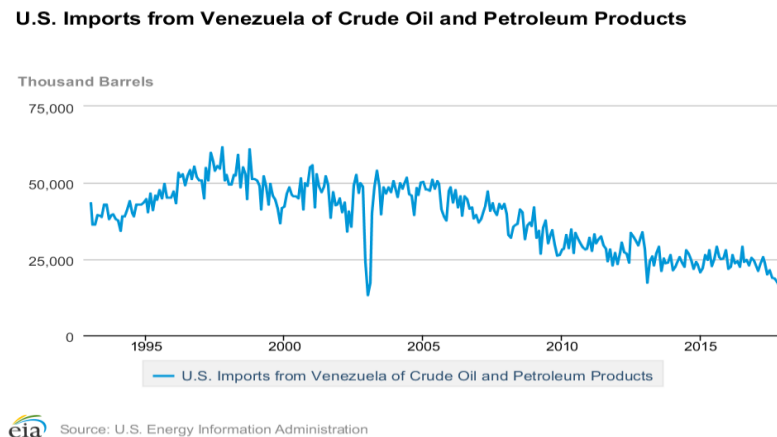
Dollar pada tahun 2016. Impor AS dari Venezuela berjumlah 10.9 milyar US Dollar yang mengalami penurunan 30% dari tahun 2015. Komoditas ekspor AS ke Venezuela meliputi minyak dan produk minyak, mesin, bahan kimia organik, produk pertanian, otomotif dan suku cadang mobil. Sedangkan ekspor Venezuela ke AS didominasi oleh minyak mentah. Venezuela termasuk salah satu negara pemasok minyak ke AS. Selain kegiatan perdagangan AS juga menanamkan investasi asing (FDI) di Venezuela sebesar 9,1 miliar US Dollar pada 2015. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 20,1% dari tahun 2014. Investasi asing AS di Venezuela berada di sektor manufaktur, perusahaan holding nonbank, keuangan, dan asuransi.⁸⁰

AS merupakan negara yang cukup banyak mengimpor minyak. Pada tahun 2017, AS mengimpor minyak sekitar 10,1 juta barel per hari dari 84 negara. Sekitar 79% dari impor minyak AS adalah minyak mentah. Dari 84 negara tersebut, Venezuela merupakan salah satu negara yang termasuk dalam 5 besar negara eksportir minyak mentah ke AS. Venezuela mengeksport minyak mentah ke AS sebesar 670.000 barel per hari.⁸¹ Berikut ini merupakan grafik impor minyak mentah AS dari Venezuela.

⁸⁰ U.S. Department of State, *U.S. Relations with Venezuela*, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35766.htm> (diakses pada 7 September 2018).

⁸¹ Office of The United States Trade Representative, *U.S. – Venezuela Trade Facts*, <https://ustr.gov/countries-regions/americas/venezuela> (diakses pada 7 September 2018).

Gambar 5. Impor Minyak AS dari Venezuela



Meskipun merupakan mitra dagang yang baik, AS dan Venezuela memiliki hubungan politik yang sering mengalami pergesekan. Pada tahun 2008, Obama dalam masa kampanye menyatakan akan menggunakan pendekatan diplomatik untuk menjaga hubungan AS dengan Venezuela. Pada Juni 2009, setelah Obama resmi menjadi Presiden, AS dan Venezuela mengumumkan bahwa telah menyetujui untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan ditempatkannya kembali duta besar di kedua negara tersebut. Pasca dibukanya kembali hubungan diplomatik tersebut, hubungan bilateral kedua negara tidak mengalami kemajuan. Pemerintah AS masih terus mengkritik kondisi politik di Venezuela dan sebaliknya Presiden Venezuela, Hugo Chavez, juga mengkritik pemerintah AS serta hubungan AS dengan negara-negara Amerika Latin.⁸² Chavez melihat AS sebagai pihak yang sering ikut campur dalam urusan politik domestik Venezuela. Chavez juga menuding AS sebagai pihak yang menjadi

⁸² Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 25.

dalang dibalik beberapa peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi di Venezuela.⁸³

Tidak lama setelah kembalinya duta besar di kedua negara tersebut, pada tahun 2010 pemerintah Venezuela mencabut kesepakatan untuk Duta Besar AS Larry Palmer yang akan ditempatkan di Venezuela. Pemerintah AS merespon hal tersebut dengan mencabut visa diplomatik Duta Besar Venezuela yang berada di AS. Meskipun terdapat pergesekan dalam hubungan politik kedua negara, AS dan Venezuela tetap bekerjasama pada bidang-bidang seperti pemberantasan narkoba dan upaya kontraterorisme. Upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara juga terus dilakukan. Pada November 2012, asisten Menteri Luar Negeri, Roberta Jacobson mengadakan dialog dengan Maduro yang pada saat itu menjadi wakil presiden membahas tentang peningkatan hubungan bilateral termasuk kerjasama yang lebih besar pada masalah pemberantasan narkoba.⁸⁴

Presiden Venezuela Hugo Chavez wafat pada 5 Maret 2013 akibat penyakit kanker. Venezuela kehilangan sosok pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya.⁸⁵ Sebagai tanggapan atas kematian Hugo Chavez, Presiden Obama menyampaikan bela sungkawa atas kematian Chavez dan menyampaikan bahwa AS akan selalu mendukung masyarakat Venezuela. Presiden Obama juga mengemukakan keinginannya dalam mengembangkan hubungan yang konstruktif

⁸³ Mary Crane, *U.S. – Venezuelan Relations*, 18 November 2005, <https://www.cfr.org/backgrounder/us-venezuelan-relations> (diakses pada 7 September 2018).

⁸⁴ Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 25-26.

⁸⁵ Catherine E. Shoichet dan Dana Ford, "Venezuelan President Hugo Chavez Dies," *CNN*, 6 Maret 2013, <https://edition.cnn.com/2013/03/05/world/americas/venezuela-chavez-main/index.html> (diakses pada 7 September 2018).

dengan pemerintah Venezuela. Selanjutnya Presiden Obama menyatakan bahwa Venezuela akan segera memulai babak baru dalam sejarahnya dan AS akan tetap berkomitmen pada kebijakannya untuk mempromosikan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁸⁶ Dengan wafatnya Hugo Chavez, AS mengharapkan terciptanya era baru dalam hubungannya dengan Venezuela.

Namun pergesekan politik antara AS dan Venezuela justru meningkat di masa pemerintahan Presiden Venezuela yang baru yaitu Nicolas Maduro. AS berupaya untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan Venezuela melalui dialog-dialog antar pejabat kedua negara. Akan tetapi upaya AS tersebut dipersulit dengan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Maduro. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Maduro adalah secara terbuka menawarkan suaka kepada Edward Snowden yang dituduh telah membocorkan rahasia Badan Keamanan Nasional AS (NSA). Hal tersebut memupuskan upaya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara. Tawaran yang diberikan oleh Maduro kepada Edward Snowden tersebut merupakan respon Maduro atas pernyataan Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power yang menentang tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh negara-negara seperti Kuba, Rusia, Iran dan Venezuela. Maduro bersedia untuk mendukung upaya AS dalam

⁸⁶ The White House, *Office of the Press Secretary. Statement of President Obama on the Death of Venezuelan President Hugo Chávez*, 5 Maret 2013, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/05/statement-president-obama-death-venezuelan-president-hugo-chavez> (diakses pada 8 September 2018).

mengembangkan hubungan apabila AS mengubah sikap imperialisnya terhadap Amerika Latin dan agresinya terhadap Venezuela.⁸⁷

Hubungan diplomatik antara AS dan Venezuela pada masa pemerintahan Maduro terus mengalami pergolakan. Hubungan diplomatik AS dan Venezuela diwarnai dengan aksi saling mengusir diplomat. Pada Maret 2013, Maduro telah mengusir dua atase militer AS dan AS menanggapi dengan mengusir dua diplomat Venezuela. Selanjutnya, pada akhir September 2013 pemerintah Venezuela mengusir tiga diplomat AS di Venezuela. Pengusiran diplomat tersebut dilakukan oleh pemerintah Venezuela karena para diplomat tersebut dituduh melakukan tindakan destabilisasi terhadap pemerintah Venezuela. Departemen Luar Negeri AS menolak tuduhan yang diberikan oleh Venezuela kepada para diplomatnya. Pengusiran diplomat tersebut, ditanggapi dengan hal serupa oleh AS. AS mengusir tiga diplomat Venezuela pada awal Oktober dari Kedutaan Besar Venezuela di Washington.⁸⁸

Venezuela merupakan negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi bahkan termasuk kedalam 5 besar negara dengan angka pembunuhan tertinggi di dunia. Tingginya angka kriminalitas tersebut memicu terjadinya sebuah aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Protes tersebut terjadi pada Februari 2014 di kota Tachira dan Merida. Dalam aksi protes tersebut mahasiswa menuntut pemerintah Venezuela agar dapat menjamin keamanan masyarakatnya. Mahasiswa juga memprotes terjadinya inflasi yang pada saat itu mencapai 52,6%

⁸⁷ Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 26.

⁸⁸ Ibid., 27.

serta memprotes tentang kelangkaan makanan pokok. Protes yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut berubah menjadi kekerasan dan mengakibatkan ditangkapnya beberapa mahasiswa. Penangkapan mahasiswa dalam protes tersebut selanjutnya memicu terjadinya demonstrasi di ibu kota Venezuela, Caracas, pada 12 Februari 2013 yang menuntut dibebaskannya mahasiswa yang ditangkap dalam protes di Tachira. Demonstrasi di Caracas tersebut juga berubah menjadi kekerasan dan mengakibatkan tewasnya 3 orang demonstran. Sejak terjadinya dua protes tersebut, semakin banyak terjadi protes di Venezuela baik berskala kecil maupun berskala besar. Tujuan awal dari adanya protes adalah menuntut pemerintah Venezuela untuk meningkatkan keamanan namun seiring dengan semakin banyaknya protes, tuntutan kepada pemerintah Venezuela juga semakin banyak yaitu membebaskan demonstran yang ditahan dan menuntut adanya perubahan kondisi ekonomi di Venezuela.⁸⁹

Demokrasi dan hak asasi manusia adalah isu yang selalu dipromosikan AS dalam kebijakannya sehingga penggunaan kekerasan oleh pemerintah Venezuela dalam menghadapi protes, sangat ditentang oleh AS. Tindakan pemerintah Venezuela tersebut dikritik oleh Presiden Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry. Presiden Obama menyerukan untuk dilakukannya dialog untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Sementara John Kerry menyerukan pada pemerintah Venezuela untuk tidak lagi menggunakan kekerasan dalam upayanya untuk menangani protes dan menghormati hak asasi manusia. Kerry

⁸⁹ Anonim, "What Lies Behind The Protests in Venezuela?," *BBC*, 27 Maret 2014, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-26335287> (diakses pada 8 September 2018).

menambahkan bahwa semua pihak termasuk para demonstran dan oposisi, harus menahan diri dari penggunaan kekerasan.⁹⁰

Setelah terjadinya beberapa protes di Venezuela, pada 17 Februari 2014 Venezuela kembali mengusir 3 diplomat AS dengan tuduhan mengorganisir dan mendanai protes yang dilakukan oleh mahasiswa. AS menyangkal tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. AS juga melakukan tindakan yang sama untuk membalas Venezuela yaitu dengan mengusir 3 diplomat Venezuela. Dalam menanggapi tuduhan pemerintah Venezuela, Obama menghimbau Venezuela agar tidak membuat tuduhan palsu terhadap diplomat AS dan menghimbau pemerintah Venezuela untuk fokus memenuhi tuntutan yang diajukan oleh masyarakat Venezuela.⁹¹

Setelah mengusir diplomat AS, pemerintah Venezuela mengumumkan pada 25 Februari 2014 akan mengusulkan untuk mengirim duta besar baru ke AS namun AS tidak mengambil tindakan atas usulan tersebut. Menanggapi usulan tersebut Kerry menyatakan bahwa AS telah terus-menerus menunjukkan kesediaan dan berupaya untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dengan Venezuela, tetapi Venezuela telah terus-menerus menggagalkan upaya tersebut dengan tindakan-tindakannya. Kerry menambahkan bahwa pemerintah Venezuela lebih baik berfokus pada urusannya dengan rakyat mereka sendiri.

⁹⁰ Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 28.

⁹¹ Ibid.

Pemerintah Venezuela perlu melakukan dialog dengan masyarakat Venezuela dan menyelesaikan masalah yang menjadi tuntutan masyarakat.⁹²

AS mendesak negara-negara Amerika Latin untuk membantu menyelesaikan situasi di Venezuela. Setelah bertemu dengan menteri luar negeri Kolombia pada 28 Februari 2014, Kerry menyatakan bahwa AS bekerjasama dengan Kolombia dan negara lain untuk mencoba menentukan jenis mediasi mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Venezuela. AS menekankan bahwa sudah waktunya bagi *Organization of American States* (OAS), mitra regional, dan organisasi internasional lainnya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendesak pemerintah Venezuela untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi protes masyarakat dan bergerak menuju dialog dengan pihak oposisi. AS menyatakan dukungan untuk diadakannya dialog antara pemerintah Venezuela dan pihak oposisi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh semua pihak, dan mendorong upaya UNASUR dalam proses mediasi yang melibatkan Vatikan.⁹³

Kedua Menteri Luar Negeri Kerry dan Asisten Menteri Luar Negeri Jacobson mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi kepada Venezuela jika upaya diplomatik tidak berhasil dalam mewujudkan dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi. Setelah mempertimbangkan kemungkinan tersebut, Kerry menyatakan bahwa pembuat kebijakan AS tidak pantas mengambil langkah-langkah untuk memberikan sanksi. Administrasi

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid., 29.

pemerintahan Obama akan mempertimbangkan pilihan lain yang dapat diambil ketika dialog gagal dilakukan. Asisten Menteri Luar Negeri, Jacobson, berpendapat bahwa akan ada saatnya sanksi mungkin menjadi instrumen yang sangat penting untuk diberikan apabila tidak ada pergerakan, tidak ada kemungkinan dialog untuk dilaksanakan, atau jika tidak ada ruang demokrasi untuk oposisi, tentu AS akan mempertimbangkan soal pemberian sanksi.⁹⁴

Jacobson menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri sedang mempertimbangkan pemberian sanksi kepada Venezuela, tetapi apabila pemberian sanksi dilakukan saat ini tidak akan menghasilkan apapun dan justru akan memungkinkan pemerintah Venezuela untuk kembali menggunakan kekerasan dalam mengatasi protes. Apabila tiba masanya sanksi harus diberikan maka sanksi akan menjadi faktor pemersatu dalam pemerintahan Venezuela dan akan berfungsi untuk memperkuat narasi tentang pemerintah Venezuela yang membela AS. Sebagai buntut dari uraian dialog yang disponsori UNASUR, Kerry menyatakan pada 21 Mei 2014, bahwa adanya kegagalan oleh pemerintah Venezuela untuk menunjukkan tindakan dengan itikad baik untuk menerapkan hal-hal yang mereka sepakati sekitar sebulan yang lalu. Kerry menambahkan bahwa dia berharap pemberian sanksi kepada Venezuela tidak akan perlu dilakukan.⁹⁵

Pada akhirnya dialog antara pemerintah Venezuela dan pihak oposisi yang dimediasi oleh UNASUR tidak membuahkan hasil. Dengan demikian AS pada 30

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

Juli 2014 memutuskan untuk mengenakan restriksi perjalanan ke AS kepada beberapa pejabat pemerintahan Venezuela yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Langkah tersebut menegaskan komitmen AS terhadap demokrasi dan hak asasi manusia serta memberi ganjaran kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pesan yang ingin disampaikan atas diambilnya langkah tersebut adalah bahwa individu yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia tidak akan diterima di AS. Pembatasan visa tersebut diterapkan pada sekitar 24 pejabat Venezuela, termasuk polisi, pejabat militer, dan pejabat pemerintah yang terlibat langsung baik itu memerintahkan penggunaan kekerasan terhadap protes maupun pihak yang mengeksekusi perintah tersebut.⁹⁶ Pada bulan Februari 2015, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan tambahan nama-nama pejabat pemerintah Venezuela yang terkena pembatasan visa yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan dianggap terlibat dalam tindakan korupsi publik. Dengan adanya tambahan nama-nama tersebut, AS tercatat telah melakukan pembatasan visa kepada 56 orang pejabat Venezuela.⁹⁷

Hubungan AS dan Venezuela semakin memburuk pasca penambahan nama-nama pejabat Venezuela yang terkena pembatasan visa pada Februari 2015. Pemerintah Venezuela kembali menuding bahwa AS mendukung dan terlibat dalam tindakan destabilisasi dan perencanaan kudeta. AS menyebut tuduhan Venezuela tersebut sebagai tuduhan palsu dan tidak berdasar. AS menyatakan

⁹⁶ Ibid., 30.

⁹⁷ Mark P. Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 2016, <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1022595.pdf> (diakses pada 8 September 2018).

bahwa tidak akan mendukung transisi politik dengan cara non-konstitusional. Ketegangan hubungan diplomatik antara AS dan Venezuela terus berlanjut. Pada 28 Februari 2015, Presiden Maduro mengumumkan sebuah kebijakan bahwa pemerintahannya akan membatasi jumlah diplomat AS yang bekerja di Venezuela. Kebijakan tersebut diberlakukan pada bulan Maret 2015 di mana Presiden Maduro meminta Kedutaan Besar AS untuk mengurangi jumlah staff yang bekerja di Kedutaan Besar AS. Jumlah staff yang awalnya 100 orang harus dikurangi menjadi hanya 17 orang. Hal tersebut dilakukan Presiden Maduro untuk menyesuaikan jumlah staff Kedutaan Besar Venezuela yang berada di Washington.⁹⁸

Pada bulan Maret 2015, Presiden Obama mengeluarkan *Executive Order* (EO) 13692 mengenai pembelaan hak asasi manusia dan masyarakat sipil di Venezuela. Perancangan EO tersebut telah dilakukan oleh pembuat kebijakan AS mulai bulan Desember 2014. EO tersebut berisi mengenai pemberian sanksi berupa pembatasan visa dan pemblokiran aset kepada pejabat Venezuela yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Ketika Presiden Obama mengeluarkan EO 13692, Presiden menyatakan bahwa dikeluarkannya EO tersebut merupakan kondisi darurat nasional untuk menangani kondisi di Venezuela yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.⁹⁹

⁹⁸ Ibid., 30.

⁹⁹ Ibid., 31.

Setelah dikeluarkannya EO 13692, Presiden Maduro mengecam AS atas tindakannya menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat Venezuela. Pengenaan sanksi tersebut berperan dalam menguatkan narasi yang selama ini dibangun oleh Maduro bahwa AS memang menindas Venezuela melalui agresi yang dilakukan AS dan Maduro memperingatkan Majelis Nasional Venezuela bahwa AS bersiap untuk menyerang Venezuela. AS menekankan bahwa sanksi tersebut tidak ditargetkan masyarakat atau perekonomian Venezuela. Sanksi yang diberikan AS tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela.¹⁰⁰

Menjelang pemilihan legislatif Venezuela yang akan dilaksanakan pada Desember 2015, pemerintah AS terus menerus berbicara tentang kondisi hak asasi manusia yang buruk di Venezuela serta pemerintah Venezuela yang berupaya untuk membungkam pihak oposisi. Lebih lanjut pemerintah AS menyatakan keprihatinannya atas kebijakan badan pemilu nasional Venezuela (CNE) dan badan pengawas keuangan Venezuela yang melarang beberapa tokoh oposisi untuk memegang jabatan. Pada bulan September 2015, Menteri Luar Negeri, John Kerry menentang keras tentang penahanan tokoh oposisi Venezuela Leopoldo Lopez dan menyerukan kepada Venezuela untuk membebaskannya. Kerry juga meminta pemerintah Venezuela untuk menghormati hak semua tahanan politik dan untuk menjamin pengadilan publik yang adil dan transparan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid., 31-32.

Pada November 2015, Departemen Luar Negeri mengutuk pembunuhan seorang anggota oposisi, menyerukan kepada pemerintah Venezuela untuk melindungi semua kandidat pemilihan legislatif, dan mengingatkan bahwa kampanye yang menyebarkan ancaman dan ketakutan, menggunakan kekerasan dan intimidasi bukan merupakan bagian dari demokrasi. Setelah selesainya pemilihan legislatif, Kerry mengucapkan selamat kepada rakyat Venezuela. Menurut Kerry, rakyat Venezuela telah menunjukkan keinginan yang besar untuk terjadinya perubahan di negara mereka.¹⁰²

Hingga pada tahun 2016, isu hak asasi manusia dan demokrasi masih menjadi perhatian utama pemerintah AS terhadap Venezuela. Pemerintah AS masih terus berbicara tentang situasi hak asasi manusia yang buruk dan kemunduran demokrasi di Venezuela. Pada awal Januari 2016, AS menyatakan keprihatinan tentang pemerintah Venezuela yang mencampuri tugas dan fungsi Majelis Nasional yang mayoritas kursinya ditempati oleh pihak oposisi. Pada bulan Februari 2016, AS kembali menyatakan keprihatinan atas tindakan Mahkamah Agung Venezuela yang mengambil alih beberapa wewenang yang seharusnya dimiliki oleh Majelis Nasional Venezuela.¹⁰³

AS menilai pemerintah Venezuela semakin berupaya membungkam pihak-pihak oposisi dan menciptakan iklim intimidasi serta penindasan dalam politik Venezuela. AS mencatat bahwa terdapat puluhan pemimpin maupun tokoh oposisi dari masyarakat Venezuela telah ditahan karena keyakinan politik mereka. AS

¹⁰² Ibid., 32.

¹⁰³ Ibid.

secara khusus menyebutkan tokoh-tokoh yang telah ditahan seperti Leopoldo Lopez dari partai *Popular Will*, walikota Caracas Antonio Ledezma, mantan walikota Daniel Ceballos, dan banyak mahasiswa yang ditahan karena terlibat dalam aksi protes. AS menyerukan kembali untuk diadakan dialog di antara badan-badan pemerintahan di Venezuela untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang sedang terjadi di Venezuela. Pada bulan Maret 2016, Presiden Obama menambah jangka waktu sanksi dinyatakan dalam EO 13692. Venezuela menanggapi hal tersebut dengan memanggil diplomatnya di AS untuk kembali ke Venezuela.¹⁰⁴

Pada bulan April 2016, AS menyerukan kembali pembebasan tahanan politik yang dipenjarakan karena keyakinan politik mereka. Menurut *Inter-American Commission on Human Rights* keadaan penahanan tokoh politik merupakan hal yang menyedihkan terjadi di Venezuela. Kerry menyatakan dalam sebuah wawancara pers bahwa AS siap untuk terlibat dalam dialog dengan pemerintah Venezuela serta siap untuk membantu Venezuela membangkitkan kembali kondisi perekonomiannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, AS menyatakan bahwa otoritas eksekutif Venezuela harus terlebih dulu siap untuk menghormati rakyat dan menghormati supremasi hukum.¹⁰⁵

Pada Mei 2016, pejabat intelijen AS dilaporkan melakukan pertemuan dengan beberapa wartawan AS untuk menjelaskan situasi yang terjadi di

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ U.S. Department of State, *Secretary Kerry Interview with Andrés Oppenheimer of CNN Español*, April 17, 2016, <http://www.humanrights.gov/dyn/04/-secretary-kerry-interview-with-andres-oppenheimer-of-cnn-espanol/>.

Venezuela. Pertemuan tersebut menjelaskan bahwa krisis sedang berlangsung di Venezuela. Venezuela sedang menghadapi kelangkaan bahan-bahan pokok, memiliki utang luar negeri yang tinggi, memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, dan terdapat kekerasan politik. Dalam pertemuan tersebut, pejabat intelijen AS memperkirakan bahwa Presiden Maduro tidak mungkin menyelesaikan masa jabatannya karena tidak mampu mengatasi krisis tersebut. Menurut pejabat intelijen AS skenario yang mungkin terjadi adalah digulingkannya Maduro dari jabatan presiden melalui *recall referendum*, melalui beberapa anggota pemerintahannya dengan bantuan dari militer, atau melalui kudeta militer. Selanjutnya pejabat intelijen AS tersebut menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh AS tidak dapat menyelesaikan krisis yang ada di Venezuela. Upaya dari negara-negara kawasan akan lebih mampu membantu krisis yang dihadapi oleh Venezuela.¹⁰⁶

Majelis Nasional Venezuela yang mayoritas diisi oleh kelompok oposisi terus berupaya untuk menggulingkan Maduro. Pada 9 Juni 2016 beberapa orang anggota parlemen Venezuela mendatangi Dewan Pemilihan Venezuela untuk meminta diadakannya *recall referendum* terhadap Nicolas Maduro. Namun kelompok pendukung pemerintah menyerang mereka ketika mereka saat mencoba memasuki kantor Dewan Pemilihan.¹⁰⁷ Menanggapi kekerasan yang dilakukan terhadap anggota oposisi Majelis Nasional Venezuela tersebut, AS mengutuk tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mengintimidasi warga negara yang

¹⁰⁶ Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 2016, 33.

¹⁰⁷ Girish Gupta, "Venezuela Opposition Attacked As They Seek Progress On Maduro Recall," *Reuters*, 9 Juni 2016, <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN0YV1VO> (diakses pada 8 September 2018).

hendak melaksanakan hak demokratis mereka. AS juga menyerukan agar pasukan keamanan pemerintah Venezuela menjaga ketertiban secara konsisten dengan hukum internasional dan komitmen internasional mengenai hak asasi manusia.¹⁰⁸

Dalam pertemuan Majelis Umum OAS di Republik Dominika pada tanggal 14 Juni 2016, John Kerry mendukung gagasan Sekretaris Jendral OAS untuk berdiskusi dengan Dewan Tetap OAS mengenai situasi di Venezuela. Kerry menambahkan bahwa AS siap untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut untuk membantu memfasilitasi dialog nasional yang akan membahas dimensi politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan dari krisis Venezuela. Kerry juga menegaskan bahwa AS bersama dengan Sekretaris Jenderal OAS serta komunitas internasional lainnya dalam menyerukan kepada pemerintah Venezuela untuk melepaskan tahanan politik, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan berkumpul, untuk mengatasi kelangkaan makanan dan obat-obatan, dan untuk menghormati mekanisme konstitusional negaranya sendiri. Menghormati konstitusi dengan melakukan *recall referendum* yang merupakan bagian dari proses konstitusional Venezuela.¹⁰⁹

Selama konferensi pers di pertemuan OAS tersebut, Kerry menyatakan bahwa AS pada tidak ingin menanggukkan Venezuela dari OAS, tindakan tersebut tidak akan memperbaiki kondisi Venezuela. Menurut Kerry, upaya untuk berdialog dengan Venezuela lebih dapat memperbaiki kondisi Venezuela daripada melakukan tindakan isolasi terhadap Venezuela. Dalam OAS sendiri untuk

¹⁰⁸ Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 2016, 33.

¹⁰⁹ Ibid.

menangguhkan keanggotaan suatu negara, dibutuhkan dua pertiga suara mayoritas. Nampaknya sulit mendapatkan dua pertiga suara untuk menangguhkan Venezuela dari keanggotaan OAS mengingat banyaknya negara-negara Karibia yang dahulu dibantu oleh program PetroCaribe milik Venezuela.¹¹⁰

John Kerry juga bertemu Menteri Luar Negeri Venezuela Delcy Rodriguez, di sela-sela pertemuan Majelis Umum OAS. Kerry menyatakan dukungan untuk diadakannya dialog antara pemerintah Venezuela dan kelompok oposisi yang akan difasilitasi oleh mantan pemimpin Spanyol, Republik Dominika, dan Panama. Kerry juga menggarisbawahi pentingnya menegakkan proses demokrasi dan konstitusional. Kedua pejabat tersebut mendiskusikan tentang tantangan yang dihadapi Venezuela dan setuju untuk melanjutkan diskusi untuk membangun hubungan bilateral yang lebih baik. Setelah pertemuan tersebut AS dan Venezuela kembali melakukan diskusi untuk memperbaiki hubungan bilateral di mana salah satu pejabat Departemen Luar Negeri AS berkunjung ke Venezuela pada 21 hingga 23 Juni 2016 dan bertemu dengan banyak pejabat Venezuela termasuk Presiden Maduro. Meski begitu upaya tersebut tidak berdampak pada meningkatnya hubungan bilateral kedua negara.¹¹¹

Pada bulan September 2016, Badan Pemilu Nasional Venezuela (CNE) mengeluarkan *timeline* untuk *recall referendum* presiden. *Timeline* tersebut menunjukkan bahwa proses *recall referendum* tersebut kemungkinan tidak akan bisa dilaksanakan sampai tahun 2017. AS mengeluarkan pernyataan prihatin atas

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid., 33-34.

keputusan CNE serta berlanjutnya pembatasan media dan tindakan lain untuk melemahkan otoritas Majelis Nasional, mencabut kesempatan warga Venezuela untuk membentuk jalan negara mereka. CNE tidak menjelaskan alasan dari ditundanya proses *recall referendum*. Selain itu AS mengkhawatirkan adanya bias terhadap administrasi pemerintahan Maduro dalam pelaksanaan *recall referendum* nantinya. Kami menyerukan kepada badan eksekutif Venezuela untuk terlibat dalam dialog serius dengan oposisi dan Venezuela dari seluruh spektrum politik serta mendengarkan semua suara Venezuela dan bekerja sama untuk mencari solusi.¹¹²

Pada masa pemerintah Presiden Trump, AS lebih menggunakan pendekatan multilateral untuk menyelesaikan krisis di Venezuela. AS terus mengeluarkan pernyataan tentang isu-isu yang menjadi perhatiannya dan menggunakan sanksi sebagai instrumen untuk mengatasi kondisi Venezuela. Pada tanggal 29 Maret 2017 Mahkamah Agung Venezuela merampas kekuasaan yang dimiliki badan legislatif yaitu Majelis Nasional Venezuela. Kekuasaan yang dimiliki oleh badan legislatif akan dialihkan kepada Mahkamah Agung. Pengalihan kekuasaan ini membuat tiga lembaga pemerintah akan berada di bawah kontrol partai asal Maduro yaitu (PSUV). Keputusan tersebut memunculkan protes besar-besaran dari kelompok anti pemerintah.¹¹³

¹¹² U.S. Department of State, *Announcement of Venezuelan Recall Referendum Timeline*, 22 September 2016, <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/09/262317.htm> (diakses pada 9 September 2018).

¹¹³ Rafael Romo, "Venezuela's High Court Dissolves National Assembly," *CNN*, 30 Maret 2017, <https://edition.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/index.html> (diakses pada 9 September 2018).

AS mengutuk keputusan Mahkamah Agung Venezuela untuk merebut kekuasaan Majelis Nasional yang dipilih secara demokratis. Hilangnya norma-norma demokratis dan konstitusional ini sangat merusak lembaga-lembaga demokratis Venezuela dan merampas hak rakyat Venezuela untuk membentuk masa depan negara mereka melalui wakil-wakil mereka yang pilih. AS menganggapnya sebagai kemunduran serius bagi demokrasi di Venezuela. Menanggapi isu tersebut, Trump pada pertemuan Dewan Tetap OAS menyerukan kepada Venezuela untuk menghormati lembaga-lembaga demokrasinya. AS menyerukan agar pemerintah Venezuela mengizinkan Majelis Nasional yang dipilih secara demokratis oleh rakyat untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya, menyelenggarakan pemilihan sesegera mungkin, dan segera membebaskan semua tahanan politik.¹¹⁴

Aksi protes masih tetap berlangsung secara berkelanjutan di Venezuela. Kelompok anti pemerintah terus menuntut untuk diadakannya *recall referendum*. Pada 10 April 2017, pemerintah Venezuela memenjarakan Henrique Capriles dari kelompok oposisi yang merupakan kandidat presiden yang menjadi lawan Maduro pada pemilu presiden tahun 2013. AS meminta Venezuela untuk berhenti membungkam pihak oposisi.¹¹⁵ Lalu pada 8 Juli 2017, pemerintah Venezuela memindahkan Leopoldo Lopez menjadi tahanan rumah setelah mendekam dipenjara selama 3 tahun. Leopoldo Lopez adalah salah satu tokoh oposisi yang

¹¹⁴ U.S. Department of State, *Venezuelan Supreme Court Decision Greatly Undermines Democratic Institutions*, 30 Maret 2017, <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269332.htm> (diakses pada 9 September 2018).

¹¹⁵ U.S. Department of State, *Venezuela: Maduro Government Must Stop Silencing Opposition Voices*, 10 April 2017, <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/269690.htm> <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/269690.htm> (diakses pada 9 September 2018).

ditahan oleh pemerintah Venezuela. AS menyambut keputusan pemerintah Venezuela tersebut dengan baik dan menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah ke arah yang tepat.¹¹⁶

Di tahun 2017, Presiden Maduro mengutarakan rencananya untuk mengubah konstitusi Venezuela dan membentuk sebuah lembaga yang dapat mengemban wewenang tersebut yaitu Majelis Konstitusi Nasional. Rencana tersebut tidak disambut baik oleh kelompok oposisi dan AS. Kelompok oposisi mengadakan *voting* untuk melihat pendapat masyarakat terkait rencana Maduro tersebut. Sekitar 7 juta masyarakat Venezuela tidak setuju terhadap rencana Maduro untuk mengubah konstitusi dan membentuk lembaga yang berwenang dalam mengubah konstitusi. *Voting* tersebut diwarnai dengan aksi kekerasan oleh aparat keamanan Venezuela. Namun hasil *voting* tersebut dinyatakan tidak sah oleh pemerintahan Maduro.¹¹⁷

Menanggapi peristiwa tersebut, Trump memberikan peringatan kepada Maduro agar tidak melaksanakan rencananya. Apabila Maduro tetap bersikeras melaksanakan rencananya, AS akan mengambil tindakan pemberian sanksi tambahan yang lebih berat kepada Venezuela.¹¹⁸ Namun Maduro seolah tidak menganggap peringatan dari Trump tersebut dan tetap melaksanakan rencananya. Pada tanggal 30 Juli Venezuela mengadakan pemilu untuk memilih anggota

¹¹⁶ U.S. Department of State, *Transfer of Leopoldo Lopez to House Arrest in Venezuela*, 8 Juli 2017, <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272436.htm> (diakses pada 9 September 2018).

¹¹⁷ Anonim, "Venezuela Referendum: Big Show of Support of Opposition," *BBC*, 2017, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40624313> (diakses pada 9 September 2018).

¹¹⁸ The White House, *Statement From President Donald J. Trump*.

Majelis Konstitusi Nasional Venezuela.¹¹⁹ Sesuai dengan peringatan yang disampaikan oleh Presiden Trump maka atas terbentuknya Majelis Konstitusi Nasional pemerintah AS memberikan sanksi tambahan yang lebih berat kepada Venezuela. Melalui EO 13808 yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada 24 Agustus 2017, sanksi tambahan resmi diberikan kepada Venezuela. Sanksi tersebut memutus akses pemerintah Venezuela terhadap sistem keuangan AS dan melarang warga negara AS untuk memberikan pinjaman pada pemerintah Venezuela maupun PdVSA. Sanksi tersebut membidik aliran dana pinjaman pemerintah Venezuela yang sangat membutuhkan pinjaman.¹²⁰

AS sendiri telah lama melakukan intervensi terhadap politik domestik negara-negara Amerika Latin. Intervensi AS sudah dimulai sejak abad 19. Pada tahun 1898 hingga 1994 AS telah berhasil merubah pemerintahan beberapa negara Amerika Latin. Intervensi tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi secara langsung yang dilakukan oleh AS adalah dengan menggunakan kekuatan militer sedangkan intervensi tidak langsung lebih sulit untuk diidentifikasi. Salah satu contoh negara yang pernah digulingkan rezimnya oleh AS adalah Guatemala pada tahun 1963 dimana AS ada dibalik pasukan militer Guatemala untuk menggulingkan Presiden terpilih Guatemala yaitu Miguel Ydigoras.¹²¹

¹¹⁹ Joe Starling et al., "Deadly Election Day In Venezuela As Protesters Clash With Troops," *CNN*, 31 Juli 2017, <https://edition.cnn.com/2017/07/03/americas/venezuela-on-endge-vote/index.html> (diakses pada 12 September 2018).

¹²⁰ The White House, *Executive Order 13808*.

¹²¹ John H. Coatsworth, *United States Interventions*, 2005, <https://revista.drclas.harvard.edu/book/united-states-interventions> (diakses pada 13 September 2018).

Intervensi AS dalam menggulingkan pemerintahan negara Amerika Latin pada abad 19 cukup sering dilakukan oleh AS hingga saat ini AS masih melakukannya namun frekuensinya telah berkurang drastis pasca Perang Dingin. Motif AS dalam menggulingkan pemerintahan negara Amerika Latin menjadi perdebatan di antara sejarawan dan ilmuwan sosial. Dalam hampir semua kasus penggulingan pemerintahan, AS menyatakan bahwa kepentingan keamanan nasional AS menjadi motif utama. Namun kenyataannya pada abad 20, AS tidak pernah menghadapi ancaman militer yang signifikan dari Amerika Latin.¹²²

AS berusaha untuk melakukan pergantian rezim di Venezuela melalui sanksi sebagai instrumennya. Selain sanksi AS juga menjadi pihak yang mendukung aksi protes yang dilakukan oleh kelompok oposisi terhadap pemerintahan Venezuela. Maduro sempat menuduh AS sebagai dalang dibalik protes terhadap pemerintah Venezuela. Namun tuduhan tersebut ditampik oleh AS. Tuduhan yang diberikan oleh Maduro bukan merupakan tuduhan tak berdasar, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa AS memang merupakan dalang dibalik protes tersebut. Pada tahun 2015, pemerintah AS memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 4,26 juta *US Dollar* kepada Venezuela melalui USAID. Sekitar 2 juta *US Dollar* dari bantuan tersebut disalurkan melalui *National Endowment for Democracy* yang merupakan lembaga yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi. Dari dana tersebut, sebesar 849.223 *US Dollar* dialokasikan untuk kewarganegaraan atau tujuan pemilihan termasuk pembuatan *platform online* yang menghubungkan warga negara dengan kandidat Majelis

¹²² Ibid.

Nasional. Dana sebesar 160.813 *US Dollar* digunakan untuk mempromosikan reformasi pasar bebas. Dana tersebut juga digunakan untuk membiayai program radio sebagai saluran alternatif untuk menghasilkan dan menyebarkan berita dan informasi agar jurnalis independen lokal dan media alternatif membela kebebasan berekspresi dan demokrasi di Venezuela.¹²³

Menurut ahli ekonomi, Mark Weisbrot, strategi AS memberikan sanksi kepada Venezuela adalah untuk lebih menghancurkan ekonomi ke titik di mana masyarakat Venezuela akan bangkit dan menggulingkan pemerintah, atau mungkin untuk memprovokasi kudeta militer. Dalam beberapa minggu di bulan Agustus 2017, protes di Venezuela telah mereda. Sebagian besar pemimpin oposisi telah setuju untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di Venezuela. Hal ini merupakan perkembangan positif untuk penyelesaian konflik secara damai. Sehingga pemberian sanksi AS dinilai sebagai upaya untuk memperburuk krisis ekonomi dan berharap dapat membawa masyarakat Venezuela kembali ke jalanan untuk melakukan protes dan menjauhkan dari negosiasi yang akan diperlukan untuk menyelesaikan konflik.¹²⁴

Menurut Tony Cartalucci, pihak oposisi Venezuela tidak berpihak kepada demokrasi namun berpihak kepada AS. Cartalucci menilai bahwa upaya oposisi dan AS untuk menggulingkan Maduro memiliki tujuan lain yang disembunyikan di balik kedok demokrasi. Tujuan sebenarnya semata-mata adalah untuk membentuk pemerintahan Venezuela yang pro terhadap AS. Tokoh-tokoh

¹²³ Telesur, "US Pumped \$4.2M in 2015 to Destabilize Venezuelan Government,".

¹²⁴ Mark Weisbrot, *Trump's Tough New Sanctions Will Harm The People Of Venezuela*.

pemimpin oposisi Venezuela telah terlibat dalam upaya pergantian rezim Hugo Chavez pada tahun 2002 yang disinyalir dirancang oleh AS untuk menciptakan pemerintahan Venezuela yang lebih berpihak kepada AS. Tidak hanya terlibat dalam upaya pergantian rezim pada tahun 2002, tokoh-tokoh oposisi Venezuela seperti Leopoldo Lopez, Julio Borges, dan Henrique Capriles telah lama menerima bantuan politik dan finansial dari pemerintah AS. Selain itu, AS berusaha untuk membentuk opini masyarakat internasional bahwa krisis yang terjadi di Venezuela merupakan akibat dari sosialisme dan kediktatoran sedangkan liberalisme dan demokrasi adalah solusi yang tepat dari krisis tersebut. Namun menurut Cartalucci, krisis di Venezuela bukan merupakan perang antara sosialisme dan kapitalisme tetapi merupakan perang antara hegemoni AS dan kedaulatan nasional Venezuela.¹²⁵

Menurut David William Pear, rencana AS dalam menggulingkan pemerintahan Maduro dilakukan dengan menggunakan strategi yang membuat *image* Maduro menjadi buruk seolah-olah Maduro adalah pihak yang jahat dan membuat AS sebagai pihak yang baik. AS menggunakan media sebagai alat untuk propaganda terhadap situasi politik dan ekonomi di Venezuela. Sehingga publik akan melihat bahwa upaya penggulingan Maduro merupakan tindakan mulia AS dalam promosi demokrasi dan hak asasi manusia. Sedangkan motif AS sesungguhnya tetap tersembunyi dibalik kedok tersebut. Motif AS dalam

¹²⁵ Tony Cartalucci, *US Regime Change in Venezuela: The Truth Is Easy if You Follow the Money Trail. The Opposition is Pro-Washington, Not "Pro-Democracy"*, 15 Oktober 2017, <https://www.globalresearch.ca/us-regime-change-in-venezuela-the-truth-is-easy-if-you-follow-the-money-trail-the-opposition-is-pro-washington-not-pro-democracy/5601933> (diakses pada 25 September 2018).

melakukan upaya pergantian rezim di Venezuela adalah untuk merekrut pemimpin Venezuela yang lebih patuh kepada AS.¹²⁶

Selanjutnya Pear memaparkan bahwa AS memiliki kepentingan ekonomi dibalik upaya pergantian rezim Maduro. Venezuela merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dengan pergantian rezim AS menginginkan Venezuela untuk menganut neoliberalisme sehingga perusahaan-perusahaan raksasa dari AS dapat masuk ke Venezuela dan mengeksploitasi minyaknya.¹²⁷ AS merupakan negara produsen minyak terbesar sekaligus konsumen minyak terbesar di dunia. AS memproduksi 14,46 juta barel per hari dan mengonsumsi 19,53 juta barel per hari.¹²⁸ Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa konsumsi AS lebih besar dibandingkan produksinya terhadap minyak sehingga dengan adanya pemerintah Venezuela yang patuh terhadap AS, pemenuhan kebutuhan minyak dan eksploitasi minyak akan lebih mudah.

Selain itu eksekutif pemerintah AS yang berada disekeliling Trump juga berpengaruh terhadap munculnya kebijakan AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela. Salah satunya adalah Sekretaris Negara Rex Tillerson. Mengingat latar belakang Tillerson yang berasal dari Exxon Mobil maka dapat diprediksi bahwa AS akan mengambil tindakan agresif terhadap Venezuela. Exxon Mobil sendiri pernah terlibat sengketa dengan pemerintah Venezuela. Pada tahun 2007,

¹²⁶ David William Pear, *Venezuela Regime Change Project Revealed*, 4 Agustus 2017, <https://www.globalresearch.ca/venezuela-regime-change-project-revealed/5602599> (diakses pada 14 September 2018).

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ U.S. Energy Information Administration, *What Countries Are The Top Producers And Consumers Of Oil?*, 2017, <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6> (diakses pada 14 September 2018).

Venezuela dibawah pemerintahan Hugo Chavez mencoba untuk membeli saham semua perusahaan minyak yang ada di perbatasan negaranya namun Exxon Mobil dan ConocoPhillips menolak kesepakatan yang ditawarkan pemerintah Venezuela. Setelah upaya pemerintah Venezuela untuk bernegosiasi dengan Exxon Mobil gagal, Chavez merebut fasilitas Exxon Mobil di Venezuela. Exxon Mobil akhirnya mengalihkan sahamnya ke anak perusahaannya yang berbasis di Belanda agar dapat mengajukan gugatan ke ICSID terhadap pemerintah Venezuela berdasarkan perjanjian investasi bilateral antara Belanda dan Venezuela.¹²⁹

Exxon Mobil menuntut kompensasi terhadap pemerintah Venezuela sebesar 15 milyar USD. Pada Oktober 2014, gugatan tersebut dimenangkan oleh Venezuela dimana Venezuela hanya membayar kompensasi sebesar 1,6 milyar USD. Pasca peristiwa tersebut, Exxon Mobil melakukan konfrontasi terhadap Venezuela melalui kerjasama dengan Guyana. Venezuela dan Guyana telah lama berselisih mengklaim sebuah wilayah di perbatasan kedua negara tersebut yang memiliki cadangan minyak yang disebut *Essequibo* dan selama perselisihan antara kedua negara tidak ada satupun perusahaan minyak yang mengeksploitasi daerah tersebut. Pada tahun 2015, Exxon Mobil mengumumkan akan bekerjasama dengan Presiden Guyana yang baru terpilih untuk mengeksploitasi minyak di *Essequibo*. Hal tersebut langsung membuat Maduro memberikan respon. Maduro menyatakan bahwa Exxon Mobil berupaya untuk melakukan destabilisasi di

¹²⁹ Timothy M. Gill. "U.S.-Venezuela Relations Will Probably Deteriorate Under Trump. Ask ExxonMobil Why," *Washington Post*, 29 Desember 2016, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/29/u-s-venezuela-relations-will-likely-deteriorate-under-trump-ask-exxonmobil-why/?noredirect=on&utm_term=.cd53357a9a34 (diakses pada 14 September 2018).

kawasan Amerika Latin dan Venezuela mengerahkan pasukan militer untuk berpatroli di kawasan tersebut.¹³⁰

OAS Charter pasal 19 secara jelas melarang negara-negara anggotanya untuk melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap urusan negara anggota lainnya. Selain itu, pasal 20 *OAS Charter* mencatat bahwa tidak ada negara anggota OAS yang dapat menggunakan atau mendorong tindakan koersif baik secara ekonomi maupun politik untuk memaksakan kehendak terhadap negara anggota lainnya dan memperoleh keuntungan dalam bentuk apapun.¹³¹ Berdasarkan pasal 19 dan 20 dari *OAS Charter* dapat disimpulkan bahwa AS sebagai negara anggota OAS telah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. AS telah melakukan intervensi kepada Venezuela untuk mengulingkan Maduro. Intervensi yang dilakukan oleh AS adalah pendanaan terhadap kelompok-kelompok oposisi Venezuela dan pemberian sanksi terhadap Venezuela.

4.4 Sanksi AS kepada Venezuela Tahun 2015

Sanksi merupakan instrumen yang sering digunakan oleh AS untuk menunjukkan penentangan terhadap kebijakan negara lain yang telah melanggar undang-undang AS atau norma-norma hak asasi manusia internasional. Sanksi ditargetkan kepada pihak-pihak terkait yang telah melakukan pelanggaran dan

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Anonim, "Tillerson Threatens Regime Change in Venezuela," *Telesur*, 2 Agustus 2017, <https://www.telesurtv.net/english/news/Tillerson-Threatens-Regime-Change-in-Venezuela-20170801-0030.html> (diakses pada 14 September 2018).

diklaim tidak akan merugikan penduduk dari negara yang diberi sanksi. Pada bulan Juli 2014, Presiden Obama telah memberlakukan pembatasan visa kepada beberapa pejabat Venezuela yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Pemberian sanksi terhadap pejabat Venezuela diharapkan dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah Maduro untuk turun dari jabatannya atau setidaknya berhenti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.¹³² Namun pada kenyataannya sanksi tersebut tidak menghasilkan dampak seperti yang diharapkan oleh AS.

Pada Maret 2015, Presiden Obama secara resmi mengeluarkan EO 13692 yang berisi pembatasan visa dan pemblokiran aset dari pejabat Venezuela. Pejabat Venezuela yang dikenakan sanksi di antaranya disebabkan karena terlibat dalam tindakan atau kebijakan yang melemahkan proses atau institusi demokrasi, tindakan pelanggaran hak asasi manusia yaitu melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam protes antipemerintah di Venezuela pada Februari 2014, tindakan yang melarang, membatasi, atau menghukum pelaksanaan kebebasan berekspresi atau berkumpul secara damai, serta pejabat senior di pemerintahan Venezuela yang terlibat dalam korupsi publik. Berdasarkan EO 13692 sanksi pembatasan visa dan pemblokiran aset diberlakukan kepada pemimpin entitas atau kelompok yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di Venezuela, baik yang saat ini memimpin maupun tokoh-tokoh yang pernah menjadi pemimpin di entitas tersebut serta kepada

¹³² Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 23.

pejabat pemerintah Venezuela saat ini maupun mantan pejabat pemerintah Venezuela.¹³³

Berdasarkan pada EO 13692, hingga saat ini sanksi tersebut telah dijatuhkan kepada 51 orang pejabat Venezuela. Pada bulan Maret 2015, Departemen Keuangan AS membekukan aset 6 anggota pasukan keamanan Venezuela dan seorang jaksa yang terlibat dalam penindasan demonstran anti pemerintah. Di bawah pemerintahan Presiden Trump, Departemen Keuangan AS menambahkan lagi 44 pejabat Venezuela untuk dikenakan sanksi, kebijakan tersebut tentunya dilakukan berdasarkan EO 13692. Dari 44 orang pejabat tersebut, termasuk anggota Mahkamah Agung, anggota CNE, anggota Kabinet, dan pasukan keamanan nasional Venezuela. Pada 31 Juli 2017, akhirnya AS menjatuhkan sanksi kepada Presiden Maduro sehingga Maduro termasuk sebagai salah satu dari empat kepala negara yang dikenai sanksi oleh AS.¹³⁴

4.5 Sanksi AS kepada Venezuela Tahun 2017

Pada masa pemerintah Presiden Trump, sanksi tambahan yang lebih berat diberikan pada Venezuela melalui EO 13808 yang ditandatangani pada 24 Agustus 2017. Sanksi ini diberikan karena pemerintah Maduro membentuk Majelis Konstitusi Venezuela yang merampas kekuasaan Majelis Nasional Venezuela dan lembaga pemerintah Venezuela lainnya serta kondisi demokrasi, hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Venezuela. Sanksi

¹³³ The White House, *Executive Order 13692*.

¹³⁴ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 24.

tersebut diberlakukan secara efektif pada tanggal 25 Agustus 2017 dan sasarannya adalah akses pemerintah Venezuela ke pasar keuangan AS.¹³⁵ AS menyatakan bahwa tindakan pemberian sanksi telah dipertimbangkan untuk dapat menghambat sumber pendanaan bagi pemerintah Maduro yang diktator untuk mempertahankan rezimnya. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk melindungi sistem keuangan AS agar tidak terlibat dalam korupsi yang dilakukan pejabat Venezuela dan dalam pemiskinan rakyat Venezuela serta memungkinkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela.¹³⁶

Sanksi ini bertujuan untuk memotong aliran dana dari investor AS atau aliran dana yang melalui sistem keuangan AS ke pemerintah Maduro. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, berdasarkan EO 13808 pemerintah AS membatasi transaksi oleh investor AS atau transaksi dalam sistem keuangan AS terkait dengan *debt issues* baru yang diterbitkan oleh pemerintah Venezuela dan PdVSA. Warga AS juga dilarang membeli sekuritas dari pemerintah Venezuela.¹³⁷ Dengan adanya sanksi ini, anak perusahaan PdVSA di AS yaitu CITGO masih tetap dapat beroperasi di AS. Namun CITGO dilarang untuk mendistribusikan keuntungannya kepada pemerintah Venezuela.¹³⁸

Bersamaan dengan dirilisnya EO 13808 pada bulan Agustus, Departemen Keuangan AS mengeluarkan lisensi terhadap beberapa transaksi untuk

¹³⁵ The White House, *Executive Order 13808*.

¹³⁶ The White House, *Statement by the Press Secretary on New Financial Sanctions on Venezuela*, 25 Agustus 2017, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-new-financial-sanctions-venezuela/> (diakses pada 15 September 2018).

¹³⁷ The White House, *Executive Order 13808*.

¹³⁸ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 25.

meminimalkan dampak sanksi terhadap kepentingan ekonomi AS dan orang-orang Venezuela. Lisensi tersebut memungkinkan jendela 30-hari untuk mengurangi kontrak yang terkena sanksi, para investor AS dapat melanjutkan perdagangan kepemilikan obligasi Venezuela dan PdVSA yang ada di pasar sekunder, transaksi yang melibatkan *debt issues* baru yang diterbitkan oleh CITGO, dan pendanaan barang-barang kemanusiaan tertentu, termasuk komoditas pertanian, obat-obatan, dan peralatan medis. Selain itu, dalam EO 13808 memperbolehkan transaksi utang jangka pendek baru yaitu utang yang berjangka waktu kurang dari 30 hari untuk pemerintah Venezuela dan kurang dari 90 hari untuk PdVSA. Pengecualian tersebut untuk memastikan pendanaan jangka pendek yang memfasilitasi perdagangan AS dengan Venezuela, termasuk impor minyak AS dari Venezuela dapat tetap berlangsung.¹³⁹

Meskipun pemerintah AS mengklaim bahwa sanksi tersebut telah dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak akan merugikan masyarakat Venezuela namun ahli ekonomi memiliki pendapat berbeda. Menurut ahli ekonomi Mark Weisbrot, menyatakan bahwa selama 15 tahun terakhir AS telah lama mengincar perubahan rezim di Venezuela dan dengan adanya krisis di Venezuela AS merasa memiliki peluang yang besar dan semakin dekat dengan tujuannya untuk mengubah rezim Venezuela.¹⁴⁰ Weisbrot menyebut sanksi yang diberikan oleh AS juga ilegal berdasarkan hukum AS dan internasional. AS melanggar *OAS Charter* dan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh AS. Untuk mematuhi undang-undang AS, presiden juga harus berbohong dan

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Andrew Buncombe, "CIA chief hints agency is working to change Venezuelan government,".

mengatakan bahwa AS mengalami keadaan darurat nasional karena situasi di Venezuela yang mengancam AS.¹⁴¹

Lebih lanjut Weisbrot memaparkan bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah AS akan memperdalam depresi berat yang telah dialami oleh ekonomi Venezuela selama lebih dari tiga setengah tahun yang telah mengurangi pendapatan per orang lebih dari sepertiga. Sanksi tersebut akan memperburuk kelangkaan makanan dan obat-obatan penting. Sanksi tersebut juga akan memperparah krisis neraca pembayaran dan akan berdampak pada meningkatnya inflasi serta depresiasi mata uang Venezuela yang telah tinggi sejak 2012. Weisbrot menambahkan bahwa sanksi AS akan lebih jauh mempolarisasi negara yang sudah terpecah-belah antara pendukung pemerintah Maduro dan pemimpin oposisi yang mendukung sanksi karena hubungan lama mereka dengan AS.¹⁴²

Selain itu, jika Venezuela ingin melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi utangnya selama krisis akan sulit dilakukan karena pemerintah Venezuela dan PdVSA tidak akan dapat menerbitkan obligasi baru. Pada dasarnya, perintah eksekutif Trump akan memotong sebagian besar sumber pembiayaan potensial, selain dari Rusia atau China. Hal ini akan menyebabkan impor, yang telah menurun lebih dari 75% selama lima tahun terakhir untuk turun lebih jauh. Selanjutnya akan berdampak pada kekurangan dan kemerosotan ekonomi lebih

¹⁴¹ Weisbrot, *Trump's Tough New Sanctions Will Harm The People Of Venezuela*.

¹⁴² Ibid.

lanjut, karena sebagian besar produksi dalam negeri Venezuela bergantung pada impor.¹⁴³

Venezuela tidak hanya mendapatkan dana pinjaman dari investor AS, Venezuela juga mendapatkan pinjaman dari Rusia dan China. Rusia pemasok utama bantuan militer kepada Venezuela berupa bantuan keuangan dan teknis. Jumlah bantuan militer tersebut mencapai 11 milyar USD. Selain itu, perusahaan energi milik negara Rusia, Rosneft, juga memberikan pinjaman kepada Venezuela sejak tahun 2006 dengan total pinjaman diperkirakan mencapai 17 milyar USD. China juga merupakan pemberi pinjaman yang cukup besar kepada Venezuela. Venezuela memiliki utang sebesar 23 milyar USD kepada China.¹⁴⁴ Pada tahun 2017, Rusia juga bersedia untuk merestrukturisasi utang Venezuela sebesar 3,15 milyar USD.¹⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa AS dan Venezuela memiliki hubungan ekonomi yang cukup baik satu sama lain. AS merupakan pembeli minyak terbesar dari Venezuela sedangkan Venezuela mengimpor banyak barang dari AS. Namun AS dan Venezuela tidak memiliki hubungan politik yang baik. AS selalu mengintervensi urusan politik domestik Venezuela dan pemerintahan Maduro dianggap diktator dan melanggar hak asasi manusia. AS menggunakan sanksi yang membatasi aliran dana terhadap Venezuela sebagai upaya menggulingkan

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Joseph M. Humire, *Iran, Russia, and China's Central Role in the Venezuela Crisis*, 14 Februari 2018, <https://www.gatestoneinstitute.org/11888/venezuela-iran-russia-china> (diakses pada 15 September 2018).

¹⁴⁵ Anonim, "Russia and Venezuela Agree Debt Deal," *BBC*, 15 November 2017, <https://www.bbc.com/news/business-42006249> (diakses pada 15 September 2018).

pemerintah Maduro. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan Venezuela yang baru dan berpihak kepada AS. Sanksi yang diberikan AS diklaim telah dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan rakyat Venezuela namun kenyataannya berbeda. Meskipun AS telah menutup akses Venezuela terhadap sistem keuangan AS namun terdapat Rusia dan China yang berperan besar dalam peminjaman dana kepada Venezuela.



BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA VENEZUELA PADA TAHUN 2017

Pada bab ini penulis akan memaparkan secara rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi AS dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017 menurut Model Adaptif milik Rosenau. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Faktor pertama yaitu *external change* yang meliputi *great power structure*, aliansi, dan *situational factor*. Faktor kedua yaitu *structural change* yang meliputi geografis, size, budaya dan sejarah, pembangunan ekonomi, teknologi, opini publik, struktur sosial, akuntabilitas politik, dan struktur pemerintahan. Faktor ketiga yaitu *leadership* yang melihat faktor idiosinkratik dari seorang pemimpin.

5.1 *External Change*

5.1.1 *Great Power Structure*

Perubahan dalam pola hubungan antar negara di dalam sistem internasional berpengaruh dalam mendorong suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri. *Power* berpengaruh pada orientasi kebijakan luar negeri suatu negara. Apabila suatu negara merupakan negara *great power* maka orientasi kebijakan luar negerinya akan berbeda dengan negara yang bukan *great power*.

AS masih merupakan negara *great power* dalam sistem internasional. Dalam menghadapi situasi di Venezuela, AS mengajak negara-negara yang tergabung dalam OAS untuk ikut berpartisipasi dalam menghadapi situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela. AS secara aktif terlibat dalam mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan Venezuela. AS juga merupakan pihak yang memberikan gagasan kepada OAS untuk dilakukannya dialog antara pemerintah Venezuela dan pihak oposisi.¹⁴⁶

AS termasuk negara yang paling aktif dalam memberikan respon terhadap kebijakan Presiden Maduro. AS kerap kali menghimbau kepada pemerintah Venezuela untuk berhenti melakukan tindakan yang merusak demokrasi dan hak asasi manusia. AS juga responsif dalam menanggapi tindakan pemerintah Venezuela yang memenjarakan tokoh oposisi dan meminta Venezuela untuk membebaskan mereka.¹⁴⁷ Dalam tindakan pemberian sanksi, AS juga merupakan negara yang menginisiasi pemberian sanksi kepada Venezuela dan banyak negara lain yang mengikuti langkah AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela.

Selain AS terdapat negara lain yang juga mulai memasukkan Amerika Latin dalam kebijakan luar negerinya. Negara tersebut adalah Rusia. Menurut salah satu ahli studi Amerika Latin dari *Russian Academy of Sciences*, Dmitry Rozental, Rusia memiliki ketertarikan terhadap Amerika Latin karena alasan politik dan ekonomi. Rusia menganggap negara-negara Amerika Latin dapat mendukung posisinya dan membantu geopolitiknya dengan AS dan negara-negara

¹⁴⁶ Sulliva, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 29.

¹⁴⁷ Ibid.

Barat lainnya. Rozental lebih lanjut menyatakan bahwa setelah adanya kunjungan pemimpin-pemimpin negara Amerika Latin ke Rusia, semakin membuka peluang bagi Rusia di Amerika Latin.¹⁴⁸

Rusia mulai mendekati negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Brazil, Argentina, dan Kuba. Perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft, memulai eksplorasi minyak di kawasan Amazon setelah membeli saham pengendali di sumur pengeboran di Cekungan Solimoes. Perusahaan gas alam Rusia, Gazprom, telah mendesak pemerintah Argentina untuk melakukan kerjasama dalam produksi gas alam. Rosneft juga telah menjadi *supplier* minyak bagi Kuba, serta menjadi pembeli utama minyak bumi Venezuela. Pada acara *Russian Energy Week*, banyak pemimpin negara Amerika Latin yang menghadiri acara tersebut. Dalam acara tersebut dibahas mengenai masa depan energi dunia dan peran Rusia di dalamnya. Menurut Viktor Kheifets, Rusia sedang berbicara tentang perlunya membangun dunia multipolar dan Rusia berupaya untuk mendesentralisasikan kekuatan global. Negara-negara Amerika Latin menyetujui ide tentang dunia yang multipolar, namun Kheifets tidak yakin apakah Rusia dan Amerika Latin memiliki visi yang sama tentang dunia multipolar.¹⁴⁹

Venezuela telah bergantung pada Rusia sejak krisis ekonominya akibat jatuhnya harga minyak pada tahun 2014. Menurut Rozental, saat ini Venezuela membutuhkan bantuan-bantuan negara lain yaitu bantuan dari Rusia dan China.

¹⁴⁸ Julia Chapman, "Russia Looks To Write A New Chapter With Latin America," *Deutsche Welle*, 5 Oktober 2017, <https://www.dw.com/en/russia-looks-to-write-a-new-chapter-with-latin-america/a-40820763> (diakses pada September 2018).

¹⁴⁹ Ibid.

Tetapi saat ini China berusaha untuk menjadi lebih moderat dalam membantu Venezuela. Kondisi perekonomian Venezuela yang krisis membuat negara lain enggan untuk berinvestasi karena risikonya terlalu besar. Hal tersebut membuat Rusia sebagai salah satu dari dua negara yang dapat memberikan dukungan keuangan kepada rezim Nicolas Maduro. Bantuan yang diberikan oleh Rusia sebagian besar berasal dari Rosneft. Rosneft telah meminjamkan dana dengan total 5,1 milyar Euro kepada PdVSA. Sebagai gantinya Venezuela akan membayar pinjaman tersebut dengan uang dan minyak.¹⁵⁰

Rusia muncul sebagai kekuatan yang menantang AS dan negara-negara Eropa serta China. Dalam kawasan Amerika Latin, munculnya Rusia yang mulai memainkan pengaruh di kawasan tersebut khususnya di bidang energi. Rezim Maduro mempunyai ketergantungan yang besar terhadap pinjaman dana untuk melangsungkan aktivitas negaranya dan Rusia adalah negara yang memiliki andil besar dalam meminjamkan dana kepada Venezuela. Rusia sendiri tidak memperdulikan rezim Maduro yang dianggap sebagai rezim diktator.¹⁵¹ Meskipun terdapat pengaruh Rusia dalam kawasan Amerika Latin, hal ini tak lantas menjadi perubahan yang memicu AS untuk memberikan sanksi pada Venezuela. Dapat disimpulkan bahwa indikator *great power structure* bukan merupakan indikator yang berpengaruh terhadap munculnya kebijakan AS memberikan sanksi kepada Venezuela tahun 2017

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Julia Gurganus, *Venezuela: A New U.S.-Russia Battleground*, 22 Mei 2018, <https://carnegieendowment.org/2018/05/22/venezuela-new-u.s.-russia-battleground-pub-76424> (diakses pada 16 September 2018).

5.1.2 Aliansi

AS merupakan negara yang sangat responsif dalam menanggapi situasi politik di Venezuela. AS seringkali merespon peristiwa maupun kebijakan pemerintahan Maduro. AS selalu mengecam kebijakan pemerintahan Maduro yang dianggap melanggar demokrasi dan hak asasi manusia. AS menyatakan bahwa negaranya tidak sendirian dalam mengecam pemerintahan Maduro.¹⁵² Selain AS, beberapa negara di kawasan Amerika Latin juga turut mengecam pemerintahan Maduro. Argentina, Brazil, Kanada, Chile, Kolombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, dan Peru mengadakan pertemuan di Lima, Peru pada 8 Agustus 2017. Pertemuan tersebut mendiskusikan situasi di Venezuela dan menandatangani *Lima Declaration* yang mengecam runtuhnya demokrasi di Venezuela. Dua belas negara tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung Majelis Nasional Venezuela serta tidak akan mengakui Majelis Konstitusi Nasional Venezuela sebagai lembaga yang legal.¹⁵³ Sedangkan negara-negara seperti Kuba, Bolivia, Ekuador, dan Nikaragua mendukung Venezuela.¹⁵⁴

Setelah AS memberikan sanksi kepada Venezuela di bulan Agustus 2017, beberapa negara aliansi AS seperti Uni Eropa dan Kanada turut melakukan

¹⁵² The White House, *Statement by the Press Secretary on New Financial Sanctions on Venezuela*, 25 Agustus 2017, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-new-financial-sanctions-venezuela/> (diakses pada 16 September).

¹⁵³ Orlando Avendano, "Twelve Foreign Ministers Meet in Lima to Reject Maduro's Illegal Constituent Assembly in Venezuela," *Panam Post*, 8 Agustus 2017, <https://panamapost.com/orlando-avendano/2017/08/08/twelve-foreign-ministers-meet-in-lima-to-reject-maduros-illegal-constituent-assembly-in-venezuela/> (diakses pada 16 September 2018).

¹⁵⁴ John Paul Rathbone, *Venezuela's Neighbours Try To Put Financial Pressure On Maduro*, 9 Agustus 2017, <https://www.ft.com/content/bc4bfba8-7c48-11e7-9108-edda0bcbc928> (diakses pada 16 September 2018).

tindakan serupa terhadap Venezuela. Pada 13 November, *The Foreign Affairs Council* dari Uni Eropa menyetujui sanksi ekonomi terhadap Venezuela termasuk memberlakukan embargo senjata. Uni Eropa mengatakan bahwa embargo ekonomi tersebut berupa larangan perjalanan perorangan ke Uni Eropa dan pembekuan aset Venezuela yang akan dilakukan secara bertahap dan fleksibel.¹⁵⁵ Sedangkan Kanada memberikan sanksi yang terkait dengan Venezuela berdasarkan *Special Economic Measures Act* untuk melaksanakan keputusan asosiasi yang dibentuk antara Kanada dan AS pada tanggal 5 September 2017. Asosiasi tersebut meminta agar anggotanya mengambil langkah-langkah ekonomi terhadap Venezuela dan orang yang bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di Venezuela. Sanksi yang diterapkan oleh Kanada berupa pembekuan aset dan larangan transaksi kepada beberapa pejabat Venezuela.¹⁵⁶

Perubahan arah kebijakan dalam aliansi yang diikuti oleh suatu negara dapat mempengaruhi negara untuk mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan aliansinya. Dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017, AS tidak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dalam aliansinya. Hal ini dikarenakan negara-negara aliansi AS baru memberikan sanksi kepada Venezuela setelah AS memberikan sanksi pada tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AS merupakan pihak yang membawa pengaruh terhadap negara-negara

¹⁵⁵ Robin Emmott, "EU Readies Sanctions On Venezuela, Approves Arms Embargo," *Reuters*, 13 November 2017, <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-eu/eu-readies-sanctions-on-venezuela-approves-arms-embargo-idUSKBN1DD0UN?il=0> (diakses pada 16 September 2018).

¹⁵⁶ Global Affairs Canada, *Canadian Sanctions Related to Venezuela*, 2018, <http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela.aspx?lang=eng> (diakses 16 pada September 2018).

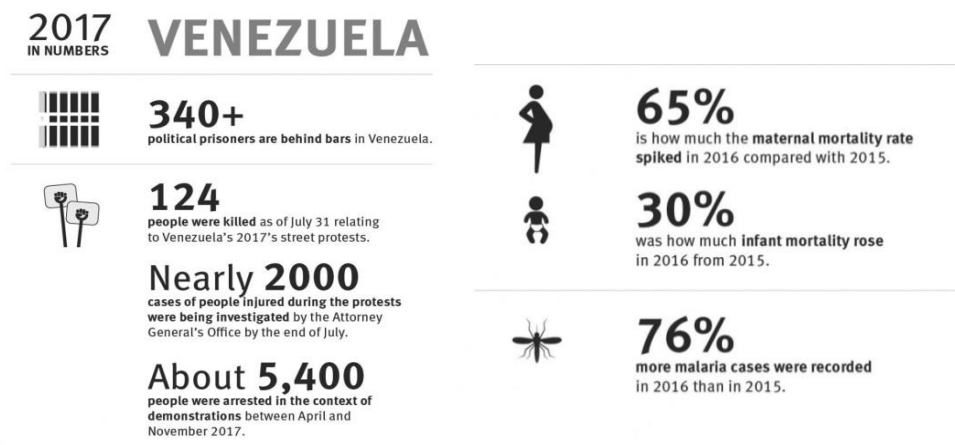
aliansi AS untuk menyikapi situasi di Venezuela dan memberikan sanksi kepada Venezuela.

5.1.3 *Situational Factor*

Berdasarkan model adaptif yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, *situational factor* adalah kondisi yang terjadi di lingkungan eksternal yang mempengaruhi negara untuk melakukan tindakan adaptasi dengan membuat suatu kebijakan. Kondisi eksternal tersebut dapat berupa sebuah isu atau krisis. *Situational factor* yang mempengaruhi AS untuk memberikan sanksi tambahan kepada Venezuela pada tahun 2017 adalah kondisi demokrasi yang semakin memburuk. AS selama lebih dari satu dekade telah ikut campur terhadap kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela. Terlebih lagi menurut AS, demokrasi semakin buruk dan pelanggaran hak asasi manusia semakin banyak dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela. AS menganggap Maduro merampas kebebasan rakyat Venezuela untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Kondisi demokrasi dan kemanusiaan di Venezuela dapat dilihat pada gambar berikut.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Human Rights Watch, *Venezuela Events 2017*, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/venezuela> (diakses pada 17 September 2018).

Gambar 6. Kondisi Politik dan Kemanusiaan Venezuela 2017



Sumber: Human Rights Watch

Meskipun kondisi demokrasi dan kemanusiaan Venezuela yang dianggap buruk telah menjadi perhatian AS cukup lama, namun hal tersebut tidak lantas mempengaruhi AS untuk memberikan sanksi tambahan kepada Venezuela di tahun 2017. Terdapat peristiwa pembentukan Majelis Konstitusi Nasional oleh Maduro dan keinginan Maduro untuk mengubah konstitusilah yang menjadi pendorong bagi AS untuk pada akhirnya memberikan sanksi kepada Venezuela. Terlebih lagi tindakan Maduro yang tidak menggubris peringatan yang diberikan oleh Trump ketika Maduro pertama kali mengumumkan rencananya.

Pada hari buruh internasional tanggal 1 Mei 2017, Presiden Maduro menyampaikan kepada pendukungnya tentang rencananya untuk membentuk konstitusi baru. Maduro berencana membentuk Majelis Konstitusi Nasional yang akan beranggotakan 500 orang dan nantinya akan merepresentasikan kelas pekerja. Badan tersebut juga akan memiliki kekuasaan untuk membentuk ulang Majelis Nasional dan mendefinisikan ulang kekuasaan presiden. Pihak oposisi mengecam

rencana tersebut dan mengajak masyarakat untuk turun ke jalan dan melakukan protes besar-besaran. Ketua Majelis Nasional, Julio Borges berpendapat bahwa rencana tersebut sama saja dengan membunuh konstitusi dan demokrasi di Venezuela. Borges mengkhawatirkan apabila rencana tersebut terlaksana maka Venezuela tidak akan lagi dapat melakukan pemilihan umum secara langsung dan bebas.¹⁵⁸

Kelompok oposisi pada 16 Juli 2017 mengadakan *voting* untuk melihat bagaimana pendapat masyarakat mengenai rencana pembentukan majelis konstitusi dan pembentukan konstitusi baru Venezuela. Masyarakat Venezuela yang datang ke tempat *voting* tersebut diatanyai tiga pertanyaan dengan jawaban “ya” atau “tidak”. Tiga pertanyaan yang diberikan adalah sebagai berikut.¹⁵⁹

1. Apakah Anda menolak dan mengabaikan realisasi Majelis Konstitusi yang diusulkan oleh Nicolas Maduro tanpa persetujuan sebelumnya dari rakyat Venezuela?
2. Apakah Anda menuntut agar Angkatan Bersenjata Nasional dan semua pejabat publik mematuhi dan membela Konstitusi 1999 dan mendukung keputusan Majelis Nasional?
3. Apakah Anda menyetujui pembaruan kekuasaan publik sesuai dengan ketentuan Konstitusi, dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan

¹⁵⁸ Willy Haryono, “Presiden Venezuela Serukan Konstitusi Baru di Tengah Gelombang Demonstrasi,” *Metro TV*, 2 Mei 2017, <http://internasional.metrotvnews.com/amerika/8KyG9gOb-presiden-venezuela-serukan-konstitusi-baru-di-tengah-gelombang-demonstrasi> (diakses pada 17 September 2018).

¹⁵⁹ Elizabeth Melimopoulos, “Venezuela: People vote in Unofficial Referendum,” *Al Jazeera*, 17 Juli 2017, <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/venezuela-people-voting-today-170716021009272.html> (diakses pada 17 September 2018).

transparan, serta pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk memulihkan tatanan konstitusional?

Hasil *voting* tersebut menunjukkan sebanyak lebih dari 7 juta masyarakat Venezuela menyatakan tidak setuju atas rencana Maduro untuk membentuk konstitusi baru dan Majelis Konstitusi. *Voting* yang dilakukan tersebut tidak luput dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap penyelenggara *voting* dan masyarakat Venezuela yang mengikuti *voting*.¹⁶⁰ Namun hasil *voting* tersebut tidak diindahkan oleh Maduro. Maduro menolak hasil *voting* karena tidak sah secara konstitusional. Maduro justru semakin gencar mensosialisasikan pemungutan suara anggota Majelis Nasional yang akan memiliki wewenang untuk menulis ulang konstitusi dan dapat membubarkan lembaga-lembaga negara.¹⁶¹

Peristiwa tersebut mendapat tanggapan dari Presiden Trump. Trump memberikan pernyataan pada tanggal 17 Juli 2017. Trump menyatakan bahwa masyarakat Venezuela telah menunjukkan tindakan demokrasi namun pemerintah Venezuela tidak menggubris. Dalam pernyataannya Trump juga menyebut Maduro sebagai pemimpin diktator dan AS akan selalu bersama rakyat Venezuela untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. AS juga memperingatkan pemerintah Venezuela apabila pembentukan Majelis Konstitusi tetap dilaksanakan pada 30 Juli 2017 maka AS akan tidak segan-segan mengambil tindakan

¹⁶⁰ Anonim, "Venezuela Referendum: Big Show of Support of Opposition," *BBC*, 2017, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40624313> (diakses pada 17 September 2018).

¹⁶¹ Corina Pons dan Brian Ellsworth, "Venezuela Opposition Says 7 Million Vote In Anti-Maduro Poll," *Reuters*, 16 Juli 2017, <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-opposition-says-7-million-vote-in-anti-maduro-poll-idUSKBN1A104O> (diakses pada 17 September 2018).

untuk memberikan sanksi kepada Venezuela. Berikut ini merupakan pernyataan Presiden Trump pada 17 Juli 2017.¹⁶²

“Yesterday, the Venezuelan people again made clear that they stand for democracy, freedom, and rule of law. Yet their strong and courageous actions continue to be ignored by a bad leader who dreams of becoming a dictator. The United States will not stand by as Venezuela crumbles. If the Maduro regime imposes its Constituent Assembly on July 30, the United States will take strong and swift economic actions. The United States once again calls for free and fair elections and stands with the people of Venezuela in their quest to restore their country to a full and prosperous democracy.”

Pemilu untuk anggota Majelis Konstitusi Nasional Venezuela pada akhirnya tetap dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2017. Pemilihan diwarnai dengan aksi protes dari kelompok anti pemerintah. Terjadi bentrokan antara pemrotes dengan pihak keamanan Venezuela. Bentrokan tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik dari pemrotes maupun pihak keamanan. Henrique Capriles menyebut terdapat kecurangan dalam pemilihan tersebut. Capriles mengatakan bahwa hanya sebesar 15% masyarakat Venezuela yang berpartisipasi. Partisipasi dalam *voting* yang dilakukan oleh oposisi pada tanggal 16 Juli 2017 memiliki tiga kali lebih banyak partisipan. Maduro menuding Presiden AS Donald Trump mencoba mencegah rakyat Venezuela untuk melaksanakan hak pilihnya. Maduro mengaku pemilihan tersebut merupakan pencapaian yang baik meskipun terdapat tekanan internasional.¹⁶³

AS menganggap Majelis Konstitusi Venezuela sebagai lembaga tidak sah yang dirancang oleh kediktatoran Maduro. Menurut AS sejak awal telah terdapat

¹⁶² The White House, *Statement From President Donald J. Trump*.

¹⁶³ Joe Sterling et.al., “Deadly Election Day In Venezuela As Protesters Clash With Troops”.

kecurangan dalam proses perencanaan dan pembentukan lembaga tersebut. Masyarakat Venezuela sejak awal tidak menyetujui rencana dibentuknya konstitusi baru dan lembaga tersebut. AS berpendapat bahwa pemilu anggota juga dirancang agar Majelis Konstitusi Venezuela diisi dengan loyalis Maduro. AS menambahkan bahwa rezim Maduro mengancam rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu atau mereka akan kehilangan akses ke makanan, pensiun, atau imbalan kerja sehingga pemilu tersebut tidak kredibel di mata internasional. AS tidak akan mengakui keberadaan Majelis Konstitusi Venezuela. Amerika Serikat tidak akan mengakui Majelis Konstituante Nasional. Rex Tillerson mengatakan bahwa AS mengevaluasi semua pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk menciptakan perubahan kondisi di Venezuela.¹⁶⁴

Kebijakan yang dipilih oleh AS pada akhirnya adalah pemberian sanksi tambahan kepada Venezuela. Pejabat Departemen Keuangan AS Steven Mnuchin secara resmi mengumumkan sanksi tambahan kepada Venezuela berdasarkan EO 13808. Presiden Trump menandatangani EO 13808 pada tanggal 24 Agustus 2017. EO tersebut memutus akses pemerintah Venezuela dan PdVSA terhadap sistem keuangan AS sehingga dapat mengganggu keberlangsungan pemerintahan Maduro. Selanjutnya Mnuchin menyampaikan bahwa sanksi tersebut bertujuan agar Maduro tidak lagi dapat mengambil keuntungan dari sistem keuangan

¹⁶⁴ U.S. Department of State, *Venezuela's Illegitimate National Constituent Assembly*, 3 Agustus 2017, <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/08/273024.htm> (diakses pada 17 September 2018).

Amerika untuk memfasilitasi penjarahan (korupsi) terhadap ekonomi Venezuela dengan mengorbankan rakyat Venezuela.¹⁶⁵

Pemberian sanksi yang lebih berat oleh AS diharapkan dapat menyebabkan perpecahan di dalam pemerintah Venezuela dan dengan demikian dapat mengakhiri kebijakan represif pemerintahan Maduro. Tetapi pemberian sanksi yang lebih berat juga memiliki konsekuensi dan efek negatif. Analisis berpendapat bahwa pemberian sanksi tersebut dapat berdampak pada kedua negara. Sanksi tersebut kemungkinan besar dapat membawa dampak buruk terhadap kondisi kemanusiaan Venezuela yang sudah sulit. Sedangkan bagi AS, pemberian sanksi tersebut kemungkinan dapat berdampak pada perekonomian AS. Faktor yang menyulitkan dalam penerapan sanksi tersebut adalah bahwa PdVSA memiliki anak perusahaan di AS yaitu CITGO. CITGO sendiri mengoperasikan tiga kilang minyak mentah, tiga jaringan pipa, dan beberapa terminal produk minyak bumi di AS.¹⁶⁶

Situational factor yang menjadi penyebab AS untuk memberikan sanksi tambahan kepada Venezuela pada tahun 2017 adalah kondisi demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin buruk. Berdasarkan kronologi peristiwa yang terjadi di Venezuela yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat momentum yang penting sehingga AS memberikan sanksi tambahan kepada Venezuela pada tahun 2017. Momentum tersebut adalah kebijakan Maduro untuk

¹⁶⁵ Al Jazeera, "US Imposes Sweeping Financial Sanctions On Venezuela," *Al Jazeera*, 26 Agustus 2017, <https://www.aljazeera.com/news/2017/08/imposes-sweeping-financial-sanctions-venezuela-170825211842001.html> (diakses pada 17 September 2018).

¹⁶⁶ Seelke dan Nelson, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, hal.

membuat konstitusi baru dan membentuk Majelis Konstitusi Nasional Venezuela. Sebelumnya, ketika Maduro mengumumkan rencananya untuk membuat konstitusi baru dan membentuk Majelis Konstitusi Nasional, AS telah mengancam akan memberikan sanksi kepada Venezuela apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Venezuela. Namun pemerintah Venezuela tidak menggubris tekanan yang diberikan oleh AS dan tetap memutuskan untuk merealisasikan rencananya sehingga hal tersebutlah yang mempengaruhi AS untuk menjatuhkan sanksi kepada Venezuela sebagai konsekuensi dibentuknya Majelis Konstitusi Nasional Venezuela.

5.2 Structural Change

5.2.1 Geografis

AS berada di bagian utara Benua Amerika. AS berbatasan secara langsung dengan Kanada, Meksiko, Laut Atlantik, dan Laut Pasifik Utara. Perbatasan AS dengan Kanada sepanjang 8.893 kilometer sedangkan perbatasan dengan Meksiko sepanjang 3.155 kilometer. AS memiliki luas wilayah sebesar 9.833. 517 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah darat dengan luas 9.147.593 kilometer persegi dan wilayah perairan dengan luas 685.924 kilometer persegi.¹⁶⁷

Iklim di kebanyakan wilayah AS adalah dingin, namun di beberapa wilayah memiliki iklim tropis seperti Hawaii dan Florida. Pada bagian barat

¹⁶⁷ CIA, *The World Factbook*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html> (diakses pada 18 September 2018).

Sungai Mississippi memiliki iklim semi kering dan gersang di *Great Basin*. Dengan kondisi geografis dan iklim tersebut, bencana alam yang sering terjadi di AS adalah tsunami, gempa bumi, aktivitas vulkanik di sekitar *Pacific Basin*. Sedangkan di sepanjang pantai Atlantik dan Teluk Meksiko sering terjadi angin topan. Pada wilayah Barat dan Tenggara AS sering terjadi tornado. Pada wilayah California sering terjadi longsor, dan di wilayah Alaska Utara sering terjadi kebakaran hutan, banjir, dan pembekuan tanah.¹⁶⁸

Secara geografis AS terletak di Benua Amerika dan memiliki negara tetangga yaitu Kanada dan negara-negara Amerika Latin. AS sendiri telah lama menjadi negara yang mengintervensi kawasan Latin Amerika karena apabila suatu isu di kawasan tersebut maka AS akan dapat terkena dampaknya karena kedekatan lokasi. Salah satunya adalah isu imigran di AS yang cukup banyak berasal dari Meksiko. Pada tahun 2014 diperkirakan terdapat 12,1 juta imigran ilegal yang tinggal di AS. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah pada tahun 2010 yaitu 11,6 juta imigran. Meksiko adalah penyumbang imigran ilegal terbesar ke AS. Imigran ilegal yang berasal dari Meksiko sebesar 6,6 juta orang.¹⁶⁹

Selain isu imigrasi, terdapat isu lain yang juga berdampak ke AS yaitu *drug trafficking*. Pada tahun 2017, lebih dari 72.000 orang AS meninggal akibat overdosis. Jumlah tersebut meningkat 7% dari tahun 2016. Kasus overdosis akibat kokain juga meningkat yaitu mencapai 14.556 kasus di tahun 2017 dimana jumlah

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ CNN, "Immigration Statistics Fast Facts," CNN, 20 Agustus 2018, <https://edition.cnn.com/2013/11/06/us/immigration-statistics-fast-facts/index.html> (diakses pada 18 September 2018).

tersebut meningkat dari tahun 2010 yang mencapai 4.312 kasus.¹⁷⁰ Negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia merupakan produsen kokain. Kolombia memiliki batas langsung dengan Venezuela sepanjang 1.370 mil dan Venezuela menjadi rute transit utama kokain dari Kolombia untuk dikirim ke AS.¹⁷¹ Maka dari itu, untuk memberantas narkoba AS banyak melakukan kerjasama *counternarcotics* dengan negara-negara Amerika Latin.

Geografis suatu negara dapat menjadi faktor pendorong suatu kebijakan. Dalam Model Adaptif milik Rosenau, harus terdapat perubahan kondisi geografis dari suatu negara yang akhirnya memunculkan sebuah kebijakan. Dalam bidang geografis, AS tidak mengalami perubahan karena perubahan geografis membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan permasalahan negara tetangga AS akibat letaknya yang dekat seperti permasalahan imigrasi dan narkoba juga telah lama terjadi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan dalam bidang geografi. Dengan tidak adanya perubahan maka tidak ada kondisi geografis yang membuat pemerintah harus beradaptasi dan mengeluarkan kebijakan pemberian sanksi kepada Venezuela di tahun 2017. Faktor geografis bukan merupakan faktor yang mempengaruhi AS untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.

¹⁷⁰ Susan Scutti, "US Drug Overdose Deaths Rose 7% In 2017 And Doubled Over A Decade, CDC Reports," *CNN*, 16 Agustus 2018, <https://edition.cnn.com/2018/08/16/health/us-overdose-death-report-cdc/index.html> (diakses pada 18 September 2018).

¹⁷¹ Sullivan, *Venezuela: Background and U.S. Relations*, 2016, 43.

5.2.2 Size

Size dapat menjadi faktor yang mempengaruhi negara untuk mengeluarkan kebijakan. Menurut Rosenau dalam Model Adaptif, *size* dapat berpengaruh terhadap munculnya kebijakan ketika *size* mengalami perubahan. *Size* dapat dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya alam suatu negara.

Berdasarkan data pada Juli 2017, AS memiliki penduduk sebesar 326.625.791 jiwa. Penduduk AS digambarkan dengan piramida penduduk muda yang berbentuk seperti segitiga dimana memiliki banyak penduduk dengan usia produktif. Penduduk dengan usia 0-14 tahun sebesar 18,73%, berusia 15-24 tahun sebesar 13,27%. Penduduk usia 25-54 tahun memiliki persentase paling besar yaitu 39,45%, sedangkan penduduk dengan usia 55-64 tahun memiliki persentase sebanyak 12,91%. Penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 15,63%.¹⁷² Populasi AS tentu mengalami perubahan setiap tahunnya. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan populasi pada tahun 2016 yaitu 322.762.018 jiwa.¹⁷³

Komposisi penduduk AS memiliki pengaruh terhadap aktivitas perekonomian AS. Dengan jumlah penduduk produktif yang cukup besar, AS dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif juga berpengaruh pada

¹⁷² CIA, *The World Factbook*.

¹⁷³ Robert Schlesinger, *The Size of The U.S. and The World in 2016*, 5 Januari 2016, <https://www.usnews.com/opinion/blogs/robert-schlesinger/articles/2016-01-05/us-population-in-2016-according-to-census-estimates-322-762-018> (diakses pada 17 September 2018).

angka pengangguran di AS. Pada tahun 2017, rata-rata tingkat pengangguran AS berada pada angka 4,35%. Angka tersebut menurun dari tahun 2016 yaitu 4,87%.¹⁷⁴

Sumber daya yang dimiliki AS adalah batubara, tembaga, timbal, molibdenum, fosfat, beberapa zat unsur tanah yang langka, uranium, bauksit, emas, besi, merkuri, nikel, kalium, perak, tungsten, seng, minyak bumi, gas alam, kayu. AS memiliki cadangan batu bara terbesar sebanyak 27% atau sebesar 491 miliar jika diuangkan. Lahan di AS digunakan untuk lahan pertanian sebesar 44,5%, lahan garapan sebesar 16,8%, dan tanaman permanen sebesar 0,3%.¹⁷⁵ Pada tahun 2016, AS memiliki cadangan minyak bumi yang cukup besar. Bahkan cadangan minyak AS di tahun 2016 melebihi cadangan minyak Arab Saudi dan Rusia. Jumlah cadangan minyak AS pada tahun 2016 mencapai 264bn.¹⁷⁶

Penulis menyimpulkan bahwa indikator *size* bukan merupakan faktor yang mempengaruhi AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Meskipun terdapat perubahan dalam populasi dan sumber daya alam AS namun hal tersebut tidak serta merta menjadi penyebab AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela. Perubahan *size* yaitu perubahan dalam sumber daya manusia dan sumber daya alam AS. Perubahan sumber daya manusia dapat dilihat dari perubahan populasi AS yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan

¹⁷⁴ CEIC, *Amerika Serikat Prakiraan: Tingkat Pengangguran*, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/united-states/forecast-unemployment-rate> (diakses pada 17 September 2018).

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Anjli Raval, "US Oil Reserves Surpass Those Of Saudi Arabia And Russia".

perubahan sumber daya alam salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah cadangan minyak AS.

5.2.3 Budaya dan Sejarah

Demokrasi adalah hal yang sering dihubungkan dengan budaya politik AS. Demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah lama menjadi komponen utama dari kebijakan luar negeri AS. Mendukung demokrasi tidak hanya mempromosikan nilai-nilai fundamental AS seperti kebebasan beragama dan menghormati hak-hak pekerja, tetapi juga dengan menciptakan dunia yang lebih aman, stabil, dan makmur di mana AS dapat memajukan kepentingan nasionalnya. Negara-negara yang diatur secara demokratis lebih memungkinkan dalam menjaga perdamaian, mencegah agresi, memperluas pasar terbuka, mempromosikan pembangunan ekonomi, melindungi warga negara AS, memerangi terorisme dan kejahatan internasional, menjunjung hak asasi manusia dan pekerja, menghindari krisis kemanusiaan dan arus pengungsi, meningkatkan kondisi lingkungan global, dan melindungi kesehatan manusia.¹⁷⁷

Menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia merupakan tujuan kebijakan luar negeri AS yang telah lama dilakukan. Selama seperempat abad terakhir, banyak negara yang telah melakukan transisi yang sukses menuju demokrasi. Banyak lagi yang berada pada berbagai tahap transisi. Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memperluas demokrasi sampai semua warga dunia memiliki

¹⁷⁷ U.S. Department of State, *Democracy*, <https://www.state.gov/j/drl/democ/> (diakses pada 17 September 2018).

hak fundamental untuk memilih pemimpinnya pemilu yang bebas, adil, dan transparan.¹⁷⁸

Nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh AS mempengaruhi kebijakan AS dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Dimana Venezuela dinilai oleh AS memiliki kondisi demokrasi dan hak asasi manusia yang buruk sehingga AS berupaya agar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan di Venezuela dengan memberikan kecaman maupun sanksi. Meskipun nilai-nilai demokrasi mempengaruhi munculnya pemberian sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017 tetapi faktor budaya dan sejarah tidak berpengaruh karena tidak terdapat perubahan nilai yang dianut oleh AS sehingga karena tidak adanya perubahan maka tidak terdapat proses adaptasi sebagai faktor pendorong munculnya sebuah kebijakan.

5.2.4 Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan Model Adaptif milik Rosenau, pembangunan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan luar negeri. Apabila pembangunan ekonomi suatu negara semakin baik maka akan semakin besar pula porsi GNP suatu negara untuk urusan luar negeri dan berlaku sebaliknya. Dalam mengeksekusi kebijakan luar negeri sangat dibutuhkan adanya pendanaan yang mencukupi untuk melakukan kebijakan tersebut.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Rosenau et al., *The World Politics*, 20.

GNP AS pada setengah tahun pertama di 2016 mencapai 16.392,8 milyar USD. Sedangkan pada pertengahan tahun 2017 GNP AS mencapai 17.352,839 milyar USD.¹⁸⁰ Terdapat kenaikan dalam GNP AS pada tahun 2017, dengan adanya kenaikan GNP maka kemungkinan besar pendanaan AS untuk urusan luar negeri akan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Sesuai dengan UU Anggaran Bipartisan 2015, anggaran Presiden untuk tahun 2017 termasuk \$ 583 milyar untuk Departemen Pertahanan (DOD). Anggaran tersebut meningkat sebesar 0,4 persen atau sekitar 2 milyar *US Dollar* dari 2016. Peningkatan tersebut digunakan untuk menyediakan sumber daya militer yang diperlukan untuk strategi keamanan nasional presiden. Hal ini akan memungkinkan militer AS untuk melindungi tanah air, termasuk dengan memberikan dukungan untuk operasi militer yang sedang berlangsung untuk mengalahkan ancaman teroris, membangun keamanan secara global, dan sebagainya.¹⁸¹

Anggaran pada tahun 2017 menyediakan 52,7 milyar *US Dollar* untuk Departemen Luar Negeri dan program internasional lainnya. Anggaran ini mendanai dalam agenda kesehatan global, keamanan pangan, perubahan iklim, memperdalam kerjasama dengan Sekutu dan mitra regional, melanjutkan kepemimpinan AS di PBB dan organisasi multilateral lainnya, mendukung masyarakat demokratis dan advokasi untuk hak asasi manusia, dan untuk berinvestasi dan melindungi personil dan fasilitas diplomatik AS di luar negeri.¹⁸² Anggaran dana dialokasikan untuk berbagai macam agenda luar negeri. Salah satu

¹⁸⁰ Trading Economics, *United States Gross National Product*.

¹⁸¹ Office of Management and Budget, *Budget of The U.S. Government*, 2017.

¹⁸² Ibid.

agenda pendanaan dari *budget* yang diterima oleh Departemen Luar Negeri AS digunakan untuk *National Endowment for Democracy* (NED). NED merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1983 untuk memperkuat demokrasi di seluruh dunia dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi. *Budget* untuk NED pada tahun 2017 adalah 103,5 juta USD yang akan memungkinkan NED untuk menjalankan program menyebarkan demokrasi di negara-negara maupun kawasan yang diprioritaskan oleh AS.¹⁸³ NED sendiri memiliki pengaruh dalam mendanai kelompok oposisi Venezuela untuk terus memprotes pemerintah Venezuela.

Dalam indikator pembangunan ekonomi terdapat perubahan GNP AS yang meningkat pada tahun 2017. Namun perubahan GNP tersebut tidak dapat berpengaruh terhadap munculnya kebijakan AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Adanya peningkatan anggaran dana Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2017 juga tidak dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di Venezuela. Penulis menyimpulkan bahwa indikator pembangunan ekonomi bukan merupakan indikator yang berpengaruh terhadap munculnya kebijakan AS memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017.

5.2.5 Teknologi

Teknologi menjadi salah satu pertimbangan negara dalam merancang kebijakan luar negeri. Negara yang memiliki teknologi yang canggih akan memiliki pilihan kebijakan luar yang lebih banyak karena disokong oleh kapabilitasnya dalam teknologi. AS merupakan negara yang *concern* terhadap

¹⁸³ Department of State, *Congressional Budget Justification*.

kapabilitas teknologi yang dimilikinya. AS memiliki kekhawatiran tertinggal oleh kapabilitas teknologi negara-negara lain sehingga pemerintah AS meningkatkan anggaran untuk melakukan *research and development*.¹⁸⁴

Kapabilitas teknologi negara menurut Rosenau dapat dilihat dari teknologi militer, teknologi agrikultur, maupun teknologi industri yang dapat meningkatkan produktivitas. Salah satu kapabilitas teknologi AS dapat dilihat dari bidang agrikultur AS memiliki teknologi yang canggih. Aktivitas agrikultur AS melibatkan robot, mesin, sensor kelembapan dan temperatur, teknologi GPS, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi tersebut, petani dapat secara maksimal menggarap lahannya. Penggunaan teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen serta dapat mengurangi penggunaan air dan pestisida sehingga harga hasil pertanian lebih murah.¹⁸⁵ Dengan teknologi pertanian yang canggih, AS dapat menjadi negara pengekspor komoditi pertanian terbesar di dunia.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menentukan kapabilitas negara dalam membuat kebijakan. Rosenau menambahkan bahwa perubahan teknologi terkadang bukan menjadi sumber yang secara langsung dapat mempengaruhi munculnya suatu kebijakan luar negeri, namun teknologi dapat mempengaruhi hal-hal lain yang merupakan sumber langsung dari munculnya

¹⁸⁴ Jan Fagerberg, et al., *Technological Dynamics And Social Capability: US States And European Nations*, 2013, http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/joeg.oxfordjournals.org_content_early_2013_08_31_jeg.lbt026.full_.pdf (diakses pada 17 September 2018).

¹⁸⁵ United States Department of Agriculture, *Agriculture Technology*, <https://nifa.usda.gov/topic/agriculture-technology> (diakses pada 18 September 2018).

kebijakan.¹⁸⁶ Kapabilitas teknologi AS dalam bidang militer, agrikultur, dan industri mempengaruhi AS dalam membuat kebijakan luar negeri. Namun dalam munculnya kebijakan pemberian sanksi penutupan akses Venezuela terhadap sistem keuangan AS tahun 2017 tidak dipengaruhi oleh perubahan kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh AS.

5.2.6 Struktur Sosial

Terdapat empat kelas sosial di AS yaitu *upper class*, *middle class*, *working class* dan *lower class*. *Upper class* merupakan kelas tertinggi dalam struktur sosial AS. Kelas ini memiliki kekayaan dan kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi, media, dan lainnya. Kelas ini diisi oleh orang-orang yang memiliki modal dalam dunia bisnis dan ekonomi serta terdapat politikus maupun selebriti.¹⁸⁷ Berdasarkan data pada tahun 2009 kelas atas terdiri dari sekitar 4% dari populasi AS dan termasuk rumah tangga dengan pendapatan tahunan lebih dari 200.000 *US Dollar*.¹⁸⁸

Middle class pada tahun 2009 mencakup 46% dari populasi AS. Kelas menengah merupakan rumah tangga yang pendapatan tahunannya berkisar dari 50.000 hingga 199.999 *US Dollar*. *Middle class* mencakup orang-orang dengan berbagai tingkat pendidikan dan penghasilan dan berbagai jenis pekerjaan. Kelas ini dapat dibagi lagi menjadi *upper middle class* dan *lower middle class*. *Upper middle class* memiliki pendapatan rumah tangga dari sekitar 150.000 hingga

¹⁸⁶ Rosenau, et al., *The World Politics*, 23.

¹⁸⁷ Anonim, *The Class Structure In The U.S*, <https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/the-class-structure-in-the-u-s/> (diakses pada 18 September 2018).

¹⁸⁸ Anonim, *Social Class in United States*, <http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/8-3-social-class-in-the-united-states/> (diakses pada 25 September 2018).

199.000 *US Dollar* sedangkan *lower middle class* memiliki penghasilan rumah tangga berkisar antara 50.000 hingga 74.999 *US Dollar*. *Working class* memiliki pendapatan tahunan antara 25.000 hingga 49.999 *US Dollar* dan merupakan sekitar 25% dari populasi AS. Sedangkan *lower class* memiliki pendapatan rumah tangga di bawah 25.000 *US Dollar* dan merupakan sekitar 25 % dari populasi AS.

Kelas sosial tersebut membagi masyarakat AS ke dalam kelas yang berbeda-beda berdasarkan pendapatnya. *Upper class* yang berisi orang-orang dengan pendapatan tertinggi mencakup sangat sedikit masyarakat AS. Kelas yang paling banyak mencakup masyarakat AS adalah *middle class*. Sedangkan *working class* dan *lower class* di AS mencapai 50% pada tahun 2009. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan pendapatan. Perbedaan kelas dan kesenjangan pendapatan dapat mengakibatkan konflik di masyarakat. Pada tahun 2011 terjadi *occupy wall street* yaitu gerakan untuk memprotes kesenjangan pendapatan serta pengaruh uang dalam politik AS. Protes tersebut juga menuntut kenaikan upah buruh.¹⁸⁹

Konflik dalam struktur sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi negara untuk mencetuskan sebuah kebijakan luar negeri. Protes *occupy wall street* tersebut telah lama terjadi. Setelah protes tersebut tidak terdapat protes lagi yang terjadi dengan skala sebesar *occupy wall street*. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator struktur sosial AS tidak

¹⁸⁹ Ray Sanchez, "Occupy Wall Street: 5 Years Later," *CNN*, 16 September 2016, <https://edition.cnn.com/2016/09/16/us/occupy-wall-street-protest-movements/index.html> (diakses pada 18 September 2018).

berpengaruh karena tidak terdapat konflik yang memicu timbulnya kebijakan AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017.

5.2.7 Opini Publik

Berdasarkan *polling* yang diadakan oleh *Charles Koch Institute*, mayoritas orang AS tidak percaya bahwa kebijakan luar negeri AS selama 15 tahun terakhir telah membuat mereka lebih aman. Mengurangi ancaman terorisme Islam telah menjadi fokus utama kebijakan luar negeri AS, namun rakyat AS belum melihat bukti keberhasilan dari upaya tersebut. Intervensi militer di dunia Islam dinilai telah memperburuk keadaan karena membutuhkan biaya yang besar yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat AS sendiri. Rakyat AS akan memprioritaskan belanja domestik daripada melakukan peningkatan belanja militer. Dari hasil *polling* ditemukan bahwa 79% pemilih lebih suka melihat tambahan dana untuk masalah domestik, seperti pengurangan utang. Sedangkan 12% menyetujui penambahan anggaran belanja militer. Hasil *polling* tersebut merupakan akumulasi dari *polling* yang dilakukan sebelum pemilihan presiden, setelah pemilihan presiden, dan setelah presiden Trump resmi dilantik.¹⁹⁰

Menurut George Friedman, pada tahun 2014 perhatian orang AS terhadap urusan luar negeri tidak begitu besar. Orang AS akan *concern* terhadap suatu urusan luar negeri apabila hal tersebut berkaitan atau berpotensi mengancam domestik AS. Dalam melihat situasi di Venezuela orang AS menganggap bahwa

¹⁹⁰ Charles Koch Institute, *Americans Reject U.S. Foreign Policy Status Quo*, <https://www.charleskochinstitute.org/blog/americans-reject-u-s-foreign-policy-status-quo/> (diakses pada 18 September 2018).

pemerintahan sayap kiri di bawah administrasi Maduro di Venezuela hanyalah pemerintahan Latin yang aneh dan masalah yang terjadi di Venezuela biarkan menjadi masalah Venezuela sendiri.¹⁹¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan opini warga AS terkait urusan luar negeri negaranya. Warga AS lebih memprioritaskan urusan dalam negeri dibandingkan urusan luar negeri. Warga AS lebih menginginkan adanya penambahan anggaran dana untuk urusan domestik daripada untuk urusan militer yang juga mencakup operasi di luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa opini publik tidak berpengaruh dalam munculnya kebijakan AS untuk memberikan sanksi kepada Venezuela karena publik lebih menginginkan AS fokus pada urusan domestik.

5.2.8 Akuntabilitas Politik

Menurut Rosenau, akuntabilitas politik merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut dapat dilihat dari adanya pemilu, kompetisi partai, dan kegiatan pemerintah untuk urusan luar negeri.¹⁹² Berdasarkan pendapat tersebut, pemerintah AS telah menunjukkan tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengadakan pemilu presiden pada tahun 2016. Kandidat calon presiden dalam pemilu presiden AS pada tahun 2016 adalah Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald J. Trump dari Partai Republik. Trump memenangkan *electoral college* dengan 304

¹⁹¹ George Friedman, "The American Public's Indifference To Foreign Affairs," *Forbes*, 19 Februari 2014, <https://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/02/19/the-american-publics-indifference-to-foreign-affairs/#782d1d333495> (diakses pada 18 September 2018).

¹⁹² Rosenau, et al., *The World Politics*, 25.

suara sedangkan Clinton mendapatkan 227 suara.¹⁹³ Sedangkan dalam kompetisi partai, pemerintah AS juga sudah bertanggungjawab dengan adanya Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut bersaing dalam menjadi mayoritas di Konres AS. Saat ini Kongres 115 didominasi oleh Partai Republik dimana partai tersebut menjadi mayoritas di kedua kamar Kongres AS. Dominasi Partai Republik tersebut tidak berubah. Pada Kongres 114, Partai Republik juga menjadi partai mayoritas baik di Senat maupun *House of Representatives*.¹⁹⁴

Pada masa awal jabatannya Trump telah menerapkan standar untuk memastikan bahwa administrasinya bekerja untuk rakyat AS bukan untuk dirinya sendiri. Trump telah melakukan tindakan untuk menolong komunitas marginal yang diabaikan oleh administrasi sebelumnya. Salah satu contohnya adalah dengan memperluas akses bantuan untuk veteran. Kebijakan “*America First*” yang diusung Trump dinilai telah berhasil mengembalikan suara rakyat AS dalam urusan luar negeri. Presiden Trump berjanji bahwa ia akan mengembalikan akuntabilitas pemerintah dengan mengefisiensikan penggunaan anggaran dana agar tidak terbuang untuk program yang tidak membuahkan hasil.¹⁹⁵

Penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan dalam akuntabilitas politik karena pemerintah AS telah menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pemilu sejak lama. Selain itu dalam kompetisi antar partai dalam

¹⁹³ The New York Times, “Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins,” *New York Times*, 9 Agustus 2017, <https://www.nytimes.com/elections/results/president> (diakses pada 25 September 2018).

¹⁹⁴ Jennifer E. Manning, *Membership of The 114th Congress: A Profile*, 5 Desember 2016, <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43869.pdf> (diakses pada 16 September 2018).

¹⁹⁵ The White House, *President Trump’s 100 Days of Accountability*, <https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/accountability.pdf> (diakses pada 16 September 2018).

Kongres AS tidak terjadi perubahan partai yang mendominasi. Dengan tidak adanya perubahan dalam akuntabilitas politik, maka tidak perlu dilakukan adaptasi. Faktor akuntabilitas politik merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap munculnya kebijakan AS dalam memberikan sanksi untuk Venezuela di tahun 2017.

5.2.9 Struktur Pemerintah

Berdasarkan konstitusi, pemerintah AS dibagi ke dalam 3 cabang pemerintahan. Hal ini bertujuan agar terdapat *checks and balances* sehingga tidak ada individu maupun kelompok yang memiliki terlalu banyak wewenang. Ketiga cabang tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif AS atau yang disebut dengan Kongres, terdiri dari Dewan Perwakilan (*House of Representatives*) dan Senat. Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kabinet, dan badan pemerintahan federal. Sedangkan yudikatif merupakan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya.¹⁹⁶

Kongres AS memiliki wewenang untuk mengusulkan rancangan undang-undang, menerima atau menolak nama kepala badan pemerintahan federal, nama hakim federal, dan Mahkamah Agung yang diusulkan oleh presiden, dan memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Cabang legislatif ini termasuk di dalamnya adalah Kongres dan badan-badan dan kantor khusus yang memberikan layanan dukungan kepada Kongres. Kongres AS dibagi menjadi dua kamar yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Anggota Senat berjumlah 100 orang. Terdapat dua Senator

¹⁹⁶ USA.gov, *Branches of The U.S. Government*, <https://www.usa.gov/branches-of-government> (diakses pada 17 September 2018).

terpilih dari masing-masing negara bagian. Masa jabatan Senator adalah enam tahun dan tidak ada pembatasan periode bagi individu untuk menjabat sebagai Senator. Sedangkan Dewan Perwakilan memiliki 435 anggota perwakilan dari 50 negara bagian. Jumlah perwakilan dari masing-masing negara bagian berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Anggota Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan selama dua tahun dan tidak ada pembatasan periode untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan. Anggota Dewan Perwakilan dan Senator dipilih oleh warga AS melalui pemilu yang bebas dan rahasia.¹⁹⁷

Eksekutif bertugas untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kabinet, departemen eksekutif, lembaga independen, dan dewan, komisi, dan komite lainnya. Presiden menjalankan masa jabatan selama empat tahun dan hanya dapat menjabat selama dua periode. Wakil presiden mendukung presiden. Jika presiden tidak dapat melaksanakan masa jabatannya maka wakil presiden akan menjadi presiden. Wakil presiden memiliki masa jabatan selama empat tahun dan tidak ada pembatasan periode untuk menjabat sebagai wakil presiden, bahkan di bawah presiden yang berbeda. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh warga AS melalui pemilu. Kabinet berfungsi sebagai penasihat presiden. Anggota Kabinet terdiri dari wakil presiden, kepala departemen eksekutif, dan pejabat tinggi pemerintah lainnya. Anggota

¹⁹⁷ Ibid

kabinet diusulkan oleh presiden dan harus disetujui oleh mayoritas Senator yaitu harus mendapat 51 suara jika semua Senator memilih.¹⁹⁸

Yudikatif memiliki tugas dan wewenang untuk menginterpretasikan arti hukum, menerapkan hukum untuk kasus-kasus individual, dan memutuskan apakah hukum yang ada di AS melanggar konstitusi atau tidak. Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan federal lainnya. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS. Hakim Mahkamah Agung diusulkan oleh presiden dan harus disetujui oleh Senat. Mahkamah Agung terdiri dari seorang Hakim Agung dan delapan Hakim Asosiasi. Jumlah minimum Hakim yang hadir untuk memutuskan sebuah kasus adalah enam orang. Tidak ada masa jabatan yang ditetapkan untuk hakim. Hakim dapat menjabat sampai mereka wafat, pensiun, atau pemecatan dalam keadaan luar biasa. Konstitusi memberikan Kongres wewenang untuk membentuk pengadilan federal lainnya untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan undang-undang federal termasuk pajak dan kebangkrutan, tuntutan hukum yang melibatkan AS dan pemerintah negara bagian atau Konstitusi, dan banyak lagi. Lembaga dan program peradilan federal lainnya mendukung pengadilan dan kebijakan peradilan penelitian.¹⁹⁹

Ketiga cabang tersebut memiliki perannya masing-masing dalam pembentukan kebijakan luar negeri, khususnya cabang eksekutif dan legislatif. Pihak yang paling berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS adalah presiden. Konstitusi AS memberikan presiden kekuatan sebagai panglima, kepala

¹⁹⁸ Ibid

¹⁹⁹ Ibid

diplomasi, kepala administrator, kepala negara, kepala legislator, kepala petugas peradilan, dan sebagai suara rakyat. Hal ini memberikan basis konstitusional bahwa presiden adalah pemimpin dalam membuat kebijakan luar negeri AS. Selain presiden, eksekutif yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan luar negeri adalah sekretaris negara yang perannya sangat penting karena merupakan kepala penasihat presiden mengenai urusan kebijakan luar negeri. Sekretaris negara, penasihat keamanan nasional, sekretaris pertahanan, kepala staf gabungan, dan direktur badan intelijen. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak inti dari Dewan Keamanan Nasional AS yang merupakan badan tertinggi dalam pembuatan kebijakan luar negeri.²⁰⁰

Presiden jelas merupakan aktor paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS. Presiden memiliki potensi untuk membuat keputusan yang mengubah jalannya urusan dunia dan memperkuat atau melemahkan keamanan nasional AS. Meskipun merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri tetapi bukan berarti presiden dapat dengan sesuka hati membuat kebijakan luar negeri. Wewenang presiden dalam kebijakan luar negeri memiliki batasan. Rencana kebijakan luar negeri yang dibuat oleh presiden dengan pihak-pihak eksekutif lainnya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kongres untuk dapat dilaksanakan.²⁰¹

²⁰⁰ Carl D. Cavalli, ed., *The Basic of American Government*, (Dahlonga: The University Press of North Georgia, 2013), 329.

²⁰¹ Shoon Murray dan Jordan Tama, "U.S. Foreign Policy Making and National Security," *The Oxford Handbook of U.S. National Security*, (2017), 15.

Di luar cabang eksekutif, Kongres dan lembaga peradilan memiliki kapasitas secara langsung membatasi wewenang presiden. Hal ini tertuang dalam Konstitusi AS dengan tujuan memastikan bahwa kekuasaan tidak akan terlalu terkonsentrasi pada satu cabang pemerintahan. Berdasarkan Konstitusi AS, wewenang untuk urusan luar negeri dibagi antara presiden dan Kongres. Dalam urusan luar negeri, Kongres diberikan kekuasaan untuk menyatakan perang, meratifikasi perjanjian, dan menyetujui pertemuan tingkat tinggi dengan negara lain. Selain itu, wewenang untuk mengatur perdagangan internasional dan pendanaan kebijakan luar negeri, diberikan sepenuhnya kepada Kongres.²⁰²

Kongres memiliki peran yang tak kalah penting dalam kebijakan luar negeri. Kongres akan memberikan pendapat dan menganalisa kebijakan luar negeri yang diusulkan oleh eksekutif. Dalam hampir setiap masalah kebijakan luar negeri, kongres akan memberikan pertimbangan dari segi kebijakan dan dari segi pendanaan. Dari segi kebijakan, Kongres akan menyampaikan pandangannya terhadap suatu masalah dari perspektif kebijakan. Dari segi pendanaan, Kongres memiliki peran yang sangat penting yaitu menyediakan dana untuk program pemerintah termasuk di dalamnya kebijakan luar negeri. Dana yang diberikan oleh Kongres tersebut dapat berasal dari anggaran tahunan maupun seringkali dari alokasi tambahan untuk situasi darurat. Pendanaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan suatu kebijakan luar negeri karena tanpa diberikannya dana, kebijakan luar negeri tidak dapat direalisasikan. Pentingnya peran kongres dalam kebijakan luar negeri mengharuskan adanya konsultasi dari eksekutif

²⁰² Ibid., 9.

dengan Kongres. Presiden memainkan peran utama dalam konsultasi dengan Kongres. Selain presiden, sekretaris negara juga menghabiskan banyak waktunya untuk berunding dengan anggota senior Kongres tentang isu-isu tertentu.²⁰³

Kongres terbagi menjadi dua kamar sehingga dalam memutuskan untuk meloloskan suatu kebijakan luar negeri sering terjadi pertentangan dalam Kongres. Terlebih lagi, pendanaan kegiatan kebijakan luar negeri harus disetujui oleh kedua kamar Kongres. Ketika suatu kebijakan luar negeri tidak disetujui atau tidak diberikan pendanaan oleh kongres maka presiden harus dapat menyesuaikan kebijakan luar negeri terhadap tersedianya dana. Contohnya pada administrasi Presiden Obama, Kongres yang dikuasai oleh Republik memberikan perlakuan ketat dalam memberikan anggaran sehingga Presiden Obama terpaksa menggunakan lebih sedikit dana pada bidang pertahanan dan bantuan luar negeri dari pada yang Obama harapkan.²⁰⁴

Tidak hanya membatasi wewenang presiden dalam kebijakan luar negeri, Kongres juga terkadang menginisiasi kebijakan luar negeri yang penting. Selama tiga dekade terakhir, Kongres juga telah memberlakukan sejumlah undang-undang tentang pemberian sanksi terhadap negara lain berdasarkan hak asasi manusia atau kekhawatiran tentang keamanan negara-negara tersebut. Selain itu, ketika presiden mengajukan perjanjian internasional kepada Senat untuk diratifikasi, Senator sering menggunakan perjanjian tersebut sebagai kendaraan untuk menetapkan undang-undang kebijakan baru lainnya yang mereka sukai.

²⁰³ U.S. Department of State, "U.S. Foreign Policy Agenda. The Making of U.S. Foreign Policy," *An Electronic Journal of the U.S. Department of State* 5, no. 1 (2000): 5-6.

²⁰⁴ Murray dan Tama, "U.S. Foreign Policy Making and National Security," 9.

Persaingan dan ketegangan antara dua cabang terus menjadi karakteristik tersendiri dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika.²⁰⁵

Kongres 115 merupakan kongres yang akan bertugas pada tahun 2017 hingga 2018. Partai mayoritas dalam Kongres 115 adalah Partai Republik. Dalam *House of Representatives* 238 kursi ditempati oleh Partai Republik, 197 kursi ditempati oleh Partai Demokrat, dan terdapat 6 kursi kosong. Sedangkan Senat sebanyak 51 kursi diisi oleh Partai Republik, 47 diisi oleh Partai Demokrat, dan 2 kursi diisi oleh tokoh independen yang lebih condong ke Partai Demokrat. Dua kamar yang ada dalam Kongres 115, mayoritas anggotanya adalah dari Partai Republik. Adanya satu partai yang menjadi mayoritas di kedua kamar Kongres 115 merupakan hal yang jarang terjadi karena biasanya mayoritas partai dalam *House of Representatives* dan Senat berbeda.²⁰⁶

Mayoritas partai dalam Kongres 115 akan mempengaruhi bagaimana Kongres 115 menolak atau menyetujui kebijakan luar negeri yang diusulkan oleh presiden karena masing-masing partai memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda-beda mengenai kebijakan luar negeri AS. Partai Republik bersifat lebih konservatif dibandingkan dengan Partai Demokrat. Partai Republik, fokus kebijakan luar negerinya adalah keamanan nasional AS. Republikan percaya pada penggunaan kekuatan militer AS untuk mendorong penyebaran demokrasi di seluruh dunia. Gagasan untuk menyebarkan demokrasi telah berakar dalam sejarah AS. Hal ini telah dilakukan oleh AS pasca Perang Dunia I, Presiden Woodrow

²⁰⁵ Ibid., 10.

²⁰⁶ Jennifer E. Manning, *Membership of the 115th Congress: A Profile*, 2018, <https://fas.org/sgp/crs/misc/R44762.pdf> (diakses pada 18 September 2018).

Wilson melihat penyebaran demokrasi sebagai sarana untuk mempromosikan stabilitas global.²⁰⁷

Republikan juga dikenal dengan isolasionismenya. Isolasionisme modern yang dianut Republikan mencakup spektrum luas. Isolasionisme klasik berpendapat bahwa AS seharusnya jarang mengalihkan perhatiannya kepada urusan di luar perbatasannya. Hal ini berbeda dengan isolasionisme yang lebih modern yang berpendapat bahwa kebijakan luar negeri AS yang bertujuan untuk menjaga hal-hal buruk terjadi di AS. Contoh dari kebijakan isolasionisme modern adalah menempatkan keamanan di perbatasan AS-Meksiko. Republikan dikenal dengan sifat konservatifnya. Republikan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Republikan melihat AS sebagai kekuatan dominan di dunia dan ingin mempertahankan dominasi tersebut. Dalam pandangan mereka, pengaruh internasional berasal dari kekuatan superior, bukan berasal dari organisasi multinasional yang mereka yakini mengurangi otoritas AS. Mereka berkomitmen untuk mencegah negara-negara untuk dapat menantang supremasi AS.²⁰⁸

Republikan juga disebut sebagai internasionalis tradisional dimana mereka mendukung kebijakan luar negeri aktif yang melayani kepentingan AS. Mereka melihat stabilitas global sebagai akibat dari keseimbangan kekuasaan. Mereka melihat tatanan internasional sebagai alam yang berbahaya, tetapi yang dapat dikelola dengan campuran kekuatan, diplomasi, dan multilateralisme yang tepat.

²⁰⁷ Eben Kaplan, *U.S. Political Parties and Foreign Policy*, 31 Oktober 2006, <https://www.cfr.org/backgrounders/us-political-parties-and-foreign-policy> (diakses pada 16 September 2018).

²⁰⁸ Ibid.

Kaum internasionalis tradisional berusaha mencari kepentingan bersama dengan negara lain, terlepas dari apakah mereka demokrasi atau tidak.²⁰⁹

Partai Demokrat dalam kebijakan luar negeri dikenal dengan pandangan internasionalis yang bersifat liberal. Sama seperti Republikan, Demokrat juga percaya bahwa penyebaran demokrasi sangat penting untuk stabilitas global. Namun, cara yang digunakan untuk menyebarkan demokrasi berbeda dengan Republikan yang menekankan pada penggunaan kekuatan. Penyebaran demokrasi menurut Demokrat dilakukan melalui melalui institusi multinasional. Meskipun Demokrat mempercayai bahwa multilateralisme adalah dasar dari kepentingan nasional, namun Demokrat tidak memungkiri bahwa AS menjadi negara paling kuat ketika kita memimpin dunia dan ketika memimpin aliansi yang kuat.²¹⁰

Demokrat juga dikenal dengan sifat proteksionisme yang percaya bahwa sumber daya bangsa harus difokuskan pada tanah air. Meskipun mereka sering menganjurkan memproyeksikan kekuatan AS tetapi tindakan di luar negeri tetap harus melayani tujuan meningkatkan keselamatan di rumah. Demikian juga, mereka percaya pada aliansi yang mengurangi beban AS dalam urusan luar negerinya dan mendukung program pembangunan yang berkaitan dengan keamanan AS. Demokrat memandang bahwa AS harus berperan aktif dalam kebijakan luar negerinya. Menurut Demokrat peran yang tepat bagi AS adalah sebagai negara yang terlibat dalam isu transnasional baru, seperti pengentasan kemiskinan dan mencegah penyebaran penyakit. Selain itu Demokrat tetap

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

menganjurkan intervensi kemanusiaan meskipun enggan menggunakan kekerasan. Demokrat keberatan dengan gagasan perang karena bertentangan dengan moral.²¹¹

Dalam indikator struktur pemerintah tidak terdapat perubahan terkait struktur pemerintah yang dianut oleh AS. Kekuasaan dibagi ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem partai AS juga tidak mengalami perubahan. Partai politik yang ada di AS adalah Partai Republik dan Demokrat. Dengan tidak adanya perubahan dalam indikator pemerintahan maka indikator ini tidak berpengaruh terhadap munculnya kebijakan AS dalam memberikan sanksi tambahan kepada Venezuela. Tanpa ada perubahan maka AS tidak perlu melakukan adaptasi sehingga indikator ini tidak berpengaruh.

5.3 Leadership

Presiden adalah pihak yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Masing-masing presiden memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga apabila terjadi pergantian presiden dalam sebuah negara maka akan terdapat perubahan pula pada kebijakan luar negeri negara tersebut. Presiden AS Donald J. Trump merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS. Tentunya Presiden Trump memiliki faktor idiosinkratik yang berbeda dengan presiden sebelumnya Barack Obama. Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis, faktor idiosinkratik tersebut meliputi nilai-

²¹¹ Ibid.

nilai, tujuan, kelemahan dan kelebihan, latar belakang, dan kepribadian dari seorang pemimpin.

Donald J. Trump merupakan Presiden AS ke 45. Donald Trump memiliki latar belakang sebagai seorang pebisnis dan merupakan Presiden AS yang tidak memiliki latar belakang politik.²¹² Trump dilahirkan di New York pada 14 Juni 1946 dan merupakan anak dari seorang pengusaha *real estate*. Trump mengembangkan bisnis keluarganya menjadi lebih besar. Salah satu properti Trump yang paling dikenal adalah *Trump Tower*. Trump juga membangun kerajaan dalam bisnis hiburan. Dari tahun 1996 hingga 2015, Trump adalah pemilik kontes kecantikan Miss Universe, Miss USA, dan Miss Teen USA. Trump juga kerap kali tampil di acara televisi. Menurut Forbes, kekayaan bersih Trump mencapai 3,7 miliar *US Dollar*.²¹³

Mulai dari awal menjabat sebagai presiden, Trump telah merencanakan beberapa kebijakan yang sangat berbeda dari Obama. Kebijakan Trump yang paling kontroversial adalah kebijakan tentang imigrasi, Trump secara drastis mengurangi jumlah imigran legal yang diperbolehkan untuk tinggal di AS. Selain itu, Trump juga membatalkan beberapa kesepakatan yang telah dibuat di masa

²¹² Rivan Dwiastono, "Profil Presiden AS Terpilih Donald Trump," *VOA Indonesia*, 9 November 2016, <https://www.voaindonesia.com/a/profil-presiden-as-terpilih-donald-trump/3588974.html> (diakses pada 16 September 2018).

²¹³ BBC, "Donald Trump's Life Story: From Hotel Developer To President," *BBC*, 20 Januari 2017, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-35318432> (diakses pada 16 September 2018).

kepemimpinan Presiden Obama seperti mengeluarka AS dari *Trans-Pacific Partnership*, serta menutup Obamacare meskipun belum tercapai.²¹⁴

Trump merupakan pemimpin yang terang-terangan dalam menyampaikan pendapat. Trump secara terbuka menyampaikan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui *twitter* yang bagi sebagian orang dianggap menyindir dan kontroversial. Kebanyakan individu menggunakan media sosial untuk menciptakan kesan yang baik namun tidak demikian halnya dengan Donald Trump. Trump melalui akun *twitter*nya @realDonaldTrump sering memposting cuitan mengenai pendapatnya tentang suatu isu maupun sekedar mengungkapkan apa yang saat itu dipikirkannya. Trump juga sering megkritik Presiden AS sebelumnya yaitu Barack Obama mengenai Obama yang kurang optimal dalam menggunakan *executive order*. Trump sendiri selama 100 hari di awal masa jabatannya telah menandatangani banyak *executive order* melebihi presiden AS lainnya pasca Perang Dunia II. Trump juga membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan pejabat yang tidak memiliki pandangan yang sama dengannya.²¹⁵

Trump juga tidak segan melontarkan kritikan atau sindiran kepada pemimpin dunia lainnya. Trump secara terbuka menyatakan keberatannya kepada negara-negara Eropa anggota NATO yang menurutnya tidak ikut andil dalam mengambil beban pembelanjaan pertahanan di NATO sehingga lebih banyak ditanggung oleh AS. Trump juga memberlakukan tarif perdagangan di China dan

²¹⁴ Anthony Zurcher, "Ten Ways Trump Has Changed America," *BBC*, 12 Januari 2018, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42653793> (diakses pada 19 September 2018).

²¹⁵ Sally Percy, "What Are Donald Trump's Strengths And Weaknesses As A Leader?," *Forbes*, 11 Juli 2018, <https://www.forbes.com/sites/sallypercy/2018/07/11/what-are-donald-trumps-strengths-and-weaknesses-as-a-leader/#2b4e9f1b36c7> (diakses pada 19 September 2018).

Uni Eropa. Pada masa pemerintahan Trump banyak penasihat yang mengundurkan diri atau dipecat oleh Trump.²¹⁶

Slogan yang terkenal dari masa kampanye Trump adalah “*America First*”. Hal ini diwujudkan oleh Trump sebagai visi kebijakan luar negerinya. Menurut Trump, dengan membangun kekuatan dalam urusan domestik maka AS juga akan mendapatkan kekuatan dalam urusan luar negeri. Trump menempatkan kepentingan dan keamanan rakyat AS sebagai prioritas utama. Presiden Trump baru-baru ini merilis Strategi Keamanan Nasional 2018, yang menyediakan visi strategis yang diperlukan untuk melindungi rakyat Amerika, melestarikan cara hidup, meningkatkan kemakmuran, menjaga perdamaian melalui kekuatan, dan memajukan pengaruh AS di dunia. Keamanan ekonomi juga merupakan keamanan nasional. Di bawah administrasi Presiden Trump, AS akan melawan terorisme yang mengancam rakyat AS. Trump juga meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan AS. AS juga memperkuat aliansinya dan melakukan konfrontasi terhadap pihak yang dianggap musuh.²¹⁷

Kepribadian, latar belakang, dan gaya kepemimpinan dari seorang presiden akan mempengaruhi pemilihan anggota Kabinet. Selain itu juga akan mempengaruhi bagaimana struktur proses penasihat Gedung Putih dilakukan. Karakteristik presiden dalam melihat kepentingan kebijakan luar negeri, kesediaan untuk mentolerir debat internal, komitmen terhadap agenda kebijakan tertentu,

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ The White House, *President Donald J. Trump's Foreign Policy Puts America First*, 30 Januari 2018, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-foreign-policy-puts-america-first/> (diakses pada 16 September 2018).

memprioritaskan loyalitas atau keahlian, pengalaman, dan penempatan orang-orang kepercayaan di birokrasi semua hal tersebut mempengaruhi bagaimana Gedung Putih menerima saran dan menangani masalah. Dalam menentukan anggota Kabinet, Donald Trump lebih memilih figur pengusaha seperti Rex Tillerson sebagai Sekretaris Negara dan pemimpin militer seperti James Mattis sebagai Menteri Pertahanan. Trump juga lebih memprioritaskan loyalitas dari pada keahlian (*expertise*) dalam memilih anggota Kabinet.²¹⁸

Melalui penunjukan anggota Kabinet untuk masing-masing badan pemerintah federal, presiden dapat memanfaatkan dan menggeser arah birokrasi. Misalnya pada Departemen Luar Negeri, presiden dapat menentukan orang-orang yang akan menjadi asisten sekretaris atau pangkat yang lebih tinggi, dan juga dapat menentukan duta besar. Penunjukan oleh presiden tersebut juga berlaku pada badan pemerintah federal lainnya. Namun presiden sangat jarang melakukan perubahan dalam badan intelijen negara. Mantan Direktur CIA, Michael Hayden, telah mengamati bahwa presiden baru jarang melakukan perubahan besar kepada badan-badan intelijen negara. Terdapat tradisi memperlakukan komunitas intelijen sebagai profesional yang tidak bersifat politis yang telah diwariskan dari administrasi ke administrasi selama beberapa dekade.²¹⁹

Dalam variabel *leadership* terdapat perubahan Presiden AS yaitu berakhirnya masa jabatan Obama dan digantikan oleh Trump. Dengan adanya perubahan presiden maka terdapat proses adaptasi dalam pengambilan kebijakan

²¹⁸ Murray dan Tama, "U.S. Foreign Policy Making and National Security," 4.

²¹⁹ Ibid., 5.

luar negeri AS dan menjadi faktor yang berpengaruh dalam munculnya kebijakan AS memberikan sanksi kepada Venezuela. Meskipun sikap yang ditunjukkan oleh AS pada masa pemerintahan Obama dan Trump sama, tetapi keputusan untuk memberikan sanksi dipengaruhi oleh adanya karakteristik pemimpin yang berbeda. Selain itu pergantian presiden menyebabkan adanya perbedaan bentuk dalam sanksi yang diberikan oleh AS pada masa Obama dan Trump.

Berdasarkan analisis melalui Model Adaptif milik Rosenau yang dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap munculnya kebijakan luar negeri AS dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Dari variabel *external change*, terdapat perubahan dalam indikator *situational factor* yang berpengaruh dalam munculnya kebijakan tersebut sedangkan indikator *great power structure* dan aliansi tidak mengalami perubahan sehingga tidak berpengaruh terhadap munculnya kebijakan tersebut. Selanjutnya pada variabel *structural change*, tidak terdapat indikator yang berpengaruh. Variabel *leadership* mengalami perubahan dan presiden merupakan pihak yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS sehingga perubahan pemimpin sangat berpengaruh pada munculnya kebijakan AS memberikan sanksi kepada Venezuela tahun 2017.

BAB VI

PENUTUP

Bab terakhir ini akan merangkum semua hasil analisis penelitian yang sudah penulis lakukan. Hasil analisis mengenai kebijakan AS memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Analisis ini diawali dari dinamika hubungan antara AS dan Venezuela yang cukup baik dalam hubungan ekonomi namun tidak demikian dengan hubungan diplomatik. Namun semenjak adanya perubahan presiden Venezuela membuat hubungan diplomatik kedua negara semakin buruk. AS juga mengalami perubahan presiden pada awal tahun 2017 dan pada tahun yang sama presiden Venezuela membuat kebijakan yang dinilai melanggar konstitusi Venezuela.

6.1 Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi AS dalam memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017, faktor pertama yang mempengaruhi munculnya kebijakan luar negeri AS memberikan sanksi penutupan akses terhadap sistem keuangan AS kepada Venezuela pada tahun 2017 adalah *external change*. Hal ini dapat dibuktikan melalui indikator *situational factor* yaitu adanya kebijakan Maduro untuk membentuk Majelis Konstitusi Nasional Venezuela yang mempengaruhi AS memberikan sanksi pada Venezuela tahun 2017. Pada bulan Mei 2017, Maduro mengumumkan rencananya untuk mengubah konstitusi Venezuela dan membentuk Majelis Konstitusi Nasional. Rencana tersebut

dikecam oleh pihak oposisi dan berdasarkan *voting* yang diselenggarakan oleh pihak oposisi sebagian besar masyarakat Venezuela tidak menyetujui rencana Maduro tersebut. Namun hasil *voting* yang menunjukkan ketidaksetujuan rakyat Venezuela tersebut tidak dihiraukan oleh Maduro.

Rencana Maduro dan *voting* yang dilakukan oleh kelompok oposisi Venezuela menjadi *concern* AS. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Trump pada tanggal 17 Juli 2017. Trump menanggapi peristiwa tersebut dengan menyatakan dukungannya terhadap upaya rakyat Venezuela yang menolak rencana Maduro untuk membentuk Majelis Konstitusi Nasional. Dalam pernyataannya Trump menyampaikan bahwa upaya rakyat Venezuela tersebut tidak dihiraukan oleh Maduro yang diktator. Trump menyatakan tidak akan tinggal diam melihat Venezuela hancur dan akan selalu bersama rakyat Venezuela untuk memperjuangkan demokrasi di Venezuela. Apabila Maduro tetap melaksanakan pembentukan lembaga tersebut, AS akan memberikan sanksi ekonomi yang lebih berat. Maduro tidak menggubris ancaman Trump tersebut dan tetap mendirikan Majelis Konstitusi Nasional sehingga AS pun memberikan sanksi pada Venezuela.

Faktor kedua yang mempengaruhi AS memberikan sanksi penutupan akses terhadap keuangan AS pada Venezuela tahun 2017 adalah faktor *leadership*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor perubahan kepemimpinan sangat berpengaruh karena presiden memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan luar negeri AS. Adanya pergantian presiden dari Obama menjadi Trump berpengaruh pada kebijakan luar negeri AS. Masing-masing

presiden memiliki faktor idiosinkratik yang berbeda. Faktor idiosinkratik Trump yang meliputi latar belakangnya sebagai pebisnis, karakteristik yang menyampaikan pikirannya secara terang-terangan, dan tujuan kebijakan luar negerinya yang mengutamakan kondisi domestik AS sangat mempengaruhi munculnya pemberian sanksi pada Venezuela tahun 2017.

Faktor terakhir adalah idiosinkratik Trump dimana pada tahun 2017, sanksi AS bersifat lebih keras dibandingkan dengan sanksi Obama di tahun 2015. Sanksi berupa penutupan akses terhadap sistem keuangan AS menjadi pilihan Trump untuk Venezuela. Sanksi tersebut langsung menargetkan kondisi keuangan Venezuela yang membutuhkan pinjaman dan berdampak pada kondisi ekonomi Venezuela. Berbeda dengan sanksi pembatasan visa dan pembekuan aset yang diberikan oleh Obama pada tahun 2015 yang hanya menargetkan pejabat Venezuela sehingga dampaknya pun hanya dirasakan oleh pejabat Venezuela yang bersangkutan.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor lainnya tidak berpengaruh atau tidak terbukti sebagai faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan luar negeri AS memberikan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017. Penulis menemukan adanya perbedaan kesimpulan dengan argumen utama yang sebelumnya diajukan oleh penulis sebelumnya. Dalam argumen utama penulis menduga bahwa variabel *external change* merupakan variabel yang paling berpengaruh. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa faktor *leadership* mempunyai pengaruh yang sangat besar karena Trump sangat berpengaruh dalam

pembuatan kebijakan luar negeri AS dan mempengaruhi bentuk sanksi yang diberikan kepada Venezuela.

6.2 Rekomendasi Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis masih jauh dari kata sempurna. Banyak sisi lain yang dapat dilihat lebih jauh untuk diteliti guna menunjang perkembangan studi hubungan internasional khususnya dalam analisis kebijakan luar negeri. Kekurangan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan kembali oleh penelitian selanjutnya, baik dengan kesamaan studi kasus maupun kesamaan teori. Selain itu, penulis memiliki rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang mungkin akan memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Penulis merekomendasikan untuk menggunakan Model Adaptif milik Rosenau sebagai alat untuk menganalisa studi kasus. Model Adaptif melihat perubahan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dari segi eksternal, *structural* atau perubahan internal, dan *leadership*. Penulis juga merekomendasikan untuk meneliti studi kasus yang diteliti oleh penulis dari sisi yang berbeda. Penulis selanjutnya juga dapat memanfaatkan celah-celah yang belum diulas dalam penelitian ini sehingga menjadi suatu kebaruan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cavalli, Carl D. ed. *The Basic of American Government*. Dahlonga: The University Press of North Georgia, 2013.
- Hufbauer, Gary Clyde et.al. *Economic Sanctions Reconsidered*. Washington, DC: United Book Press Inc., 2007.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Perwira, DR. Anak Agung dan DR. Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rosenau, James N. *The Study Of Political Adaptation*. New York: Nichols Publishing Company, 1981.
- Rosenau, James N. et al. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, 1976.

Jurnal

- Fagerberg, Jan et al. "Technological Dynamics And Social Capability: US States And European Nations." *Journal of Economic Geography*, 2013: 1-25. http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/joeg.oxfordjournals.org_content_early_2013_08_31_jeg.lbt026.full_.pdf (diakses pada 17 September 2018).
- Hufbauer, Gary Clyde dan Jeffrey J.Schott. "Economic Sanctions and US Foreign Policy." *PS Volume* 18, No. 4 (2013): 727.
- Murray, Shoon dan Jordan Tama, "U.S. Foreign Policy Making and National Security," *The Oxford Handbook of U.S. National Secutity*, (2017): 1-22.

Neuenkirch, Matthias dan Florian Neumeier. "The Impact of US and UN Economic Sanctions On GDP Growth." *European Journal of Political Economy* 40 (2015): 110.

U.S. Department of State. "U.S. Foreign Policy Agenda. The Making of U.S. Foreign Policy." *An Electronic Journal of the U.S. Department of State* vol. 5, no. 1 (2000): 1-54.

Dokumen Resmi

The White House. *Executive Order 13692, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela*. 2015, Washington, DC: Federal Register.

The White House. *Executive Order 13808, Imposing Additional Sanctions With Respect to the Situation in Venezuela*. 2017, Washington, DC: Federal Register.

Online

Al Jazeera. "US Imposes Sweeping Financial Sanctions On Venezuela." *Al Jazeera*, 26 Agustus 2017. <https://www.aljazeera.com/news/2017/08/imposes-sweeping-financial-sanctions-venezuela-170825211842001.html> (diakses pada 17 September 2018).oll-idUSKBN1A104O (diakses pada 17 September 2018).

Anonim. "Russia and Venezuela Agree Debt Deal." *BBC*, 15 November 2017. <https://www.bbc.com/news/business-42006249> (diakses pada 15 September 2018).

Anonim. *Social Class in United States*. <http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/8-3-social-class-in-the-united-states/> (diakses pada 25 September 2018).

- Anonim. "Sudan Sanctions: US Lifts Most Economic Restrictions After Two Decades." *BBC*, 6 Oktober 2017. <http://www.bbc.com/news/world-africa-41531855> (diakses pada 19 April 2018).
- Anonim. *The Class Structure In The U.S.* <https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/the-class-structure-in-the-u-s/> (diakses pada 18 September 2018).
- Anonim. "Tillerson Threatens Regime Change in Venezuela." *Telesur*, 2 Agustus 2017. <https://www.telesurtv.net/english/news/Tillerson-Threatens-Regime-Change-in-Venezuela-20170801-0030.html> (diakses pada 14 September 2018).
- Anonim. *United States: Economic And Political Outline.* <https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/united-states/economic-political-outline> (diakses pada 1 September 2018).
- Anonim. "Venezuela GDP and Economic Data." *Global Finance*, 24 September 2018. <https://www.gfmag.com/global-data/country-data/venezuela-gdp-country-report> (diakses pada 5 September 2018).
- Anonim. "Venezuela Maintains High Human Development: UN." *Telesur*, 25 Maret 2017. <https://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-Maintains-High-Human-Development-UN-20170325-0003.html> (diakses pada 5 September 2018).
- Anonim. "Venezuela Referendum: Big Show of Support of Opposition." *BBC*, 2017. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40624313> (diakses pada 9 September 2018).
- Anonim. "What Lies Behind The Protests in Venezuela?." *BBC*, 27 Maret 2014. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-26335287> (diakses pada 8 September 2018).

Avendano, Orlando. "Twelve Foreign Ministers Meet in Lima to Reject Maduro's Illegal Constituent Assembly in Venezuela." *Panam Post*, 8 Agustus 2017. <https://panampost.com/orlando-avendano/2017/08/08/twelve-foreign-ministers-meet-in-lima-to-reject-maduros-illegal-constituent-assembly-in-venezuela/> (diakses pada 16 September 2018).

BBC. "Donald Trump's Life Story: From Hotel Developer To President." *BBC*, 20 Januari 2017. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-35318432> (diakses pada 16 September 2018).

Brocchetto, Marilia dan Rafael Romo. "Venezuela's Maduro Calls for Constitutional Changes Amid Unrest." *CNN*, 1 Mei 2017. <https://edition.cnn.com/2017/05/01/americas/venezuela-maduro-new-constitution/index.html> (diakses pada 5 Agustus 2018).

Buncombe, Andrew. "CIA chief hints agency is working to change Venezuelan government." *Independent*, 25 Juli 2017. <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/cia-venezuela-crisis-government-mike-pompeo-helping-install-new-remarks-a7859771.html> (diakses pada 15 September 2018).

Camilleri, Michael. *Evolution or Revolution? U.S. Policy on Venezuela from Obama to Trump*. 21 September 2018. <https://www.thedialogue.org/analysis/evolution-or-revolution-u-s-policy-on-venezuela-from-obama-to-trump/> (diakses pada 23 Oktober 2018).

Cartalucci, Tony. *US Regime Change in Venezuela: The Truth Is Easy if You Follow the Money Trail. The Opposition is Pro-Washington, Not "Pro-Democracy"*. 15 Oktober 2017. <https://www.globalresearch.ca/us-regime-change-in-venezuela-the-truth-is-easy-if-you-follow-the-money-trail-the-opposition-is-pro-washington-not-pro-democracy/5601933> (diakses pada 25 September 2018).

CEIC. *Amerika Serikat Prakiraan: Tingkat Pengangguran*.
<https://www.ceicdata.com/id/indicator/united-states/forecast-unemployment-rate> (diakses pada 17 September 2018).

Ceja, Lucho Granados. "The US Role in the Failed Attempt to Overthrow Hugo Chavez." *Telesur*, 18 November 2015.
<https://www.telesurtv.net/english/analysis/The-US-Role-in-the-Failed-Attempt-to-Overthrow-Hugo-Chavez-20151118-0014.html> (diakses pada 23 Oktober 2018).

Chapman, Julia. "Russia Looks To Write A New Chapter With Latin America." *Deutsche Welle*, 5 Oktober 2017. <https://www.dw.com/en/russia-looks-to-write-a-new-chapter-with-latin-america/a-40820763> (diakses pada September 2018).

Charles Koch Institute. *Americans Reject U.S. Foreign Policy Status Quo*.
<https://www.charleskochinstitute.org/blog/americans-reject-u-s-foreign-policy-status-quo/> (diakses pada 18 September 2018).

CIA. *The World Factbook: United States*.
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html> (diakses pada 28 April 2018).

CNN. "Immigration Statistics Fast Facts." *CNN*, 20 Agustus 2018.
<https://edition.cnn.com/2013/11/06/us/immigration-statistics-fast-facts/index.html> (diakses pada 18 September 2018).

Coatsworth, John H. *United States Interventions*. 2005.
<https://revista.drclas.harvard.edu/book/united-states-interventions> (diakses pada 13 September 2018).

Crane, Mary. *U.S. – Venezuelan Relations*. 18 November 2005.
<https://www.cfr.org/backgrounder/us-venezuelan-relations> (diakses pada 7 September 2018).

- Dwiastono, Rivan. "Profil Presiden AS Terpilih Donald Trump." *VOA Indonesia*, 9 November 2016. <https://www.voaindonesia.com/a/profil-presiden-as-terpilih-donald-trump/3588974.html> (diakses pada 16 September 2018).
- Emmott, Robin. "EU Readies Sanctions On Venezuela, Approves Arms Embargo." *Reuters*, 13 November 2017. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-eu/eu-readies-sanctions-on-venezuela-approves-arms-embargo-idUSKBN1DD0UN?il=0> (diakses pada 16 September 2018).
- Focus Economics. *U.S. Economic Outlook*. <https://www.focus-economics.com/countries/united-states> (diakses pada 1 September 2018).
- Friedman, George. "The American Public's Indifference To Foreign Affairs." *Forbes*, 19 Februari 2014. <https://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/02/19/the-american-publics-indifference-to-foreign-affairs/#782d1d333495> (diakses pada 18 September 2018).
- Gardner, Timothy. "U.S. senators seek review of potential Russian control of Citgo." *Reuters*, 20 September 2017. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa-congress/u-s-senators-seek-review-of-potential-russian-control-of-citgo-idUSKCN1BU2O4> (diakses pada 27 September 2018).
- Gill, Timothy M. "U.S.-Venezuela Relations Will Probably Deteriorate Under Trump. Ask ExxonMobil Why." *Washington Post*, 29 Desember 2016. https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/29/u-s-venezuela-relations-will-likely-deteriorate-under-trump-ask-exxonmobil-why/?noredirect=on&utm_term=.cd53357a9a34 (diakses pada 14 September 2018).
- Global Affairs Canada. *Canadian Sanctions Related to Venezuela*. 2018. <http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela.aspx?lang=eng> (diakses 16 pada September 2018).

- Gupta, Girish. "Venezuela Opposition Attacked As They Seek Progress On Maduro Recall." *Reuters*, 9 Juni 2016. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN0YV1VO> (diakses pada 8 September 2018).
- Gurganus, Julia. *Venezuela: A New U.S.–Russia Battleground*. 22 Mei 2018. <https://carnegieendowment.org/2018/05/22/venezuela-new-u.s.-russia-battleground-pub-76424> (diakses pada 16 September 2018).
- Haryono, Willy. "Presiden Venezuela Serukan Konstitusi Baru di Tengah Gelombang Demonstrasi." *Metro TV*, 2 Mei 2017. <http://internasional.metrotvnews.com/amerika/8KyG9gOb-presiden-venezuela-serukan-konstitusi-baru-di-tengah-gelombang-demonstrasi> (diakses pada 17 September 2018).
- Human Rights Watch. *Venezuela Events 2017*. <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/venezuela> (diakses pada 17 September 2018).
- Humire, Joseph M. *Iran, Russia, and China's Central Role in the Venezuela Crisis*. 14 Februari 2018. <https://www.gatestoneinstitute.org/11888/venezuela-iran-russia-china> (diakses pada 15 September 2018).
- Kaplan, Eben. *U.S. Political Parties and Foreign Policy*. 31 Oktober 2006. <https://www.cfr.org/backgrounders/us-political-parties-and-foreign-policy> (diakses pada 16 September 2018).
- Kearens, Heggy. *Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 (2001-2008)*. (2012).
- Manning, Jennifer E. *Membership of The 114th Congress: A Profile*. 5 Desember 2016, <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43869.pdf> (diakses pada 16 September 2018).
- Manning, Jennifer E. *Membership of the 115th Congress: A Profile*. 2018. <https://fas.org/sgp/crs/misc/R44762.pdf> (diakses pada 18 September 2018).

Martin, Sabrina. "New Monthly Minimum Wage in Venezuela Barely Enough to Buy Daily Cup of Coffee." *Panam Post*, 4 Januari 2018. <https://panampost.com/sabrina-martin/2018/01/04/new-monthly-minimum-wage-in-venezuela-barely-enough-to-buy-daily-cup-of-coffee/?cn-reloaded=1> (diakses pada 5 September 2018).

Martin, Will. "35% GDP collapse: Venezuela's Unprecedented Economic Slide In Numbers." *Business Insider*, 3 Agustus 2017. <https://www.businessinsider.sg/statistics-about-venezuelas-economic-collapse-2017-8/?r=UK&IR=T> (diakses pada 5 September 2018).

Melimopoulos, Elizabeth. "Venezuela: People vote in Unofficial Referendum." *Al Jazeera*, 17 Juli 2017. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/venezuela-people-voting-today-170716021009272.html> (diakses pada 17 September 2018).

Miller, Claire Cain dan Kevin Quealy. "Democracy in America: How Is It Doing?." *New York Times*, 23 Februari 2017. <https://www.nytimes.com/2017/02/23/upshot/democracy-in-america-how-is-it-doing.html> (diakses pada 1 September 2018).

Nakamura, David. "How an Oval Office meeting led to a Trump tweet that changed U.S. policy toward Venezuela." *Washington Post*, 6 Oktober 2017. https://www.washingtonpost.com/politics/how-an-oval-office-meeting-led-to-a-trump-tweet-that-changed-us-policy-toward-venezuela/2017/10/06/87e9b178-a52b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html?noredirect=on&utm_term=.55f1c154576a (diakses pada 15 September 2018).

Nelson, Rebecca M. *Venezuela's Economic Crisis: Issues for Congress*. 2018. <https://fas.org/sgp/crs/row/R45072.pdf> (diakses pada 20 April 2018).

Office of Management and Budget. Budget of The U.S. Government. 2017.

Office of The United States Trade Representative. *U.S. – Venezuela Trade Facts*.
<https://ustr.gov/countries-regions/americas/venezuela> (diakses pada 7 September 2018).

Pear, David William. *Venezuela Regime Change Project Reveal*. 4 Agustus 2017.
<https://www.globalresearch.ca/venezuela-regime-change-project-revealed/5602599> (diakses pada 14 September 2018).

Percy, Sally. "What Are Donald Trump's Strengths And Weaknesses As A Leader?." *Forbes*, 11 Juli 2018.
<https://www.forbes.com/sites/sallypercy/2018/07/11/what-are-donald-trumps-strengths-and-weaknesses-as-a-leader/#2b4e9f1b36c7> (diakses pada 19 September 2018).

Pons, Corina dan Brian Ellsworth. "Venezuela Opposition Says 7 Million Vote In Anti-Maduro Poll." *Reuters*, 16 Juli 2017. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-opposition-says-7-million-vote-in-anti-maduro-p> (diakses pada 16 September 2018).

Rathbone, John Paul. *Venezuela's Neighbours Try To Put Financial Pressure On Maduro*. 9 Agustus 2017. <https://www.ft.com/content/bc4bfba8-7c48-11e7-9108-edda0bcb928> (diakses pada 16 September 2018).

Raval, Anjli. "US Oil Reserves Surpass Those Of Saudi Arabia And Russia." *CNBC*, 5 Juli 2016. <https://www.cnbc.com/2016/07/05/us-oil-reserves-surpass-those-of-saudi-arabia-and-russia.html> (diakses pada 17 September 2018).

Romo, Rafael. "Venezuela's High Court Dissolves National Assembly." *CNN*, 30 Maret 2017. <https://edition.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/index.html> (diakses pada 9 September 2018).

Sanchez, Ray. "Occupy Wall Street: 5 Years Later." *CNN*, 16 September 2016. <https://edition.cnn.com/2016/09/16/us/occupy-wall-street-protest-movements/index.html> (diakses pada 18 September 2018).

Schlesinger, Robert. *The Size of The U.S. and The World in 2016*. 5 Januari 2016.
<https://www.usnews.com/opinion/blogs/robert-schlesinger/articles/2016-01-05/us-population-in-2016-according-to-census-estimates-322-762-018>
(diakses pada 17 September 2018).

Scutti, Susan. "US Drug Overdose Deaths Rose 7% In 2017 And Doubled Over A Decade, CDC Reports." *CNN*, 16 Agustus 2018.
<https://edition.cnn.com/2018/08/16/health/us-overdose-death-report-cdc/index.html> (diakses pada 18 September 2018).

Seelke, Clare Ribando dan Rebecca M. Nelson. *Venezuela: Background and U.S. Relations*. 2018. <https://fas.org/sgp/crs/row/R44841.pdf> (diakses pada 20 April 2018).

Shoichet, Catherine E. dan Dana Ford. "Venezuelan President Hugo Chavez Dies." *CNN*, 6 Maret 2013.
<https://edition.cnn.com/2013/03/05/world/americas/venezuela-chavez-main/index.html> (diakses pada 7 September 2018).

Stanley, Andrew J. dan Frank A. Verrastro. "How Low Can Venezuelan Oil Production Go?." *CSIS*, 18 Juni 2018. <https://www.csis.org/analysis/how-low-can-venezuelan-oil-production-go> (diakses pada 5 September 2018).

Starling, Joe et al. "Deadly Election Day In Venezuela As Protesters Clash With Troops." *CNN*, 31 Juli 2017.
<https://edition.cnn.com/2017/07/03/americas/venezuela-on-edge-vote/index.html> (diakses pada 12 September 2018).

Sullivan, Mark P. *Venezuela: Background and U.S. Relations*. 2014.
https://www.everycrsreport.com/files/20141002_R43239_2a74c9bcaaffea1a6b8f95973049deacd118fbc0.pdf (diakses pada 30 April 2018).

Sullivan, Mark P. *Venezuela: Background and U.S. Relations*. 2016.
<http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1022595.pdf> (diakses pada 8 September 2018).

Telesur. "US Pumped \$4.2M in 2015 to Destabilize Venezuelan Government." *Telesur*, 8 April 2017. <https://www.telesurtv.net/english/news/US-Pumped-4.2M-in-2015-to-Destabilize-Venezuelan-Government-20170408-0006.html> (diakses pada 16 September 2018).

The New York Times. "Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins." *New York Times*, 9 Agustus 2017. <https://www.nytimes.com/elections/results/president> (diakses pada 25 September 2018).

The White House. *Office of the Press Secretary. Statement of President Obama on the Death of Venezuelan President Hugo Chávez*. 5 Maret 2013. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/05/statement-president-obama-death-venezuelan-president-hugo-chavez> (diakses pada 8 September 2018).

The White House. *President Donald J. Trump's Foreign Policy Puts America First*. 30 Januari 2018. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-foreign-policy-puts-america-first/> (diakses pada 16 September 2018).

The White House. *President Trump's 100 Days of Accountability*. <https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/accountability.pdf> (diakses pada 16 September 2018).

The White House. *Statement by the Press Secretary on New Financial Sanctions on Venezuela*. 25 Agustus 2017. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-new-financial-sanctions-venezuela/> (diakses pada 20 April 2018).

The White House. *Statement From President Donald J. Trump*. 2017. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-5/> (diakses pada 28 Mei 2018).

Trading Economics. *United States Gross National Product*.
<https://tradingeconomics.com/united-states/gross-national-product> (diakses pada 17 September 2018).

United States Department of Agriculture. *Agriculture Technology*.
<https://nifa.usda.gov/topic/agriculture-technology> (diakses pada 18 September 2018).

United States Senate. *Washington DC 20510*. 19 Juni 2017.
<https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/061917%20Rosneft%20Citgo%20Letter1.pdf> (diakses pada 27 September 2018).

U.S. Department of State. *Announcement of Venezuelan Recall Referendum Timeline*. 22 September 2016. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/09/262317.htm> (diakses pada 9 September 2018).

U.S. Department of State. *Congressional Budget Justification*. 2017.
<https://www.state.gov/documents/organization/252179.pdf> (diakses pada 17 September 2018).

U.S. Department of State. *Democracy*. <https://www.state.gov/j/drl/democ/> (diakses pada 17 September 2018).

U.S. Department of State. *Secretary Kerry Interview with Andrés Oppenheimer of CNN Español*. April 17. 2016, <http://www.humanrights.gov/dyn/04/-secretary-kerry-interview-with-andres-oppenheimer-of-cnn-espanol/>.

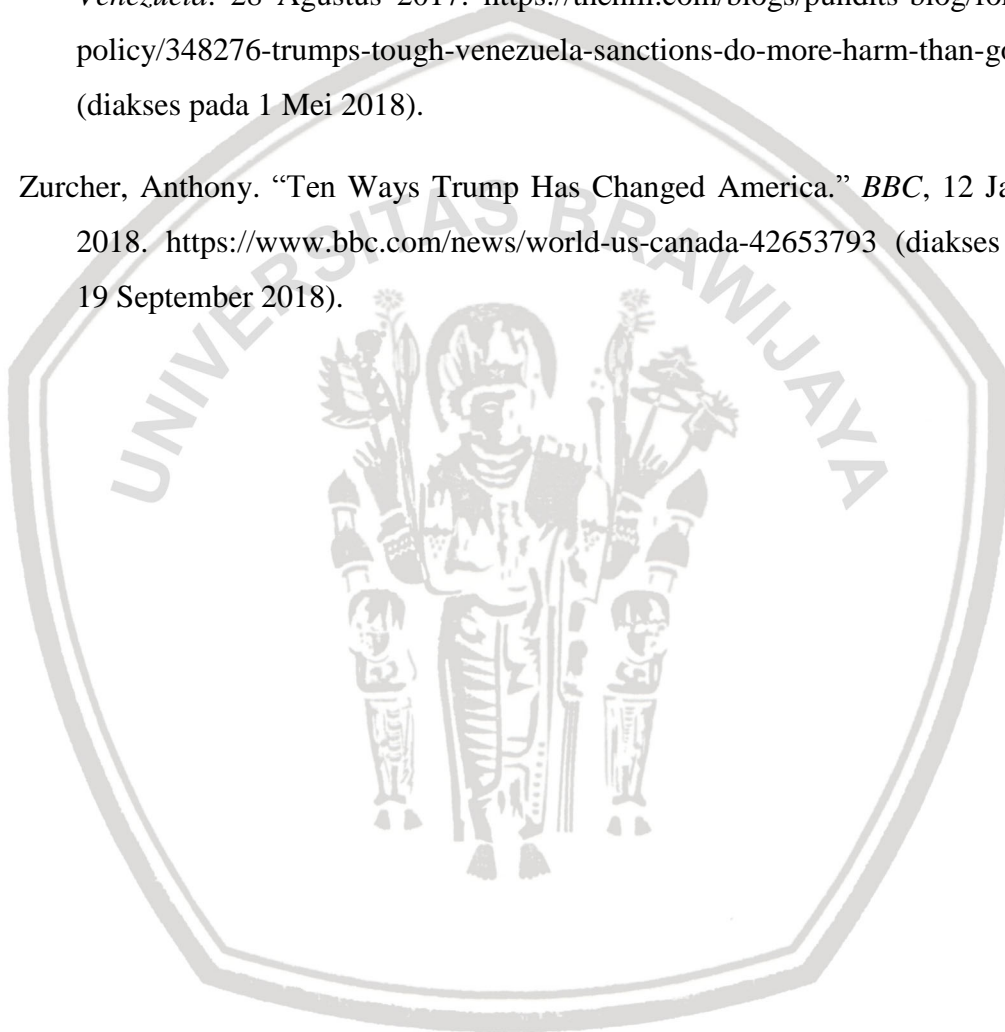
U.S. Department of State. *Transfer of Leopoldo Lopez to House Arrest in Venezuela*. 8 Juli 2017.
<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272436.htm> (diakses pada 9 September 2018).

- U.S. Department of State. *U.S. Relations with Venezuela*.
<https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35766.htm> (diakses pada 7 September 2018).
- U.S. Department of State. *Venezuela's Illegitimate National Constituent Assembly*.
 3 Agustus 2017. <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/08/273024.htm>
 (diakses pada 17 September 2018).
- U.S. Department of State. *Venezuela – Related Sanctions*.
<https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/> (diakses pada 20 April, 2018).
- U.S. Department of State. *Venezuelan Supreme Court Decision Greatly Undermines Democratic Institutions*. 30 Maret 2017.
<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269332.htm> (diakses pada 9 September 2018).
- U.S. Department of State. *Venezuela: Maduro Government Must Stop Silencing Opposition Voices*. 10 April 2017.
<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/269690.htm>
<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/269690.htm> (diakses pada 9 September 2018).
- U.S. Department of The Treasury. *Sanctions Program and Country Information*.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx> (diakses pada 19 April 2018).
- U.S. Energy Information Administration. *What Countries Are The Top Producers And Consumers Of Oil?*. 2017.
<https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6> (diakses pada 14 September 2018).
- USA.gov. *Branches of The U.S. Government*. <https://www.usa.gov/branches-of-government> (diakses pada 17 September 2018).

Walt, Stephen M. "Why Is America So Bad At Promoting Democracy In Other Countries." *Foreign Policy*, 25 April 2016. <https://foreignpolicy.com/2016/04/25/why-is-america-so-bad-at-promoting-democracy-in-other-countries/> (diakses pada 1 September 2018).

Weisbrot, Mark. *Trump's Tough New Sanctions Will Harm The People of Venezuela*. 28 Agustus 2017. <https://thehill.com/blogs/pundits-blog/foreign-policy/348276-trumps-tough-venezuela-sanctions-do-more-harm-than-good> (diakses pada 1 Mei 2018).

Zurcher, Anthony. "Ten Ways Trump Has Changed America." *BBC*, 12 Januari 2018. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42653793> (diakses pada 19 September 2018).





Lampiran

Presidential Documents

Federal Register

Vol. 82, No. 166

Tuesday, August 29, 2017

Title 3—

Executive Order 13808 of August 24, 2017

The President

Imposing Additional Sanctions With Respect to the Situation in Venezuela

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 *et seq.*) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 *et seq.*), and section 301 of title 3, United States Code,

I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, in order to take additional steps with respect to the national emergency declared in Executive Order 13692 of March 8, 2015, and particularly in light of recent actions and policies of the Government of Venezuela, including serious abuses of human rights and fundamental freedoms; responsibility for the deepening humanitarian crisis in Venezuela; establishment of an illegitimate Constituent Assembly, which has usurped the power of the democratically elected National Assembly and other branches of the Government of Venezuela; rampant public corruption; and ongoing repression and persecution of, and violence toward, the political opposition, hereby order as follows:

Section 1. (a) All transactions related to, provision of financing for, and other dealings in the following by a United States person or within the United States are prohibited:

- (i) new debt with a maturity of greater than 90 days of Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA);
- (ii) new debt with a maturity of greater than 30 days, or new equity, of the Government of Venezuela, other than debt of PdVSA covered by subsection (a)(i) of this section;
- (iii) bonds issued by the Government of Venezuela prior to the effective date of this order; or
- (iv) dividend payments or other distributions of profits to the Government of Venezuela from any entity owned or controlled, directly or indirectly, by the Government of Venezuela.

(b) The purchase, directly or indirectly, by a United States person or within the United States, of securities from the Government of Venezuela, other than securities qualifying as new debt with a maturity of less than or equal to 90 or 30 days as covered by subsections (a)(i) or (a)(ii) of this section, respectively, is prohibited.

(c) The prohibitions in subsections (a) and (b) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted before the effective date of this order.

Sec. 2. (a) Any transaction that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

(b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

Sec. 3. For the purposes of this order:

(a) the term “person” means an individual or entity;



(b) the term “entity” means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization;

(c) the term “United States person” means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States; and

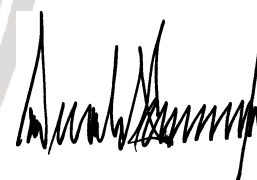
(d) the term “Government of Venezuela” means the Government of Venezuela, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, including the Central Bank of Venezuela and PdVSA, and any person owned or controlled by, or acting for or on behalf of, the Government of Venezuela.

Sec. 4. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to take such actions, including promulgating rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA as may be necessary to implement this order. The Secretary of the Treasury may, consistent with applicable law, redelegate any of these functions to other officers and executive departments and agencies of the United States Government. All agencies of the United States Government shall take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order.

Sec. 5. For those persons whose property or interests in property are affected by this order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the ability to transfer funds or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in addressing the national emergency declared in Executive Order 13692, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant to this order.

Sec. 6. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

Sec. 7. This order is effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on August 25, 2017.



THE WHITE HOUSE,
August 24, 2017.